



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJMD Merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN;
- b. bahwa sesuai Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026.

1. Mengingat.....

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang.....✧

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Daerah...✎

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI KABUPATEN MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Kepala Daerah.....

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malinau yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan.....✓

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
24. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II.....✕

BAB II AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan azas ;
- a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. ketepaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintah yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien;
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD Kabupaten Malinau disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD Kabupaten Malinau merupakan :
- a. penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau;
 - b. dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Malinau adalah untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kabupaten/Kota serta dengan Kabupaten yang berbatasan;
- c. sebagai pedoman dalam :
 - 1) Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - 3) Penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

BAB IV.....✎

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Malinau dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) RPJMD Kabupaten Malinau memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD Kabupaten Malinau disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
- (4) RPJMD Kabupaten Malinau bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional".

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Malinau disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MALINAU;
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB IX	: PENUTUP.

- (2) Rincian RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI VISI MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL.

(2) Misi RPJM.....*

(2) Misi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 -2026 adalah :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- b. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- c. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;

BAB VII
PELAKSANAAN RPJM DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Pasal 7

- (1) RPJMD Kabupaten Malinau menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten Malinau terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun RPJMD Kabupaten Malinau periode berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX.....

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar ; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. draft rancangan awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok RPJPD;
 - b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan/atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.
- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

(4) RENSTRA.....✓

- (4) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Malinau wajib mempedomi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Oktober 2021



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (71 / 2 / 2021).

- (4) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Malinau wajib mempedomi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Oktober 2021



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,


ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (71 / 2 / 2021).



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah, yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan ke 4 pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025. Dimana pada tahapan ini pembangunan Kabupaten Malinau ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Malinau yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat



yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup. Dengan demikian, tahapan ini akan ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (1) Mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; (3) Perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; (4) Prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis yang unggul; (5) Pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta (6) Penataan ruang menjadi acuan utama pembangunan.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Malinau juga memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Malinau, masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk dari akademisi dan masyarakat, hasil analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditingkat nasional, regional dan global. Dimana RPJMD Kabupaten Malinau ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yaitu bapak Wempi W. Mawa,SE dan Jakaria,SE.,M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang dilantik pada tanggal 26 April 2021 dengan masa jabatan 2021 - 2024.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dan sumber hukum utama. Penyusunan RPJMD mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum operasional RPJMD, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362).
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
 - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 - 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - 20) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 - 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
 - 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633).
 - 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 459).
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228).



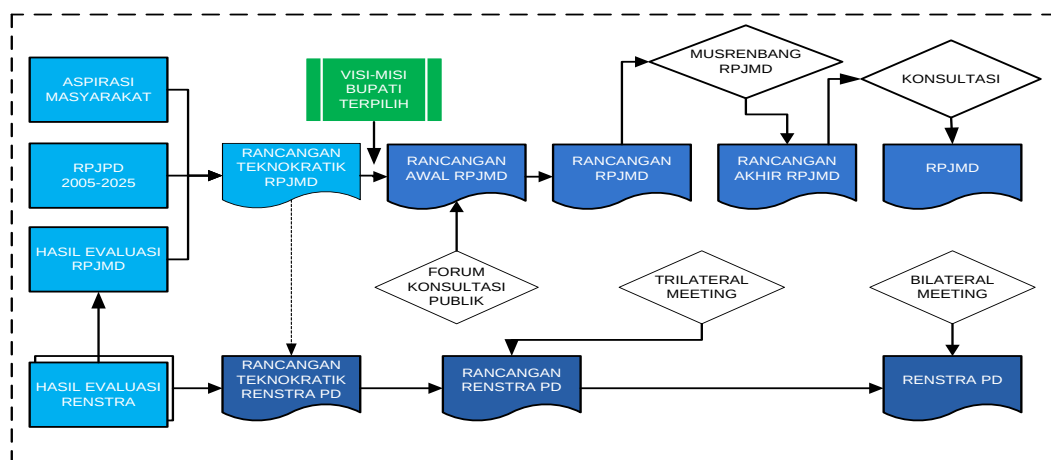
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781).
- 33) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Malinau memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional,



provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 **Keterkaitan Antar Dokumen dalam Perencanaan Pembangunan**

RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas RPJMD sangat ditentukan bagaimana proses penyusunannya dan seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis pemikiran strategis tersebut dalam bentuk kebijakan yang nanti akan dilaksanakan pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan strategis berkaitan erat dengan proses penetapan arah pengembangan daerah dan pencapaiannya dalam lima tahun mendatang, strategi pencapaian, dan tahapan strategis agar tujuan tercapai. Dengan ini perlu mengetahui bagaimana keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025



Dokumen perencanaan yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah dokumen RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025 agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan periode implementasi RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, maka periode RPJMD mendatang merupakan tahapan yang keempat atau terakhir. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau masa bakti Tahun 2021-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan RTRW

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam RTRW yang telah ditetapkan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen Perencanaan Pusat



Perumusan berbagai kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 memerlukan sinkronisasi dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pusat, khususnya RPJMN 2020-2024. Salah satu fokus yang perlu diselaraskan adalah arah kebijakan nasional kewilayahan khususnya di Pulau Kalimantan sehingga setiap kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Malinau akan mampu mendukung ketercapaian dari visi pembangunan nasional. Tindaklanjut dari penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional adalah penyelarasan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga diintegrasikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 untuk mendukung ketercapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masingmasing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.



4. Menetapkan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau serta kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau periode 2021-2026;
5. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Malinau.
7. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau beserta landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud, tujuan, sasaran, serta ruang lingkup pekerjaan disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum karakteristik wilayah Kabupaten Malinau, serta gambaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malinau, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:



- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum keuangan daerah baik yang diambil dari data keuangan daerah maupun hasil analisis, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai permasalahan yang ada didalam Pembangunan Kabupaten Malinau berdasarkan kondisi daerah, dan juga isu strategis yang merupakan turunan dari permasalahan strategis yang dikombinasikan dengan rencana 5 (lima) program prioritas jangka menengah daerah, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini akan disampaikan mengenai visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Malinau yang nantinya menjadi arahan bagi perumusan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, serta Indikator Kinerja pelaksanaan



pembangunan jangka menengah, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau untuk kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Malinau dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

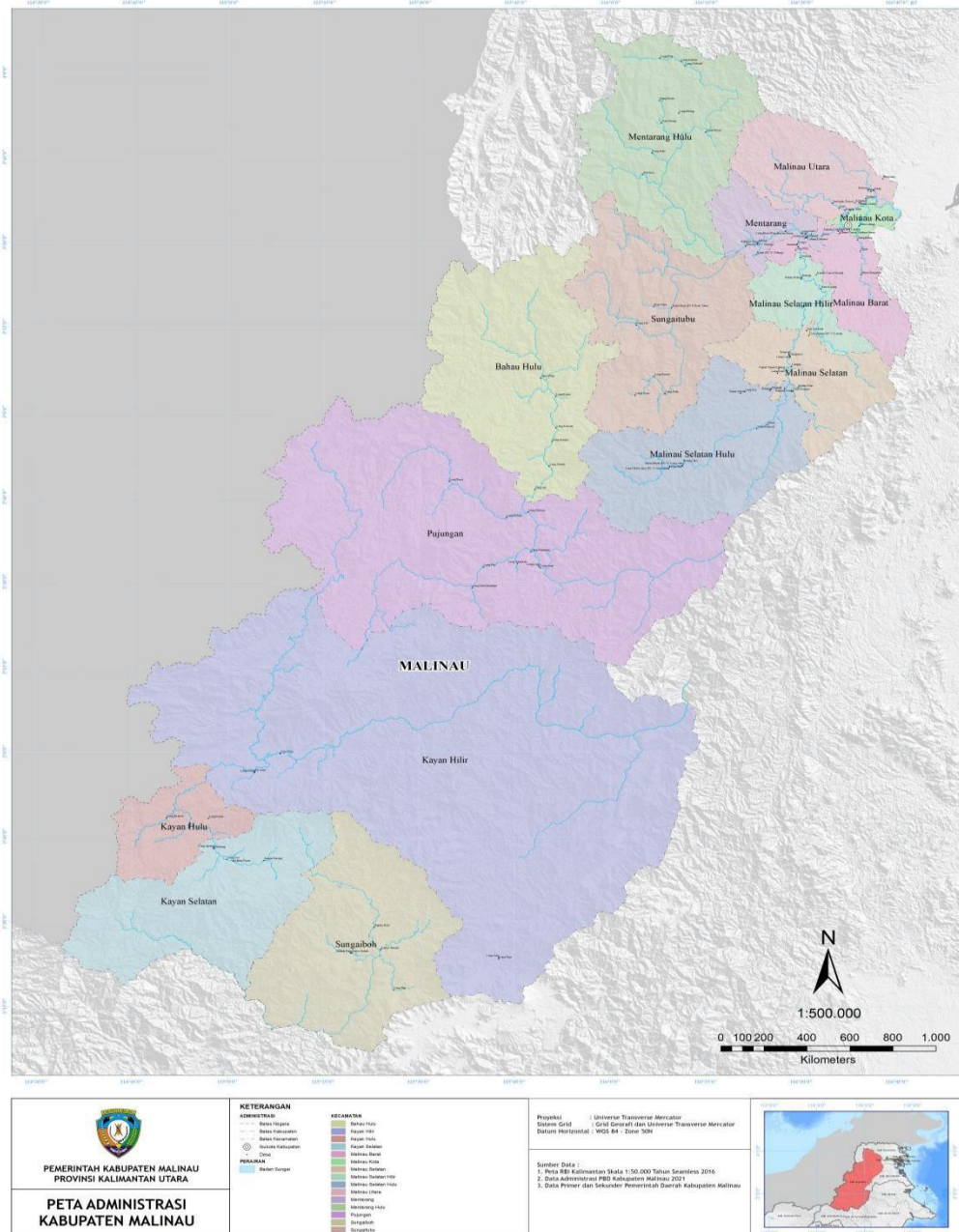
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

**BAB** **2****GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI****2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah****1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah**

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Letak Geografis Kabupaten Malinau adalah 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" BT dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" LU. Kabupaten Malinau juga merupakan satu kabupaten dari dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Secara lengkap batas wilayah Kabupaten Malinau adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 40.088,38 Km², dengan kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, dan merupakan kabupaten terluas yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.



Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020)

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terdiri atas 15 Kecamatan dengan luasan wilayah yang tidak terdistribusi secara merata antar masing-masing kecamatan. Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau, yakni dengan luas wilayah 11.863,19 km² atau 29,59 % dari luas wilayah Kabupaten Malinau, sedangkan kecamatan yang paling kecil luasannya adalah Kecamatan Malinau Kota dengan luas wilayah hanya 142,07 km² atau 0,35 % dari luas wilayah Kabupaten Malinau. Secara rinci berkenaan dengan kecamatan dan luasannya disajikan pada Tabel 2.1.



Tabel 2. 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Sungai Boh	3.112,18	7,76
Kayan Selatan	3.138,59	7,83
Kayan Hulu	735,40	1,83
Kayan Hilir	11.863,19	29,59
Pujungan	6.539,39	16,31
Bahau Hulu	3.098,98	7,73
Sungai Tubu	2.243,78	5,60
Malinau Selatan Hulu	2.171,14	5,42
Malinau Selatan	1.153,35	2,88
Malinau Selatan Hilir	572,20	1,43
Mentarang	535,15	1,33
Mentarang Hulu	2.924,65	7,30
Malinau Utara	1.091,19	2,72
Malinau Barat	767,12	1,91
Malinau Kota	142,07	0,35
Kabupaten Malinau	40.088,38	100

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka (2021)

Dari beberapa kecamatan yang termuat pada tabel 2.1 terdapat 5 (lima) kecamatan terletak di kawasan perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sungai Boh, kecamatan-kecamatan tersebut merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Dimana kawasan kecamatan tersebut mempunyai peranan dan potensi penting dalam kepastian batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, keutuhan wilayah serta pertahanan dan keamanan.

2. Kondisi Topografi

Berdasarkan peta topografi wilayah Kabupaten Malinau lebih didominasi oleh dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan, denganketinggian wilayah berkisar antara 0–3.000 m diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan yang berada di daerah dengan ketinggian lebih dari 300 dpl meliputi 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Bahau Hulu dan Kecamatan Mentarang Hulu, dengan cakupan luas mencapai 23.782,18 km² atau 61,02% dari luas Kabupaten Malinau. Terdapat 5 (lima) kecamatan yang berada pada wilayah dataran kurang dari 100 mdpl, yaitu Kecamatan Malinau Selatan (83,30 m dpl), Kecamatan Malinau Barat (63,20 m dpl), Kecamatan Mentarang (63,00 m dpl), Kecamatan Malinau Kota (62,00 m dpl)



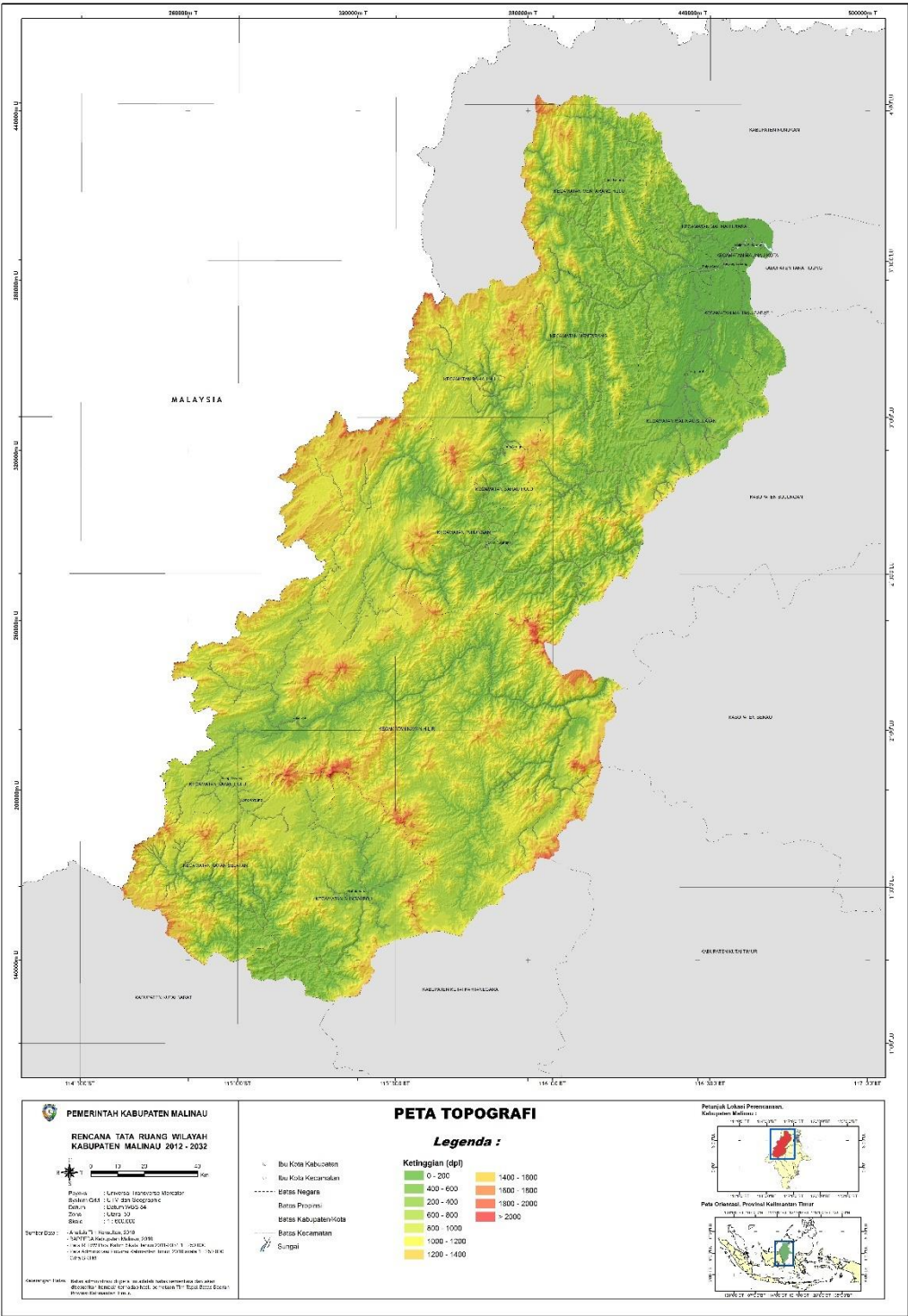
dan Malinau Utara (59,07 m dpl). Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang sungai Malinau, sungai Semendurut, sungai Sembuak, Salap dan sebagian di Ibu Kota Kecamatan Mentarang.

Daerah dataran tinggi yang terjal, pegunungan dan perbukitan yang ditumbuhi hutan belantara berada di sebagian Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentaran Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh. Daerah ini merupakan wilayah-wilayah berperan strategis bagi kelestarian lingkungan wilayah sekitarnya yang lebih rendah datarannya, sehingga kelestarian kawasan hutan di wilayah ini menjadi sebuah keniscayaan. Secara rinci berkenaan dengan luas dan tinggi dpl untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Malinau disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Malinau

Kecamatan	Ibu Kota	Luas (Km²)	Tinggi dpl (m)
Sungai Boh	Mahak Baru	3.112,18	566,2
Kayan Selatan	Long Ampung	3.138,59	744,4
Kayan Hulu	Long Nawang	735,40	611,1
Kayan Hilir	Data Dian	11.863,19	604,2
Pujungan	Long Pujungan	6.539,39	267,9
Bahau Hulu	Long Alango	3.098,98	416,0
Sungai Tubu	Long Pada	2.243,78	n.a
Malinau Selatan Hulu	Metut	2.171,14	n.a
Malinau Selatan	Long Loreh	1.153,35	83,3
Malinau Selatan Hilir	Setarap	572,20	n.a
Mentarang	Pulau Sapi	535,15	63,0
Mentarang Hulu	Long Berang	2.924,65	423,7
Malinau Utara	Malinau Seberang	1.091,19	59,7
Malinau Barat	Tanjung Lapang	767,12	63,2
Malinau Kota	Malinau Kota	142,07	62,0
Kabupaten Malinau		40.088,38	

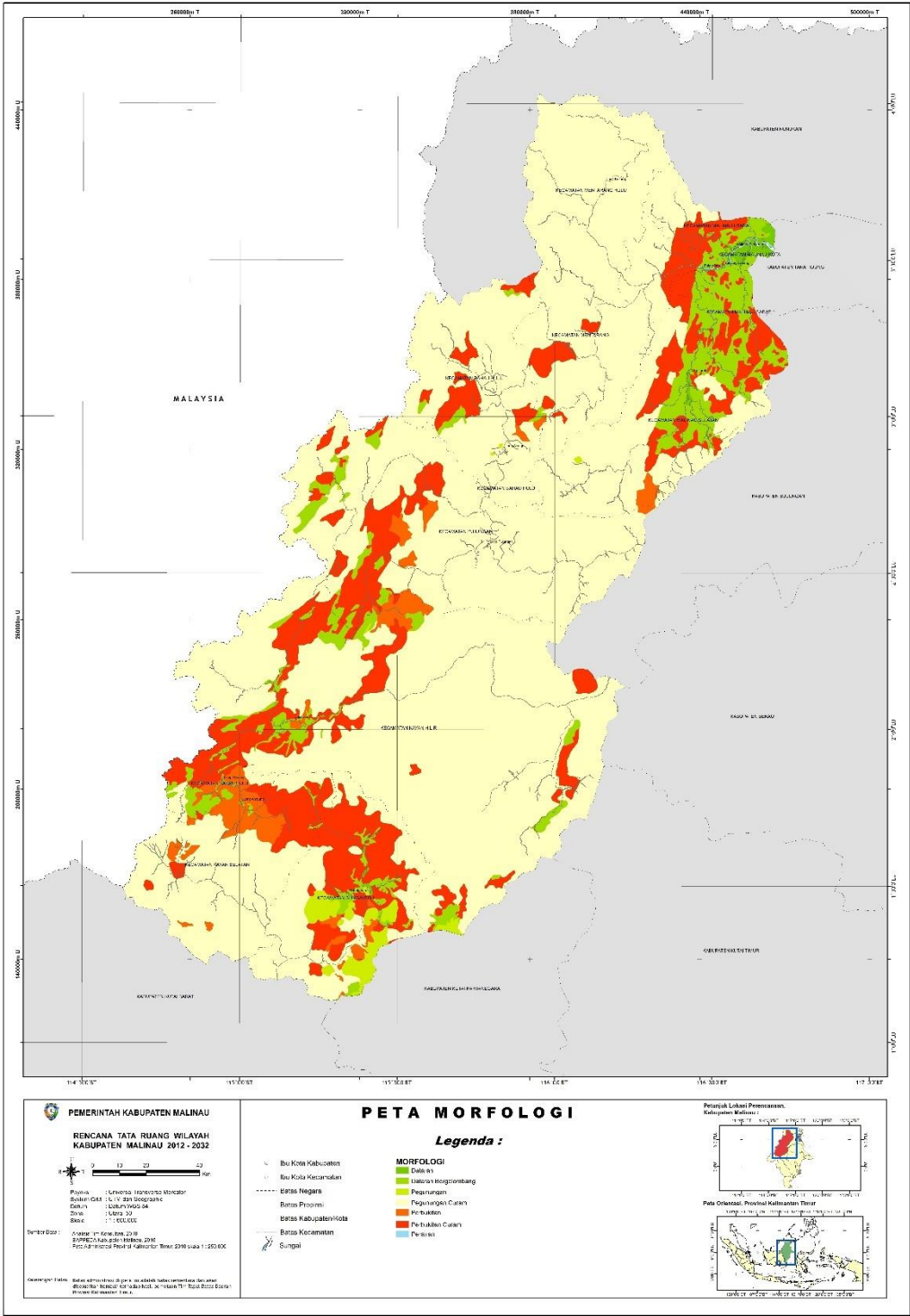
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Malinau (diolah) dan Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020)



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032



3. Kondisi Morfologi



Gambar 2. 3 Peta Morfologi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Berdasarkan interpretasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000 (1995) geomorfologi daerah Malinau dan sekitarnya dapat dibagi atas dua satuan morfologi sebagai berikut:

1) Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi dataran merupakan daerah dataran aluvium yang mendominasi daerah Malinau pada ketinggian



berkisar antara 15 – 25 m diatas muka laut. Sungai utama adalah Sungai Sesayap yang mengalir dari arah timur ke barat dengan anak-anak sungai yang bermuara daerah pegunungan di daerah timur. Sungai Sesayap berbentuk meander yang lebih ke arah timur menuju laut di selat Makasar. Proses meandering sungai Sesayap ini akibat dari kondisi batuan pada satuan aluvium yang berupa lumpur, lanau, pasir, kerikil, sampai kerakal, dan bersifat lepas. Bentuk sungai Sesayap ini berbentuk “U” yang menandakan stadia sungai ini stadia dewasa sampai stadia tua.

2) Satuan Morfologi pebukitan rendah-tinggi

Satuan morfologi pebukitan rendah-tinggi ini mendominasi daerah bagian timur dari kota Malinau dan membentang dari utara ke selatan. Pada satuan morfologi ini merupakan hutan belukar membentuk tapal kuda mengelilingi kota Malinau. Satuan morfologi berkisar antara 50-100 m di atas muka laut dengan kemiringan lereng berkisar antara 10–150 dengan batuan penyusunnya terdiri dari konglomerat, batu-pasir, batu lempeng dan batu gamping terumbu. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi umumnya menempati daerah bagian barat dengan elevasi berkisar antara 100–200 m diatas muka laut dengan kemiringan lereng antara 20–250. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi batuan penyusunnya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan setempat breksi dan konglomerat. Secara stratigrafi umur batuan pada satuan morfologi perbukitan tinggi lebih tua (kapur akhir s/d Paleosen) dari pada satuan batuan pada satuan morfologi pebukitan rendah (umur Eosen Tengah sampai dengan Eosen Akhir). Pola aliran sungai (drainage pattern) berupa pola aliran dendiririk berbentuk menyerupai cabang-cabang pohon yang mencerminkan kekerasan batuan yang sama atau soil seragam dengan lapisan batuan sedang horisontal atau miring landai serta kontrol struktur tidak begitu tampak jelas. Pola aliran sungai dendritik ini mengalir dari bagian puncak pebukitan dengan arah lembah sungai yang tidak teratur dan mengalir menuju ke arah sungai induk yaitu sungai sesayap.



1. Batuan penyusun dan stratigrafi

1) Batuan Penyusun

Dalam penafsiran batuan (litologi), dilihat dari pola dan sifat garis kontur, maka hasil penafsiran litologi dapat dibedakan antara lain :

- I. Batuan keras (litologi resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif tinggi dengan pola kontur rapat.
- II. Batuan lunak (litologi non resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif landai dengan pola kontur rendah.
- III. Batuan urai (endapan alluvial).
- IV. Batuan karbonat dicirikan oleh kenampakan pebukitan karst (dolina, uvala, dan lainnya).
- V. Intrusi, dicirikan oleh pola kontur yang melingkar dan berbeda dengan pola kontur sekitarnya (merupakan bukit terisolir).

Atas dasar penafsiran batuan (litologi) tersebut diatas, maka batuan penyusun daerah Malinau dan sekitarnya berdasarkan pada peta geologi lembar Malinau skala 1 : 250.000 (Heryanto, cs, 1995), secara stratigrafi dari batuan berumur muda sampai batuan berumur tua adalah sebagai berikut:

- I. Satuan aluvium (Qa): Terdiri dari lumpur, lanau, pasir, kerikil dan kerakal, diendapkan pada umur Holosen.
- II. Satuan batuan sumbat, retas (Tma): Terdiri dari andesit, basalt, andesit-basalt, trakit, berumur Miosen Akhir.

Formasi Langap (Tml): Terdiri dari tuf putih, kapuran, konglomerat, komponen sekitar 80% dan 90% berupa batu pasir lempungan dan kwarsa susu, matriks batu pasir kasar, menampakkan struktur silang-siur, mengandung beberapa lapisan tebal batu bara. Berumur Miosen Akhir. Batuan gunungapi jelai (Tomj): Terdiri dari breksi vulkanik, tuf, breksi lava. Leleran lava bersusun basalt-andisitan. Formasi Sebakung (Tes): terdiri dari konglomerat alas, batu lempung, batu lanau, dan batu gamping terumbu, kaya akan ganggang, foraminifera, koral, moluska dan gastropoda. Umur Eosen Tengah-Eosa Akhir. Diendapkan dalam laut dangkal, tebal satuan batuan ini paling sedikit 300 m. Formasi Malinau (Tema): terdiri dari batu pasir, felsparan, lempungan dan mikaan, warna kelabu kehijauan berbutir sedang sampai kasar,



terpilah buruk, tebal lapisan 20–50 cm, setempat beberapa meter, berselingan dengan batu lanau lempungan atau argilit, warna kelabu tua – hitam, mikaan dan gampingan. Umur Eosen Tengah. Diendapkan dalam lingkungan laut dangkal.

Formasi Mentarang Kelompok Embaluh (KTme): Terdiri dari batu pasir, warna kelabu mengandung sedikit fragmen batuan, setempat breksi dan konglomerat, endapan flish, umur Kapur Akhir-Paleosen, mungkin diendapkan dalam lereng benua pada tepi cekungan samudera. Formasi Lurah Kelompok Embaluh (KTlu): Terdiri dari batu pasir (sub-grewake); kehijauan, felsparan dan mikaan, berbutir halus – sedang, tebal lapisan beberapa desimeter sampai meter, pada bagian atasnya ditempati batu gamping, batu lanau, dan argilit, umur diduga Kapur Akhir sampai Paleosen. Lingkungan pengendapannya mungkin pada tepi benua “marginal flysch”. Formasi Long Bawan, Kelompok Embalu (KTlb): Terdiri dari argilit, warna jingga, hijau atau kelabu muda, berlapis felsparan, dan arkose kelabu, kaya akan bahan organik, mikaan, tebal lapisan dari beberapa desimeter sampai beberapa meter, mengandung evaporit air garam dan lapisan batubara dengan tebal sekitar 0,5 – 1,5m. Umur diduga Paleosen. Lingkungan pengendapannya fluviatil sampai lagon. Formasi Paking (Mpa): Terdiri dari sekis serisit dan sekis klorit, warna kelabu kehijauan, fasies sekis hijau, menunjukkan perdaunan (foliasi). Umur diduga Kapur Awal atau lebih tua. Ultramafik (Mub): Terdiri dari serpentinit, gabro terbreksikan, berdasarkan posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya, diduga berumur Yura Akhir.

2) Stratigrafi

Hubungan secara stratigrafi dari satuan batuan di daerah Malinau dan sekitarnya, batuan yang dianggap sebagai batuan yang paling tua adalah batuan-batuan pada Formasi Paking, yang diduga umurnya Kapur Awal atau lebih tua. Sedangkan batuan-batuan pada kelompok batuan ultramafik (ultra basa) hanya didasarkan pada posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya dan diduga berumur Jura Akhir. Hubungan stratigrafi antara kelompok batuan ultramafik terletak selaras



dibawah satuan batuan pada formasi Paking. Diatas Formasi Paking diendapkan satuan batuan dari hubungan stratigrafi secara tidak selaras (uncomfornity), karena adanya selang waktu dalam proses pengendapan. Satuan batuan Formasi Long Bawan Kelompok Embalu ini merupakan “Anggota” dari satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embalu yang berumur Kapur Akhir sampai Paleosen. Selanjutnya antara satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embaluh diendapkan dalam umur yang sama (Kapur Akhir sampai Paleosen) adalah satuan batuan Formasi Mentarang Kelompok Embaluh dengan hubungan stratigrafi secara tidak selaras karena terjadi selang waktu pengendapan dibarengi dengan kegiatan tektonik pada umur Eosen Awal. Pada umur yang bersamaan (Eosen Awal) diendapkan satuan batuan Formasi Sebakung, dengan hubungan stratigrafi secara menjari dengan satuan batuan Formasi Malinau. Diatas satuan batuan Formasi Sebakung diendapkan secara selaras satuan Formasi Batuan Gunungapi Jelai umur Moisen Awal, kemudian pengendapan selanjutnya secara tidak selaras karena adanya kegiatan tektonik, yaitu satuan batuan Formasi Langap umur Miosen Akhir, dan kegiatan tektonik dengan adanya selang waktu pengendapan terjadi pada umur Miosen Tengah, dan dalam waktu yang bersamaan yaitu pada umur Miosen Akhir diendapkan satuan batuan berupa sumbat atau netas berupa batuan terobosan (dike). Pada pengendapan terakhir yaitu Holosen diendapkan satuan batuan aluvium yang merupakan batuan sedimen urai (lepas) yang nampak di permukaan tanah, dan antara satuan batuan Formasi Langap dengan satuan batuan aluvium terdapat bidang erosi pada umur Pleistosen. Adapun uraian tentang hubungan stratigrafi dari satuan-satuan batuan pada lembar Malinau, didasarkan pada interpretasi Kolerasi Satuan Peta.

4. Kondisi Klimatologi

Mengacu pada data iklim yang bersumber dari stasiun yang ada di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau merupakan wilayah bercirikan iklim tropis basah, karena Kabupaten Malinau memiliki curah hujan yang tinggi (2.377,3 mm/th), kelembaban udara yang tinggi (49-99%), temperatur (suhu)



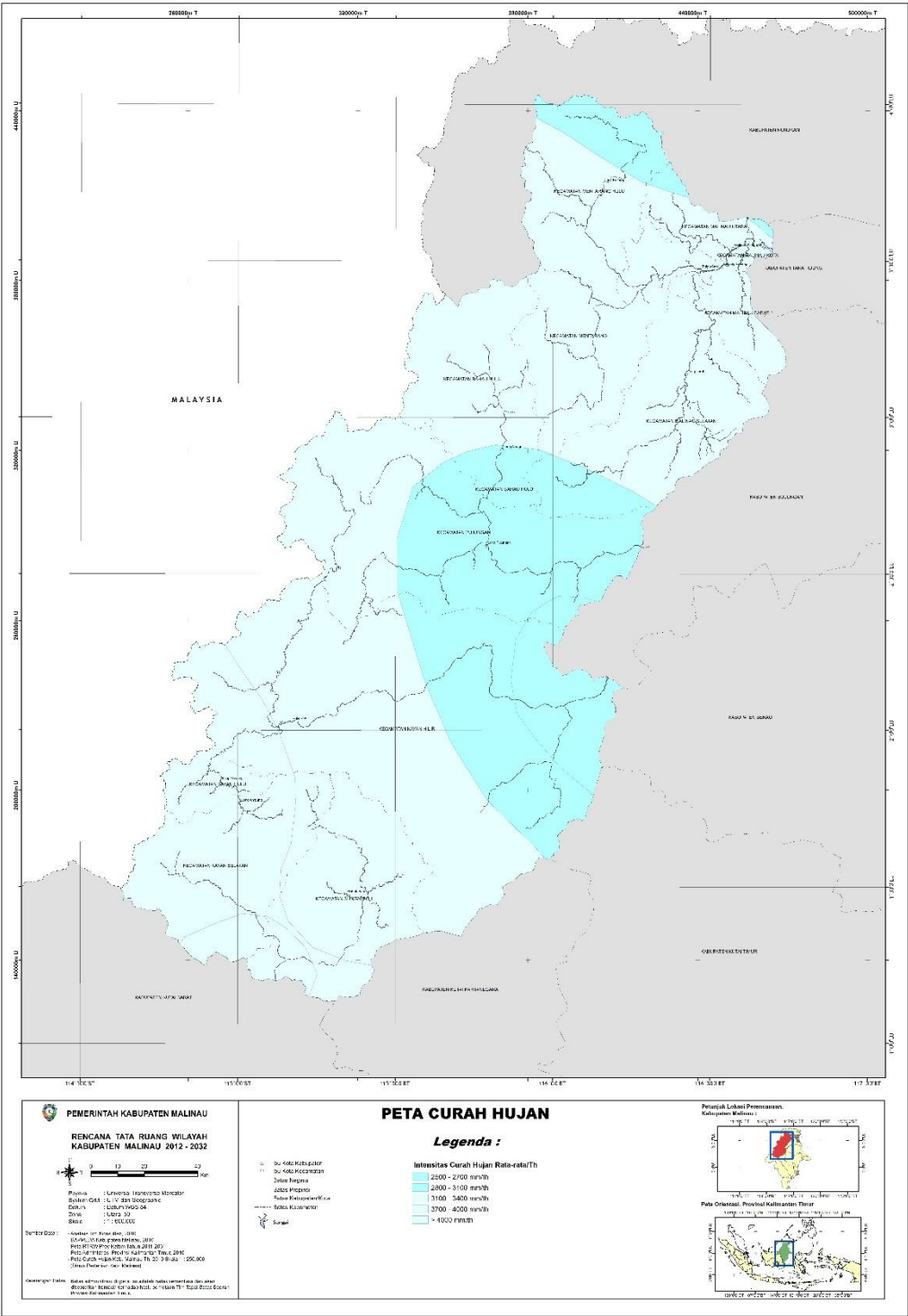
tahunan di atas 22°C dan dapat mencapai 36,3°C pada musim kemarau (Lihat Tabel 2.3). Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan.

Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Malinau merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi air bagi mobilisasi manusia dan barang. Peta sebaran curah hujan dapat dilihat pada gambar 2.4.

Tabel 2.3
Kondisi Iklim Kabupaten Malinau

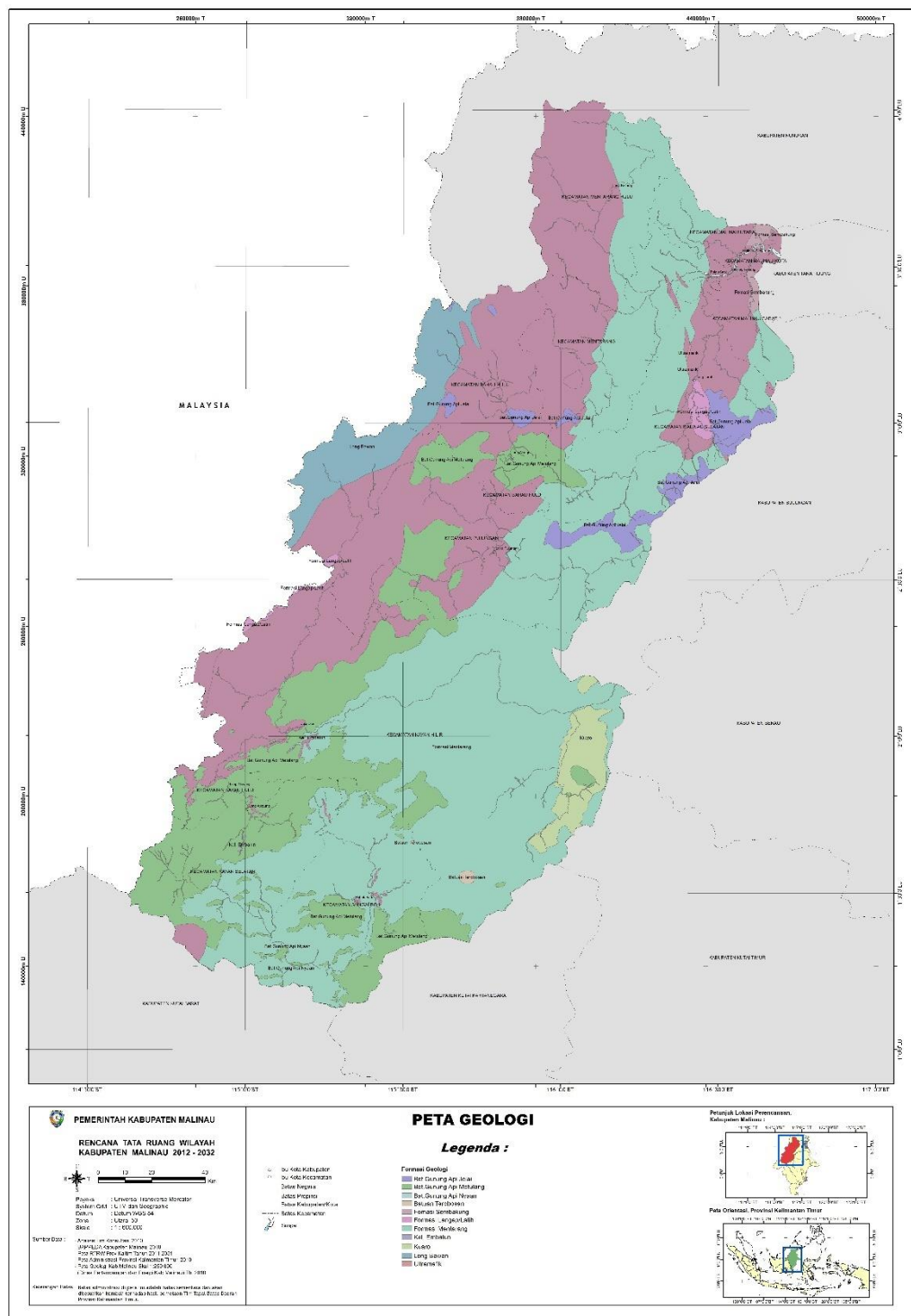
Uraian Komponen Iklim	Nilai Pengamatan
Suhu/Temperatur (°C)	
- Maksimum	34,8
- Minimum	23,2
- Rata-rata	27,5
Kelembaban Udara (%)	
- Maksimum	99,0
- Minimum	51,6
- Rata-rata	85,7
Tekanan Udara (mb)	1.010,1
Kecepatan Angin (m/dt)	3
Curah Hujan (mm/th)	2.377,3

Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, Kab. Bulungan dalam Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020)



Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

5. Kondisi Geologi



Gambar 2. 5 Peta Geologi
Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang sangat luas dan umumnya tersusun oleh batuan-batuan sedimen yang kompak dan batuan-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan.



pelipatan dan pesesaran. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan deposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah. Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah didalam menganalisisnya karena didalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja.

Berdasarkan interpretasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000 (Heryanto,cs,1995), struktur geologi pada lembar Malinau ini adalah struktur lipatan (fold) yaitu sinklin dan antiklin serta struktur sesar atau patahan (Fault) yaitu sesar normal (normal fault), sesar mendatar (transversal fault atau strike slip fault) dan sesar naik (reverse fault). Struktur lipatan sinklin maupun antiklin umumnya memperlihatkan arah sumbu lipatan hampir utara-selatan. Struktur lipatan ini diikuti oleh struktur sesar, terutama sesar naik (reverse fault) yang searah dengan sumbu lipatan, serta sesar mendatar mengiri (sinistral) berarah umum ke barat laut – tenggara.

Struktur sesar ini merupakan struktur geologi yang paling dominan di daerah Malinau. Korelasi dengan struktur geologi pada lembar Long Nawan Skala 1:250.000 (Pieter, Baharudin dan Mangga,1993), terdapat dua buah kawasan struktur utama, yaitu berupa lipatan yang paling mencolok dan terbesar di daerah Kalimantan, yang berarah antara timur dan timur laut. Selain struktur lipatan ini terdapat pula struktur sesar dan rebahan, dimana sepasang struktur sesar berarah timur laut mengikuti



lembah sungai sehingga memberi kesan bahwa struktur sesar tersebut curam sampai tegak, demikian pula sepasang struktur relahan yang saling berhubungan berarah timur laut dan barat daya.

Karakteristik Tanah Secara genesanya tanah terbentuk oleh hasil pelapukan breksi pada kerak bumi, yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama hingga sampai jutaan tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah :

- I. Iklim (suhu dan curah hujan)
- II. Jasad hidup (terutama vegetasi asli)
- III. Batuan sebagai bahan induk (tekstur dan struktur susunan kimia dan material)
- IV. Topografi daerah
- V. Waktu yang diperlukan bahan untuk membentuk tanah

Fungsi tanah pada masing-masing sektor tentunya berbeda-beda. Untuk sektor pertanian, tanah sangat penting untuk pertanian. Untuk sektor keteknikan, tanah berfungsi pada daya dukungnya. Untuk sektor pertambangan, tanah itu tidak punya arti, dalam artian apabila ada suatu endapan bahan galian (misalnya batu bara) maka tanah yang ada diatas endapan batu bara tersebut, disingkirkan sehingga endapan batu bara itu tersingkap dan selanjutnya dilakukan penambangan.

Ada tiga golongan pokok tanah yang kini umum dikenal ialah pasir, geluh, dan lempung (dalam Ilmu Tanah, oleh Harry Buckman, terjemahan Soegiman, 1982) sebagai berikut :

a) Pasir

Golongan pasir mencakup semua tanah yang pasirnya meliputi 70% atau lebih dari berat tanah itu. Sifat tanah semacam ini karena mencerminkan sifat pasirnya.

b) Lempung

Tanah dibentuk sebagai tanah lempung jika paling sedikit mengandung 35% lempung, setidaknya 40%. Selama kandungan lempung 40% atau lebih; nama kelas tanah ialah lempung pasir, lempung debu atau biasanya disebut lempung saja.



c) Geluh

Umumnya geluh itu memiliki kualitas-kualitas pasir dan lempung, tidak terlalu lepas, tanah pertanian ialah geluh. Geluh yang mengandung pasir digolongkan geluh pasiran. Geluh yang mengandung lempeng digolongkan geluh lempungan.

Berdasarkan batuan penyusun secara geologis, pada peta geologi lembar Malinau terdapat batuan pasir (Formasi Qa), lempung (Formasi Te ma), batu pasir (Formasi KTlu), batu lempung angilit (Formasi KTme). Dari klasifikasi tanah berdasarkan Ilmu Tanah, maka pada formasi-formasi batuan lembar Malinau dapat diklasifikasikan pada jenis tanah geluh. Geluh yang mengandung pasir (Formasi Qa) digolongkan pada geluh pasiran, dan geluh yang mengandung lempung (Formasi KTlu, Te ma, dan KTme) digolongkan pada geluh lempungan.

Kalau terdapat jumlah pasir terbanyak, tanah itu bertekstur kasar, dikenal sebagai tanah pasiran atau ringan karena tanah mudah diolah. Sebaliknya tanah bertekstur halus terdiri dari sebagian besar atas debu dan lempung, sifat liat dan lekatnya menentukan tanah sukar diolah atau tanah berat. Istilah-istilah ringan dan berat, dimaksudkan mudah tidaknya tanah dapat diolah.

d) Masalah Gambut

Pembentukan gambut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan topografi, dan lingkungan setempat. Berdasarkan topografinya dikenal dua macam gambut, yaitu:

1) Gambut Dataran Rendah

Rawa-rawa yang dibatasi tanggul sungai membentuk suatu cekungan yang tergantung endapan baru yang merupakan kolonisasi mangrove yang lama- kelamaan menjadi hutan mangrove. Sisa-sisa tanaman atau serasah yang berupa daun, ranting, atau bagian tanaman yang jatuh selalu jenih air, dan serasah tersebut terus-menerus menumpuk mengisi cekungan. Oleh karena selalu dalam keadaan basah, maka tidak mudah melapuk atau membusuk. Menurut ketebalannya, gambut dibagi kedalam dua macam, yaitu gambut tipis dan gambut tebal. Gambut tipis (gambut topogen), pembentukannya masih dipengaruhi oleh



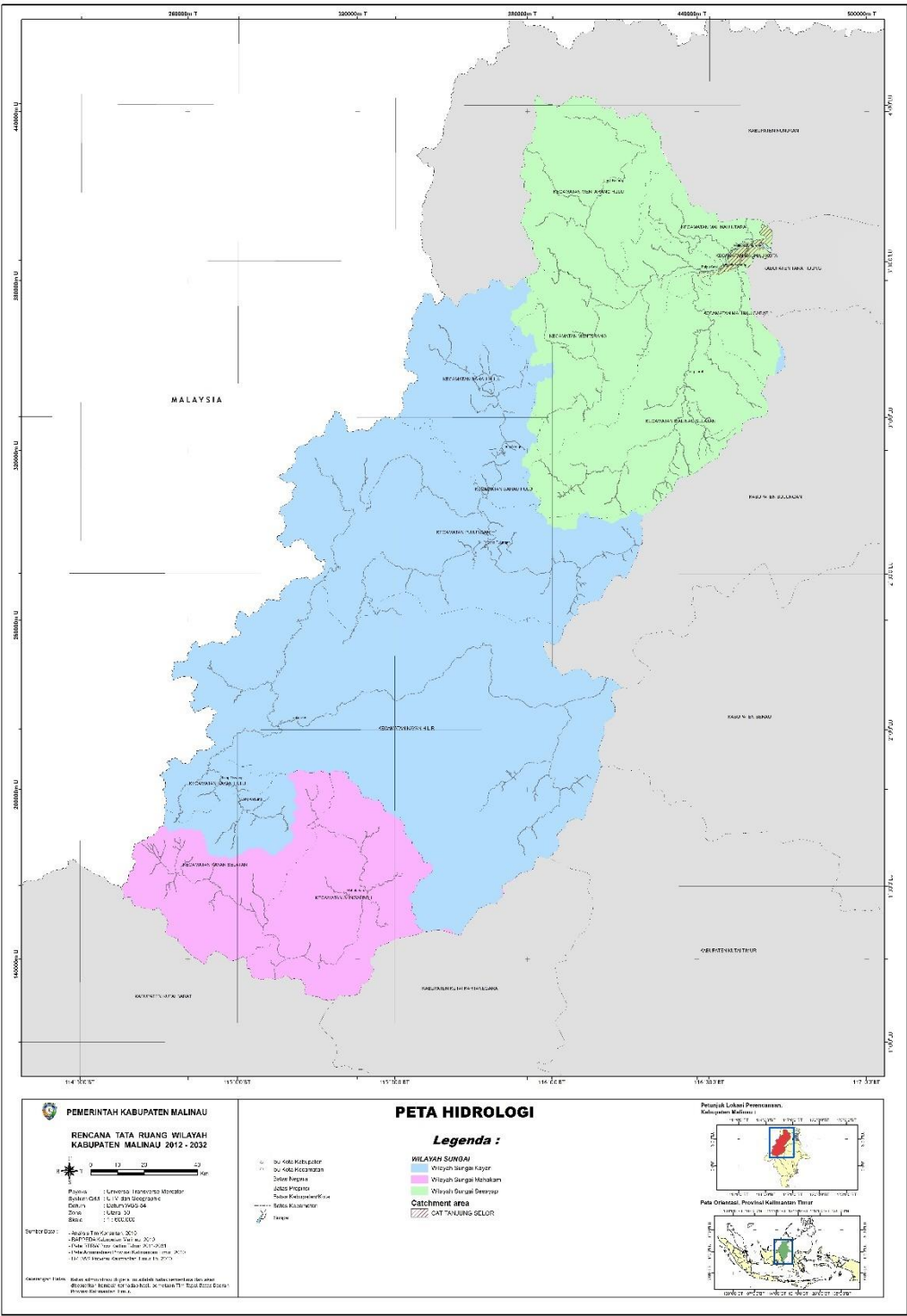
bahan material. Gambut tebal (gambut ombrogen) umumnya terbentuk jauh dari tepi sungai atau daerah cekungan, dimana akar-akar tanaman tidak sampai ke lapisan batuan/mineral dan hanya mendapat pengaruh air hujan, sehingga gambut tebal lebih sedikit unsur hara. Gambut dataran rendah dijumpai di pantai Timur Sumatera, seluruh pantai Kalimantan, dan Papua bagian selatan.

2) Gambut Pegunungan

Gambut ini terbentuk di pegunungan berhutan lebat dan hawa dingin. Hutan yang lebat menutupi bagian bawahnya dari sinar matahari dan suhu yang rendah tidak memungkinkan terjadinya dekomposisi (pelapukan) bahan organik sehingga sisa-sisa tanaman atau serasah tersebut menumpuk sampai tebal. Penumpukan bahan organik di daerah pegunungan disebut gambut pegunungan. Dijumpai di puncak Gunung Pangrango, Gunung Kerinci, dan gunung lainnya yang berhutan lebat.



6. Kondisi Hidrologi



Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai – sungai utama di Kabupaten Malinau terdiri dari : Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai Bahau , Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap , DAS Kayan , DAS Mahakam, DAS Sembakung dan DAS Berau. Sekitar 37.84 % Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (> 900



dpl) dan menjadi hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai tepanjang di Kabupaten Malinau antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576 Km), Sungai Penganau (242 Km) dan Sungai Mentarang (176 Km). Kelebihan-kelebihan yang menonjol dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat, tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif. Pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah sehingga akan menyebabkan debit air berkurang, pompa selam tidak berfungsi, dan dapat pula diikuti dengan penyusupan air laut ke daratan yang dapat merusak pondasi bangunan dan mencemari air bawah tanah itu sendiri.

7. Bentuk Lahan dan Tutupan Lahan

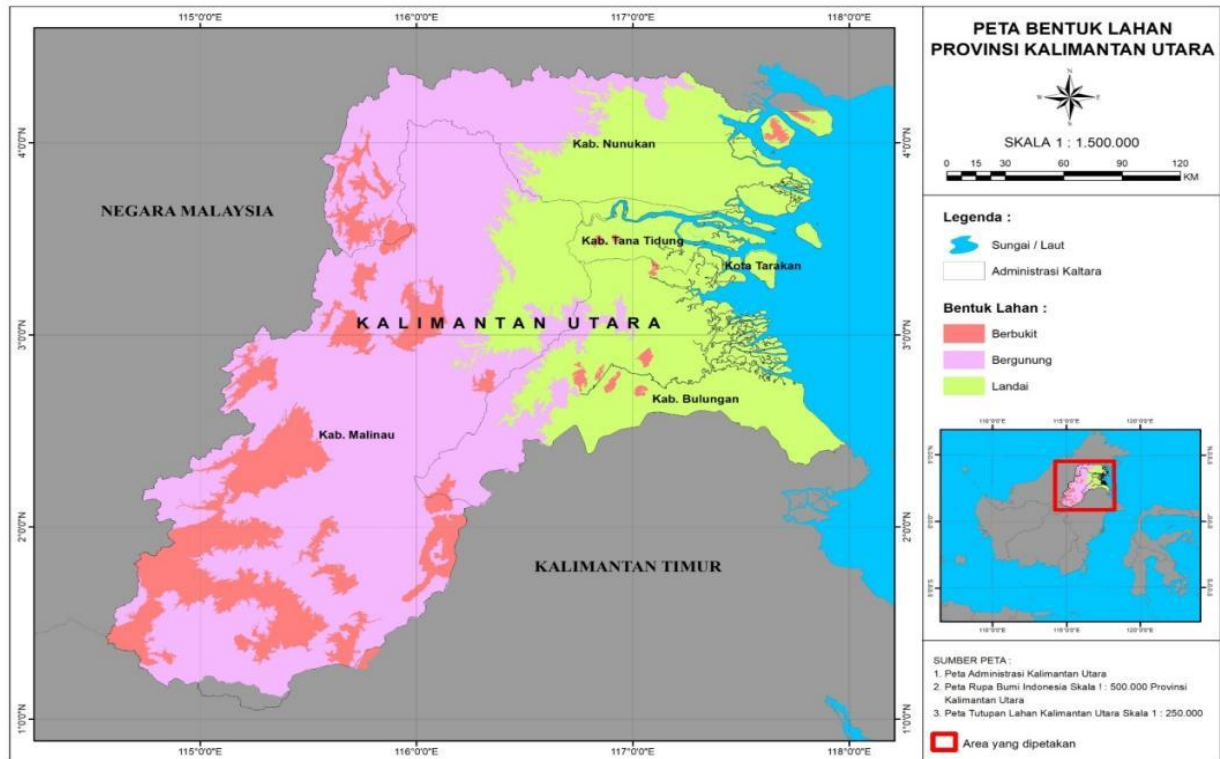
Berdasarkan Peta Bentuk Lahan Ekoregion Kalimantan yang *dipublish* oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan tahun 2016, dapat diketahui bahwa Kabupaten Malinau memiliki dominasi bentuk lahan Pegunungan Struktural Lipatan, yang memiliki elevasi > 500 m. Karakter lainnya, bentuk lahan pegunungan ini adalah lebih didominasi oleh kemiringan lereng yang terjal hingga sangat terjal. Keberadaan Pegunungan Struktural Lipatan mengindikasikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki kawasan yang sangat potensial sebagai daerah resapan air. Selain itu, daerah Pegunungan Struktural Lipatan ini dicirikan oleh kekayaan flora dan fauna endemik serta tumbuhan epifit.

Bentuk lahan lain yang cukup mendominasi wilayah ini adalah Perbukitan Struktural Lipatan yang umumnya memiliki elevasi < 500 m. Ciri penting perbukitan struktural lipatan ini adalah polanya yang memanjang, dimana bentuk lahan ini biasanya

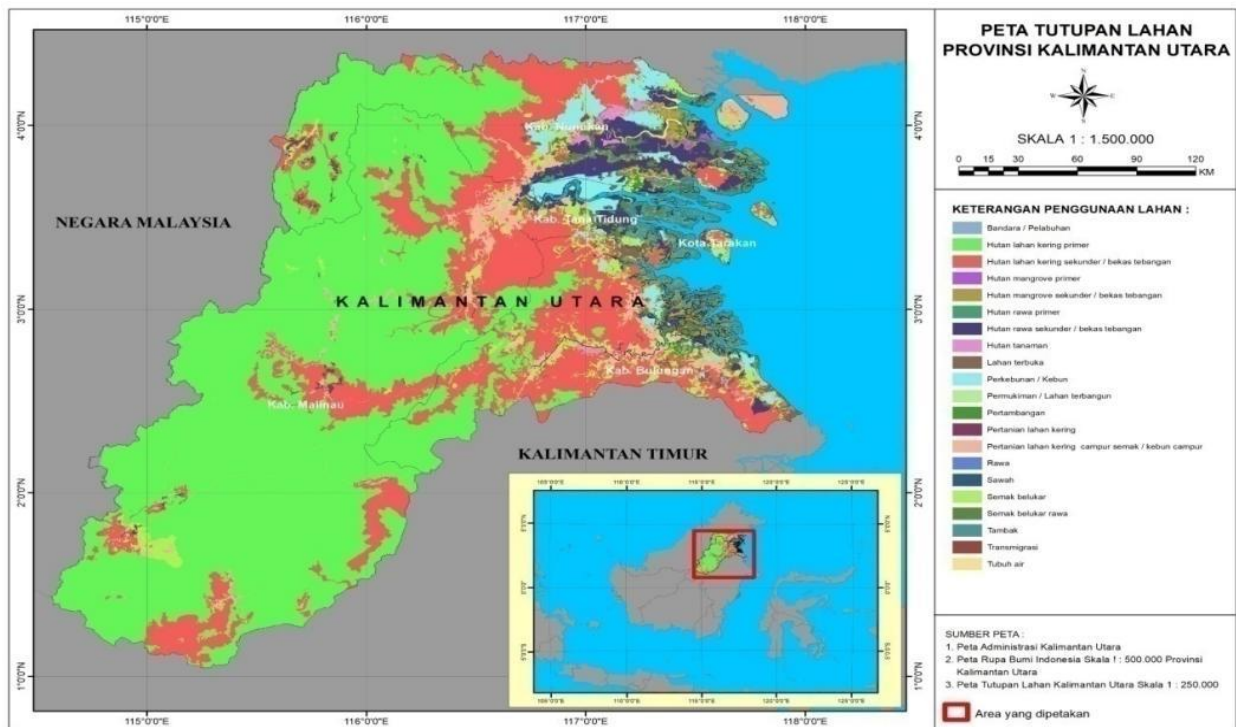


selalu berdampingan dengan bentuk lahan Lembah Struktural Lipatan sebagai hasil proses denudasional batuan sedimen yang menyusunnya. Daerah perbukitan struktural lipatan ini merupakan daerah potensial sebagai daerah resapan air. Selain itu, daerah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, karena kaya akan flora dan fauna. Sebagai contoh adalah jenis Meranti dan Kruing yang banyak ditemukan di wilayah ini.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peta Tutupan Lahan Ekoregion Kalimantan yang dipublikasi oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan tahun 2016, diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Malinau lebih didominasi oleh tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder. Dimana di beberapa lokasi juga ditemui adanya tutupan lahan berupa semak belukar. Di satu sisi, dominasi tutupan lahan Kabupaten Malinau ini mengindikasikan kemampuan yang tinggi kawasan ini sebagai kawasan pengatur air, udara dan iklim serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun di sisi yang lain kondisi tutupan lahan tersebut mencerminkan telah terjadi degradasi dan kerusakan hutan yang dapat berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di wilayah ini.



Gambar 2. 8 Peta Bentuk Lahan Ekoregion Kalimantan
Sumber: Overlay Peta Administrasi, Rupa Bumi Indonesia dan Tutupan Lahan Kaltara (2020)



Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Ekoregion Kalimantan
Sumber: Overlay Peta Administrasi, Rupa Bumi Indonesia Tutupan Lahan Kaltara (2020)



8. Pola Ruang Wilayah Kabupaten

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 1.658.957 Ha yang terdiri dari :

a. kawasan hutan lindung;

Kawasan hutan lindung yang ditetapkan seluas kurang lebih 672.572 Ha, meliputi :

- i. kawasan hutan lindung Pasilan Tabah - Hulu Sungai Sembakung terletak di Kecamatan Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang dengan luas sekitar 153.370 Ha;
- ii. kawasan hutan lindung Long Ketrok terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Mentarang dengan luas sekitar 43.636 Ha;
- iii. kawasan hutan lindung Gunung Laung - Gunung Belayan terletak di Kecamatan Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan dengan luas sekitar 169.000 Ha
- iv. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hilir Sungai Bahau terletak di Kecamatan Pujungan dan Kayan Hilir dengan luas sekitar 34.056 Ha;
- v. kawasan hutan lindung Gunung Kopol - Gunung Jamik terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 32.149 Ha;
- vi. kawasan hutan lindung Kayaniot terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 48.250 Ha;
- vii. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham terletak di Kecamatan Kayan Hilir dan Sungai Boh dengan luas sekitar 65.276 Ha;
- viii. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan terletak di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh dengan luas sekitar 47.282 Ha;



- ix. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean terletak di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan luas sekitar 64.568 Ha;
- 2) kawasan hutan lindung Hulu Sungai Tekwai terletak di Kecamatan Kayan Selatan dengan luas sekitar 14.985 Ha; dan
- 3) kawasan hutan lindung lainnya meliputi :
 - i. kawasan hutan penelitian Lalut Birai di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;
 - ii. kawasan hutan lindung tradisional Tana Ulen di Setulang Kecamatan Malinau Selatan dengan luas kurang lebih 5.300 Ha; dan
 - iii. kawasan hutan penelitian/arboretum KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 225 Ha.
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang berupa resapan air terdiri atas :
 - 1) kawasan hutan Pasilan Tabah – Hulu Sungai Sembakung;
 - 2) kawasan hutan Long Ketrok;
 - 3) kawasan hutan Gunung Laung – Gunung Belayan;
 - 4) kawasan hutan Kayaniot;
 - 5) kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham;
 - 6) kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan; dan g. kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean.
- c. kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan terdiri atas :
 - 1) kawasan sempadan sungai, yang terdapat pada setiap permukiman yang terletak di sepanjang aliran sungai besar maupun sungai kecil di seluruh kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:



- i. 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman;
 - ii. 100 (seratus) meter untuk sungai besar diluar kawasan permukiman; dan
 - iii. jarak sempadan sungai pada kawasan permukiman akan diatur tersendiri dalam rencana rinci kawasan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan
 - 2) kawasan mata air, yang terdapat di Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Long Ampung, Long Berang, Sempayang, Taras, dan Setulang;
 - 3) RTH pada kawasan ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa akan direncanakan sebagai berikut:
 - i. pada kawasan ibukota kabupaten dan disetiap ibukota kecamatan, ruang terbuka hijau akan dipertahankan minimal 30% dari luas kawasan terbangun dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat;
 - ii. kawasan persawahan yang terletak disekitar kawasan ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan akan tetap dipertahankan sebagai RTH dan difungsikan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 - iii. pada kawasan perdesaan RTH akan dipertahankan minimal 40% dari luas kawasan terbangun, dengan komposisi 20% RTH publik dan 20% RTH privat;
 - iv. ketentuan lebih lanjut kawasan RTH akan diatur tersendiri yang perencanaannya diintegrasikan dengan rencana jaringan prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan.
- d. Kawasan Suaka Alam, Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan berada di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang



yang terdapat di Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 986.385 Ha dan terletak membentang dari Kecamatan Mentarang Hulu, kecamatan Mentarang, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Kayan Hilir. Sedangkan dalam pengelolaan taman nasional kayan mentarang meliputi :

- 1) perencanaan kawasan, batas dan zonasi;
- 2) pengelolaan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya;
- 3) pemanfaatan TNKM;
- 4) penelitian dan pengembangan;
- 5) perlindungan dan pengelolaan sumber daya TNKM;
- 6) pengembangan kelembagaan;
- 7) koordinasi;
- 8) pengembangan sarana dan infrastruktur;
- 9) pengembangan peran serta masyarakat;
- 10) monitoring dan evaluasi; dan
- 11) pendanaan.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Dalam dokumen RTRW kabupaten malinau Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan. kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi, kawasan yang terletak disepanjang aliran Sungai yang rawan terhadap longsornya tebing sungai, meliputi: Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau Hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Long Pujungan dan Long Nawang. Sedangkan kawasan disekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi: Data Dian, Long Berang, Sempayang dan Long Loreh, kemudian kawasan rawan bencana banjir meliputi permukiman di sepanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan Sungai Pujungan dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan



meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktifitas budi daya masyarakat dan atau pembalakan hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada kawasan hutan, yang terdapat di:

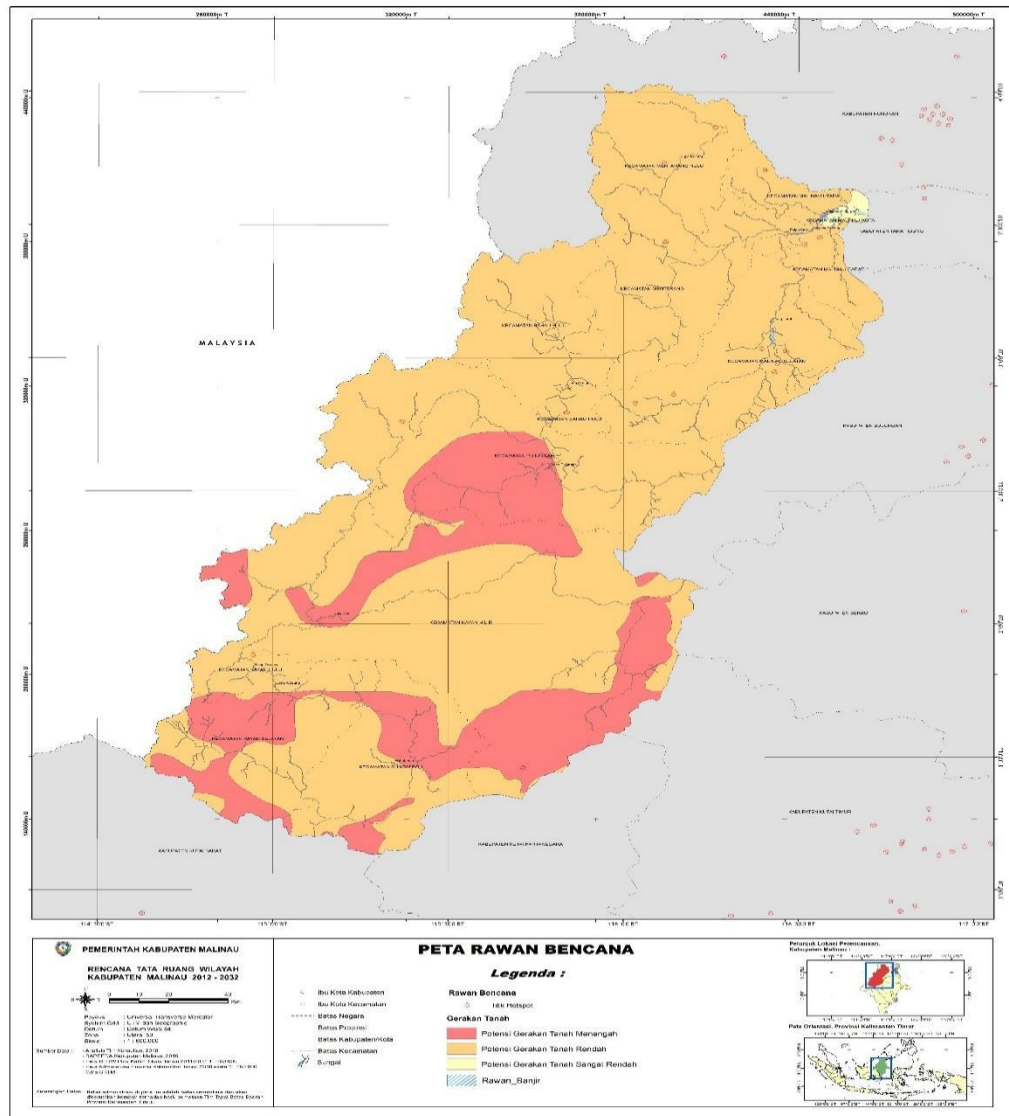
- 1) Kecamatan Malinau Kota;
- 2) Kecamatan Malinau Barat;
- 3) Kecamatan Malinau Utara;
- 4) Kecamatan Malinau Selatan;
- 5) Kecamatan Mentarang;
- 6) Kecamatan Pujungan;
- 7) Kecamatan Kayan Hulu;
- 8) Kecamatan Kayan Hilir;
- 9) Kecamatan Kayan Selatan;

Kabupaten Malinau mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dengan level sedang. Hal ini dapat di sajikan dalam tabel di bawah ini.

Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2017-2020

NO	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1.	Malinau	124,40	124,40	124,40	124,40	SEDANG

Sumber : RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026



Gambar 2. 10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Malinau

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

2) Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya merupakan ruang wilayah kabupaten di luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas (a) Kawasan Budi daya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha dan (b) Kawasan Budi daya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha. Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi (a) kawasan peruntukan hutan produksi, (b) kawasan peruntukan hutan rakyat, (c) kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan, (d) kawasan peruntukan perikanan, (e) kawasan peruntukan sumber daya air, (f) kawasan peruntukan pertambangan, (g)



kawasan peruntukan permukiman, (h) kawasan peruntukan industri, (I) kawasan peruntukan pariwisata, dan (j) kawasan peruntukan lain. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas (a) Hutan Produksi Tetap (HP), (b) Hutan Produksi Terbatas (HPT), (c) Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK). Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 367.368 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir. Hutan Produksi Terbatas luas kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan berhutan diluar kawasan budi daya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat.

Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan maupun kolektif, yang struktur dan komposisi hutannya dapat berasal dari hutan alam yang dipertahankan keberadaannya, tanaman penghijauan atau reboisasi, tanaman buah-buahan lokal maupun hutan campuran. Kawasan hutan rakyat terdapat diseluruh wilayah perdesaan dengan pola sebaran berpencar disekitar kawasan budi daya pertanian maupun permukiman masyarakat. Kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat diatur menurut peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budidaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi (a) kawasan pertanian tanaman pangan, (b) kawasan pertanian



hortikultura dan palawija, (c) kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas (a) kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dan (b) kawasan peruntukan lahan cadangan. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan meliputi kawasan persawahan beririgasi maupun belum beririgasi dan kawasan lainnya yang terletak didalam kawasan pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan program pengembangan pangan lainnya. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dikembangkan di Kaliamok, Respen Tubu, Lubak Manis, Putat, Malinau Seberang/Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Kemenci, Mentarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Sempayang Seberang, Long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Kawasan peruntukan lahan cadangan adalah kawasan pertanian lahan kering yang diperuntukan sebagai pencadangan lahan pertanian dan termasuk didalamnya adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.334 Ha. Kawasan pertanian hortikultura dan palawija terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara tersebar dalam skala kecil dengan jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan dengan luas kurang lebih 500 Ha. Kawasan perkebunan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama: kopi, kakao, sawit, dan karet dengan luas kurang lebih 301.355 Ha.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi (a) kawasan pertanian tanaman pangan, (b) kawasan pertanian hortikultura dan palawija, (c) kawasan perkebunan; dan d.



kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas (a) kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dan (b) kawasan peruntukan lahan cadangan. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan meliputi kawasan persawahan beririgasi maupun belum beririgasi dan kawasan lainnya yang terletak didalam kawasan pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan program pengembangan pangan lainnya. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dikembangkan di Kaliamok, Respen Tubu, Lubak Manis, Putat, Malinau Seberang/Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Kemenci, Mentarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Sempayang Seberang, Long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Kawasan peruntukan lahan cadangan adalah kawasan pertanian lahan kering yang diperuntukan sebagai pencadangan lahan pertanian dan termasuk didalamnya adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.334 Ha. Kawasan pertanian hortikultura dan palawija terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara tersebar dalam skala kecil dengan jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan dengan luas kurang lebih 500 Ha. Kawasan perkebunan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama: kopi, kakau, sawit, dan karet dengan luas kurang lebih 301.355 Ha

2. Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas (a) perikanan tangkap, (b) budi daya perikanan dan (c) pengolahan ikan. Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan



umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau. Budi daya perikanan terdiri atas (a) kawasan budi daya perikanan darat (kolam), yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang, (b) pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kalamok Kecamatan Malinau Utara, (c) pengembangan kawasan minapolitan di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha, (d) pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, dan Lidung Kemenci di Kecamatan Mentarang, (e) penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha, Pengolahan ikan diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.

3. Kehutanan

Kawasan budi daya merupakan ruang wilayah kabupaten di luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas (a) Kawasan Budi daya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha dan (b) Kawasan Budi daya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha. Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi (a) kawasan peruntukan hutan produksi, (b) kawasan peruntukan hutan rakyat, (c) kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan, (d) kawasan peruntukan perikanan, (e) kawasan peruntukan sumber daya air, (f) kawasan peruntukan pertambangan, (g) kawasan peruntukan permukiman, (h) kawasan peruntukan industri, (I) kawasan peruntukan pariwisata, dan (j) kawasan peruntukan lain. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri



atas (a) Hutan Produksi Tetap (HP), (b) Hutan Produksi Terbatas (HPT), (c) Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK). Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 367.368 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir. Hutan Produksi Terbatas luas kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan berhutan diluar kawasan budi daya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan maupun kolektif, yang struktur dan komposisi hutannya dapat berasal dari hutan alam yang dipertahankan keberadaannya, tanaman penghijauan atau reboisasi, tanaman buah-buahan lokal maupun hutan campuran. Kawasan hutan rakyat terdapat diseluruh wilayah perdesaan dengan pola sebaran berpencar disekitar kawasan budi daya pertanian maupun permukiman masyarakat. Kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat diatur menurut peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budidaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

4. Energi dan Pertambangan

Kawasan peruntukan sumber daya air adalah kawasan perairan umum yang meliputi sungai besar dan sungai kecil



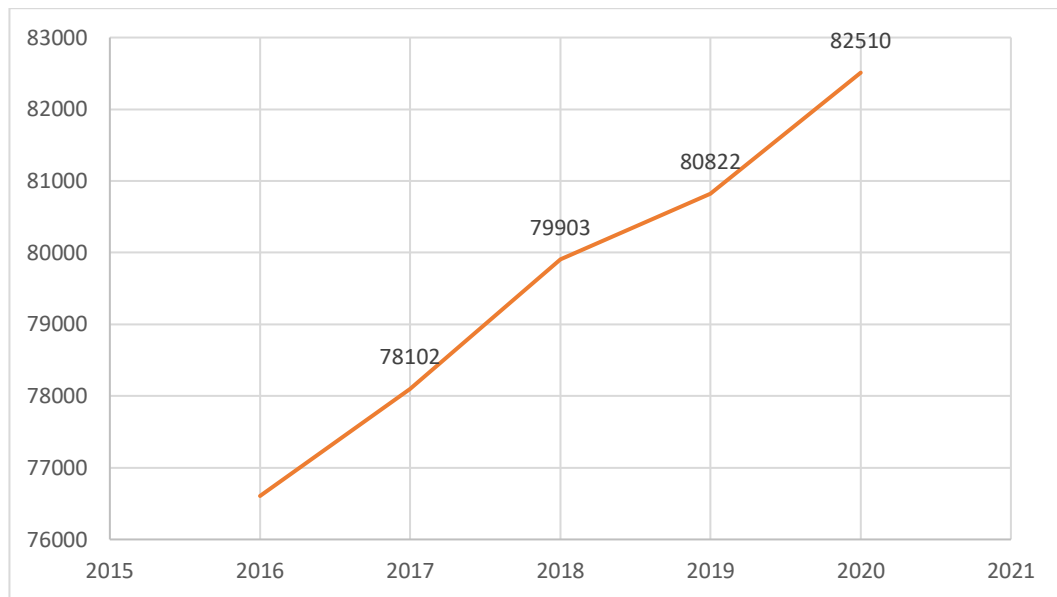
yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 12.595 Ha. Rencana pengelolaan sumber daya air meliputi (a) pemanfaatan sumber daya air berupa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan sumber air baku, transportasi sungai, pembangkit listrik dan keperluan pertanian serta perikanan dan (b) perlindungan DAS serta pengendalian kegiatan budidaya atau aktifitas masyarakat yang beresiko menurunkan kualitas air sungai. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas (a) kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas dan (b) kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C. Kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas terdapat di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan luas kurang lebih 51.991 Ha. Kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C meliputi (a) pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 29.143 Ha. (b) pertambangan bahan galian C adalah pertambangan skala kecil dengan bahan galian berupa sirtu, batu gunung, batu padas, tanah liat dan bahan urugan lainnya yang lokasinya terdapat diseluruh wilayah kabupaten.

2.1.3. Demografi

Selain dipengaruhi oleh perpindahan penduduk yang masuk (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar), pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Malinau merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 76.606 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Malinau menjadi 82.510 jiwa. Berdasarkan data penduduk, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten



Malinau per tahun adalah sebesar 1,87 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau ini lebih tinggi berada di atas pertumbuhan penduduk Indonesia yang sejak tahun 2010 hanya kurang dari 2%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau ini juga masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Utara yang hanya 2,86 persen di tahun 2020.



Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2020), BPS Kabupaten Malinau 2020

Gambar 2. 11 Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Malinau Tahun 2017 – 2020

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Malinau didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun. Dimana jumlah penduduk dari kelompok umur 15-64 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berkisar antara 64%, dengan kecenderungan selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara penduduk dengan kelompok umur lebih dari 65 tahun tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang berarti (cenderung tetap 3%). Sedangkan penduduk dengan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun angka peningkatannya tidak signifikan. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Malinau untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, tentu harus diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan



masyarakat. Namun di sisi lain, banyaknya jumlah penduduk pada kelompok umur produktif tersebut menjadi beban dalam hal angkatan kerja, karena jika lapangan pekerjaan tidak tersedia bagi mereka maka yang terjadi kemudian adalah tingginya tingkat pengangguran.

Tabel 2. 4
Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020
Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 – 14	27.550	33	28.615	33	29.712	33	22.545	27
15 – 64	53.803	64	55.883	64	58.038	64	56.546	69
65 +	2.435	3	2.534	3	2.632	3	3.419	4
Jumlah	83.788	100	87.032	100	90.382	100	82.510	100

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari rasio jenis kelamin yang nilainya lebih dari 100 sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Namun demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Malinau telah melampaui standar biologis perbandingan jenis kelamin yakni sebanyak 116-117 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Patut menjadi perhatian di masa mendatang bahwa rasio jenis kelamin yang tinggi, karena beberapa studi sering mengetengahkan bahwa jumlah pria yang lebih banyak di suatu negara dapat memberikan ancaman terhadap keamanan, terutama terkait dengan konflik sosial. Tetapi di Kabupaten Malinau konflik tersebut tidak terjadi, karena yang tidakseimbangan jenis kelamin antara jumlah laki-laki dan perempuan penduduk Malinau tersebut lebih disebabkan oleh adanya tenaga kerja pendatang yang bekerja di berbagai perusahaan yang ada di wilayah ini, sehingga sifatnya menjadi sangat produktif.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	83.788	87.032	90.382	82510
- Laki-laki	45.178	46.902	48.727	44053
- Perempuan	38.610	40.130	41.655	38457
Rasio Jenis Kelamin	117	117	117	115
Kepadatan penduduk (jw/km ²)	2,09	2,17	2,25	2,06

Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2021)

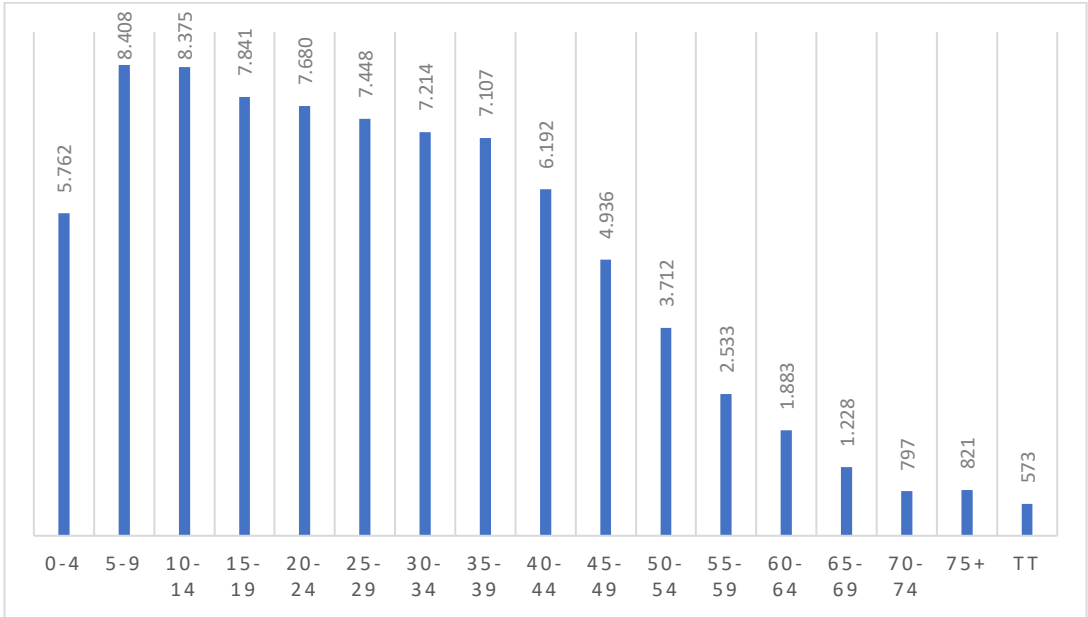


Kepadatan penduduk Kabupaten Malinau masih sangat rendah karena baru mencapai 2 jiwa/km². Namun demikian, dari tahun ke tahun kepadatan penduduk di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan. Dalam hal ini terutama yang harus diperhatikan adalah kepadatan penduduk pada ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan yang cenderung lebih pada dibanding dengan penduduk di wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terpencil yang sangat jarang.

Tabel 2. 6
Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau. 2010 dan 2020

Kode	Kecamatan	Penduduk	Sebaran penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020
			2010	2020	
10	Sungai Boh	2.148	2.357	2,90%	0,9
20	Kayan Selatan	1.711	1.982	2,40%	1,43
30	Kayan Hulu	2.535	2.432	2,90%	-0,4
40	Kayan Hilir	1.352	1.484	1,80%	0,91
50	Pujungan	1.800	1.750	2,10%	-0,27
60	Bahau Hilir	1.460	1.406	1,70%	-0,36
70	Sungai Tubu	0	875	1,10%	0
80	Malinau Selatan Hulu	0	2.452	3,00%	0
90	Malinau Selatan	7.999	5.479	6,60%	-3,6
100	Malinau Selatan Hilir	0	2.872	3,50%	0
110	Mentarang	5.291	5.909	7,20%	1,07
120	Mentarang Hulu	756	971	1,20%	2,45
130	Malinau Utara	10.124	14.671	17,80%	3,66
140	Malinau Barat	8.157	11.245	13,60%	3,16
150	Malinau Kota	19.247	26.625	32,30%	3,19
	Malinau	62.580	82.510	100%	2,71

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021



Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2020), BPS Kabupaten Malinau 2020



Gambar 2. 12 **Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) menurut Kelompok Umur Kabupaten Malinau Tahun 2020**

Berdasarkan gambar diatas jumlah penduduk, menurut kelompok umur tertinggi pada umur 5 sampai 9 tahun. Namun rata-rata penduduk di Kabupaten Malinau adalah penduduk dengan usia produktif yang memiliki rentang umur 5 sampai 54 tahun.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Nilai IPM ini juga dapat mencerminkan perwujudan pembangunan manusia yang baik, dimana ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Selain itu, IPM menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah dan merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan data yang ada, IPM Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana nilai IPM 71,23 pada tahun 2017 dan 71,94 pada tahun 2020 (Lihat Tabel 2.7), yang berarti berada pada level tinggi. Kondisi ini tentu merupakan indikasi positif bagi kinerja pembangunan di Kabupaten Malinau. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Malinau masih berada pada nilai batas bawah pada kisaran level IPM tinggi (nilai IPM tinggi = $70 \leq \text{IPM} < 80$), oleh karenanya IPM Kabupaten Malinau masih harus ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat Malinau ditinjau berdasarkan kemampuannya memperoleh pendapatan, pendidikan dan kesehatan semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPG



adalah angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan perkiraan pendapatan. Seluruhnya dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Jika indeks semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Indeks dapat melebihi 100 apabila capaian perempuan lebih tinggi dibanding capaian laki-laki. Berikut adalah Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Malinau.

Tabel 2. 7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
IPM	71,23	71,74	72,06	71,94
IPG	81,02	81,53	81,71	81,36

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.2. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi tujuan utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini (koefisien gini) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/ kategori, indeks gini lebih dari 0,5 termasuk ke dalam kategori “ketimpangan tinggi”, indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori “ketimpangan sedang” dan indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori “ketimpangan rendah”.

Indeks Gini Kabupaten Malinau pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang dilihat berdasarkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara adalah cenderung turun yakni dengan nilai indeks lebih dari 0,3 yang berarti termasuk dalam kategori “ketimpangan sedang”, kecuali Indeks Gini tahun 2019 yang



menurun menjadi 0,295 yang berarti menjadi kabupaten dengan tingkat “ketimpangan rendah” (Lihat Tabel 2.8). Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Malinau saat ini termasuk dalam kategori rendah, namun nilai indeks gininya masih berada di batas terbawah ketimpangan rendah (selisih 0,005 dengan nilai ketimpangan sedang). Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut semakin dapat diturunkan.

Tabel 2. 8
Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,311	0,304	0,295	0,289

Sumbe : BPS Provinsi Kaltara (2021)

2.2.3. Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau cenderung fluktuatif. Persentase dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal yang menggembirakan adalah bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau berada di bawah persentase penduduk miskin nasional (9,82% pada tahun 2018 dan 9,22% sampai bulan September 2019). Namun, jumlah penduduk miskin sebanyak lebih dari 6.000 jiwa yang ada di Kabupaten Malinau adalah penting untuk menjadi perhatian, karena penduduk miskin merupakan persoalan sosial yang tersendiri yang keberadaannya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam hal ini kondisi keterisolasian merupakan penyebab yang patut menjadi perhatian khusus di Kabupaten Malinau.

Tabel 2. 9
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun
--------	-------



	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,68	6,96	6,63
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,69	6,63	6,23	6,16

Sumber : BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.4. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa TPAK Kabupaten Malinau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, yakni 66,44 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Malinau terdapat 75 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi hanya 66 penduduk penduduk per 100 penduduk. Dengan demikian TPAK Kabupaten Malinau masih cenderung fluktuatif.

Tabel 2. 10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau
Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
TPAK (%)	71,88	75,29	68,86	66,44

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.5. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malinau memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pesentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau berada di bawah tingkat pengangguran terbuka tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini membuktikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menciptakan lapangan kerja



dan lapangan usaha. Namun persoalan pengangguran tetap harus diperhatikan karena persoalan ini merupakan persoalan sosial yang memiliki kepekaan tinggi.

Tabel 2. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,01	4,28	4,13	5,08

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau merupakan salah satu gambaran kinerja perekonomian daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau cukup berfluktuatif, dimana tahun 2020 merupakan tahun dengan pertumbuhan yang terendah (-0,62%), tahun 2017 mengalami kenaikan (5,99%), 2018 kembali mengalami penurunan (5,74%) dan naik (6,34%) di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau di tahun 2019 ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (6,91%). Kondisi tidak stabilnya atau berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau ini harus menjadi perhatian di masa mendatang dikarenakan masih pandemik Covid-19.

Tabel 2. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,99	5,74	6,34	-0,62

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.7. PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja ekonomi Kabupaten Malinau dapat juga diukur dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita, dimana PDRB per kapita diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk Kabupaten Malinau. Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan berdasarkan aktifitas produksi barang/jasa, nilai PDRB perkapita khususnya



dapat menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB perkapita Kabupaten Malinau tahun 2017–2020 cenderung mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.13 dan 2.14), dan PDRB perkapita Malinau berada jauh di atas PDRB perkapita nasional (Rp 59,1 juta tahun 2019). Hal berarti bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau secara rata-rata dilihat dari sisi pendapatannya.

Tabel 2. 13
Perkembangan PDRB Kabupaten Malinau (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,62	1.076,08	1.170,12	1276,93
Pertambangan dan Penggalian	4.151,54	4.618,15	5.332,72	5406,99
Industri Pengolahan	243,39	259,02	275,89	287,07
Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,87	4,48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54
Konstruksi	1.317,04	1.462,40	1.714,23	1925,3
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	341,69	386,47	444,15	492,03
Transportasi dan Pergudangan	260,46	300,68	336,93	346,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,02	171,92	195	204,17
Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,95	40,46
Jasa Keuangan	18,39	21,07	22,82	24,57
Real Estate	19,86	22,19	24,67	26,19
Jasa Perusahaan	13,31	14,31	15,94	17,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,1	696,92	712,51
Jasa Pendidikan	196,46	216	238,13	257,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,39	120,63	135,65	159,03
Jasa Lainnya	5,9	6,7	7,55	8,96
PDRB Malinau	8.496,97	9.364,80	10.656,71	11.198,02

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

Tabel 2. 14



Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita (Rp) *)	101.410.345,20	107.555.726,60	117.789.604,10	135.720.000,00

Keterangan: *) Dihitung berdasarkan PDRB (Tabel 2.13) dan Jumlah Penduduk (Gambar 2.4)

2.2.8. Laju Inflasi

Merujuk pada inflasi Kota Tarakan karena Kabupaten Malinau belum melaksanakan perhitungan inflasi maka laju inflasi di Kabupaten Malinau menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Malinau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, laju inflasi Kabupaten Malinau sebesar 5,00 persen, sedangkan tingkat inflasi Kabupaten Malinau pada tahun 2019 sebesar 1,47 persen (Lihat Tabel 2.15). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa inflasi di Kabupaten Malinau tergolong inflasi ringan karena laju inflasi dan tingkat inflasi di bawah 10%. Inflasi di Kabupaten Malinau lebih cenderung disebabkan oleh sumber-sumber domestik seperti meningkatnya harga barang dan jasa permintaan masyarakat yang tinggi, suplai yang terkadang mengalami gangguan/ terbatas dan biaya produksi yang mengalami kenaikan.

Tabel 2. 15
Laju Inflasi Kabupaten Malinau 2018-2019 Berdasarkan Laju Inflasi Kota Tarakan

Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2020									
Bulan	Tahun								
	2018			2019			2020		
	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
Januari	0,49	0,49	2,57	0,96	0,96	5,49	-0,07	-0,07	0,01
Februari	0,09	0,58	2,62	-0,03	0,94	5,38	-0,25	-0,33	0,00
Maret	-0,03	0,55	2,18	-0,63	0,3	4,74	-0,46	-0,79	-0,46
April	0,29	0,84	2,2	0,6	0,9	5,06	0,2	-0,59	0,13
Mei	0,5	1,35	2,2	0,77	1,67	5,33	-0,27	-0,86	-0,10
Juni	2,71	4,1	3,02	0,53	2,21	3,1	0,99	0,13	0,88
Juli	-1,4	2,64	1,87	-0,64	1,56	3,89	0,24	0,37	0,13
Agustus	0,62	3,28	3,33	-0,92	0,62	2,3	0,35	0,72	0,17
September	-0,73	2,53	2,82	-0,57	0,05	2,46	0,63	1,36	0,54
Oktober	0,03	2,56	3,27	-0,3	-0,25	2,12	-0,28	1,07	-0,21
November	0,76	3,35	4,25	0,63	0,37	1,98	-0,05	1,02	0,09
Desember	1,6	5	5	1,09	1,47	1,47	0,13	1,15	0,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2021, BPS Kabupaten Malinau 2020



2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan hal penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai tersebut bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Dalam menilai dan mengevaluasi peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat menggunakan berbagai kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Indikator kinerja bidang pendidikan tersebut antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data APS pendidikan Kabupaten Malinau diketahui kecenderungan APS yang sifatnya fluktuatif. Demikian halnya dengan APK dan APM.

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dimana, semakin tinggi APS semakin tinggi pula penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Malinau masih ditemukan penduduk usia sekolah yang tidak berkesempatan mengenyam



pendidikan, baik pada pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan terlebih pada tingkat menengah atas (Lihat Tabel 2.16).

Selanjutnya, APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengeyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, dimana APK ini merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Oleh karena persentasenya dapat mencapai lebih dari 100%, maka didalamnya terdapat penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, walaupun usianya telah melebihi. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Malinau, dimana terdapat 4 – 7% penduduk yang tidak berusia antara 7 – 12 th yang bersekolah di Sekolah Dasar dan terdapat 2 – 4% penduduk yang tidak berusia 13 – 15 th yang bersekolah di Sekolah Menengah (Lihat Tabel 2.16).

Sementara itu, APM merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Malinau masih terdapat penduduk yang tidak sekolah secara tepat waktu, dengan kecenderungan semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah nilai APM-nya. Hal ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Malinau cenderung semakin tidak tepat waktu sekolahnya pada jenjang sekolah yang semakin tinggi (Lihat Tabel 2.16).

Selain yang telah dikemukakan di atas, mengingat Kabupaten Malinau adalah Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan, maka pendidikan di wilayah perbatasan yang cenderung masih tertinggal merupakan permasalahan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Hal ini sangat terkait dengan upaya melakukan pemerataan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM unggul daerah.



Tabel 2. 16
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten
Malinau Tahun 2017-2020

No	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1)	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	PAUD				57,58
	SD/MI/sedrajat (%)	108,55	108,59	110,13	108,31
	SMP/MTs/sederajat (%)	93,42	95,25	100,02	102
	SMA/SMK/MA (%)	86,5	88,49	94,39	95,63
2)	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	SD/MI/sedrajat (%)	92,62	91,05	87,14	94,26
	SMP/MTs/sederajat (%)	80,33	81,13	71,37	72,8
	SMA/SMK/MA (%)	65,46	67,24	n.a	66,73
3)	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,47	98,81	99,8	88,52
	SMP/MTs ke	94,61	95,85	115,92	71,72
	SMA/SMK/MA (%)	81,52	81,05	80,78	385
4)	Angka Siswa Putus Sekolah				
	SD/MI/sedrajat (%)	33	7	9	0,42
	SMP/MTs/sederajat (%)	3	16	11	2,43
	SMA/SMK/MA (org)	17	13	13	0
5)	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah				
	SD/MI/sedrajat (%)	95,52	95,98	100,85	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	95,52	95,98	100,85	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	56,55	52,81	53,46	n.a
6)	Rasio Guru/Murid				
	SD/MI/sedrajat (%)	10,08	9,53	9,73	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	10,08	9,53	9,73	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	10	9,83	9,39	n.a
7)	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	n.a	14.28	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	n.a	24.26	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	n.a	n.a	n.a	n.a
8)	Rasio Guru Per Sekolah				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	10	9.76	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	13,12	121,29	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	n.a	16,3	19,17	n.a
9)	Angka Kelulusan (AL)				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	n.a	88.91	102,32
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	n.a	85.82	102,34
	SMA/SMK/MA (%)	100	100	93,73	0

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka (2019), Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau (2020), Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan hal



penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi prioritas pembangunan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Malinau. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah, murah, adil dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Malinau, lebih menekankan kepada upaya preventif dan promotive tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 17
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten
Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan	89	82	81	80,3
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,2	93	93	91,6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	97,1	90	100
Cakupan bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,6	83	83	79,8
AKI per 100.000 Kelahiran hidup	251	0	124	62,5
AKB per 1000 Kelahiran Hidup	18	11	16,8	11,3
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	45	83	63,6	57,1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80	92	79	41,1
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	66	74,3	75,2	62,40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	78,9	55,8	32,2	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	53	81	70,1	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	16,3	32,8	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100



INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	80,4	100	65	58,3
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV	60	65	70	19,77
Prevalensi HIV/AIDS	0,03	0,04	0,06	0,3
Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100	103,5	100	n.a
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	31,3	62,5	62,5	n.a
Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	14,4	14	20	n.a
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	85	92,4	97	n.a
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	31,3	62,5	90	n.a
Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	29	56	94	n.a
Prevalensi peserta KB aktif	54,2	10	28,9	n.a
Rasio PLKB/PKB di desa	0	11	11	n.a
Prevelensi Stunting	27	24,6	31,01	14,47
Jumlah puskesmas	14	16	16	16
Jumlah rumah sakit	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau (2020)

Berdasarkan Tabel 2.17 dapat diketahui bahwa dari berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan bidang kesehatan, layanan kesehatan di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian bukan berarti tidak terdapat kekurangan, sebagai contoh adalah masih ditemukannya kasus gizi buruk, kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian dalam kelahiran. Ini menjadi hal yang patut diperhatikan di masa mendatang. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia dua tahun. Kementerian Kesehatan RI menyebut stunting adalah anak balita



dengan nilai z-skor untuk kategori tinggi badan per umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting di Kabupaten Malinau dapat disajikan di tabel dibawah ini.

Tabel 2. 18
Data Stunting Per Puskesmas Kabupaten Malinau Tahun 2020

No	Kecamatan	Uraian			
		Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita Status Pendek Dan Sangat Pendek	Persentase Stunting (%)
1	Mentarang Hulu	Long Berang	122	1	0,82
2	Mentarang	Pulau Sapi	240	49	20,42
3	Bahau Hulu	Long Alango	135	16	11,85
4	Pujungan	Pujungan	211	35	16,59
5	Kayan Hulu	Long Nawang	158	20	12,66
6	Kayan Selatan	Long Ampung	216	54	25
7	Sungai Boh	Sungai Boh	221	8	3,62
8	Kayan Hilir	Data Dian	56	7	12,5
		Long Sule	76	9	11,84
9	Malinau Selatan Hulu	Metut	210	55	26,19
10	Malinau Selatan	Loreh	364	73	20,05
11	Malinau Selatan Hilir	Setulang	138	31	22,46
		Sehati	223	45	20,18
12	Malinau Barat	Tanjung Lapang	221	19	8,6
		Sesua	276	23	8,33
13	Malinau Kota	Malinau Kota	1588	207	13,04
14	Malinau Utara	Malinau Seberang	454	39	8,59

Sumber : Tim Stunting Malinau 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah, karena jaringan infrastruktur yang baik dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari antar daerah/wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah, tak terkecuali untuk Kabupaten Malinau. Kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Malinau, khususnya dalam pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) dapat dilihat dari capaian kinerja berbagai di bidang pekerjaan umum dan



penataan ruang. Dari berbagai indikator tersebut, capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang cenderung mengalami penurunan (Lihat Tabel 2.19). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur di wilayah ini masih belum memadai dan masih harus terus ditingkatkan. Perkembangan RTRW dan RDTR dalam proses menyelesaikan perda RTRW dan RDTR.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan Tempat Pembuangan Sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun telah berhasil meningkatkan persentase rumah layak huni di Kabupaten Malinau, yakni 87,23% pada tahun 2017 dan tahun 94,15% pada tahun 2018 serta 92,44% pada tahun 2019 (Lihat Tabel 2.19). Namun demikian bukan berarti permasalahan permukiman kumuh di wilayah ini telah terselesaikan secara tuntas.

Tabel 2. 19
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	99,75	49,82	49,68	7,60
Persentase panjang jalan kabupaten yang di rehabilitasi/direkontruksi	1,45	0,62	4,24	n.a
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws kewenangan kabupaten	10,23	10,23	10,23	5 km
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	46,77	64,26	70,45	0,57



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	n.a	n.a	9,99	80
Persentase tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	n.a	52,94	52,94	n.a
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	n.a	n.a	0	n.a
Rumah tangga bersanitasi	73,65	76,8	73,03	73,03
Rumah tangga pengguna air bersih	89,17	54,58	90,79	n.a
Kawasan kumuh	0,04	0,17	0,05	0,21
Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	30	5,58	5,58	n.a
Rumah layak huni	87,23	94,15	92,44	n.a
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,91	41,33	42,75	47,7

Sumber : Dinas PUPR dan PERKIM Kabupaten Malinau (2020)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Seluruh aktifitas pembangunan di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, dan politik yang stabil di daerah, karenastabilitas keamanan dan politik akan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Berdasarkan indikator capaian kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.20 dapat diketahui bahwa jaminan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Tabel 2. 20
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	100	100	n.a
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan	60	80	80	n.a



Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
ketentraman masyarakat				
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	1,23	1,23	1,23	n.a
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	14,71	14,71	14,71	n.a
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	100	100	100	n.a
Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	51,85	50,91	52,73	n.a
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter	42,86	42,86	42,86	n.a

Sumber : Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Malinau (2020)

6. Sosial

Pemasalahan sosial yang meliputi: (1) anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu; (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (3) penyandang cacat dan trauma; (4) kelembagaan sosial yang diberdayakan; dan (5) Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sangat menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang harus diselesaikan. Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran sertapotensi sumber daya kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21. Berdasarkan data pada Tabel 2.21 dapat diketahui bahwa masih ditemukan adanya permasalahan fakir miskin, KAT dan PMKS.

Tabel 2. 21
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu yang mendapatkan perlindungan (berupa bantuan transport kembali ke daerah asal)	0	0	0	n.a



Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan yang diberikan bantuan	n.a	20	0	n.a
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberdayakan	n.a	1	0	n.a
Jumlah kelembagaan yang diberdayakan	1	1	1	n.a
Jumlah Fakir Miskin	-	-	32.479	n.a
Jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil)	73	73	85	n.a
PMKS		617	617	n.a

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malinau (2020)

2.3.2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. **Tenaga Kerja**

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Malinau harus disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja tersebut. Jika terjadi keterbatasan lapangan pekerjaan, maka sebagai akibatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau semakin meningkat pula. Berdasarkan data statistik Kabupaten Malinau, Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, cenderung mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau cukup berfluktuatif. Upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, misalnya dengan melakukan upaya-upaya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal dan meningkatkan potensi dan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif dan kompetitif melalui pendidikan dan pelatihanketerampilan. Namun demikian tingkat pengangguran di wilayah ini belum dapat dituntaskan (Lihat Tabel 2.22), sehingga masih dibutuhkan upaya lanjutan di masa mendatang.

Tabel 2. 22
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

INDIKATOR KINERJA		TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk 15 Th + (ribu jiwa)		57.816	59.958	63.156	62.162
-	Angkatan Kerja	71,88	75,29	68,86	66,44



INDIKATOR KINERJA		TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
-	Bukan Angkatan Kerja	28,12	24,71	31,14	33,56
TPAK (%)		71,88	75,29	68,86	66,44
-	Laki-Laki	84,98	87,83	83,15	81,69
-	Perempuan	55,56	59,36	51,2	48,17
Tingkat Kesempatan kerja %		93,99	95,72	95,87	94,92
Tingkat Pengangguran terbuka %		6,01	4,28	4,13	5,08

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau (2020), Kabupaten Malinau dalam Angka 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih diarahkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah umumnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan. Sedangkan hak-hak anak diwujudkan melalui perlindungan anak. Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Sesuai dengan uraian di atas, capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23. Tabel 2.23 menunjukkan masih adanya permasalahan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Disamping itu masih ditemukan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan.



Tabel 2. 23
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	9,99	10,07	10,06	n.a
Rasio KDRT (%)	0,002	0,005	0,005	n.a
Persentase angkatan kerja perempuan (%)	72,91	73,78	74,9	n.a
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus selesai)	18	14	9	n.a

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau (2020)

3. Ketahanan Pangan

Urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Malinau, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, juga berfokus pada pelaksanaan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, minyak, telur, ikan, kacang-kacangan, gula dan sayuran. Ketersediaan pangan utama tersebut dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.24). Namun demikian, ketersediaan pangan utama tersebut masih berada di bawah perkembangan konsumsi pangan utama secara nasional (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2019). Oleh karenanya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Malinau masih harus terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Tabel 2. 24
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Ketersediaan Tiap Tahun (kg/kapita/th)			
	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	20,91	21,33	21,75	n.a
Umbi-umbian	2,24	2,29	2,33	n.a
Pangan hewani	13,57	13,84	14,11	n.a
Minyak dan lemak	3,06	3,12	3,18	n.a
Buah/biji berminyak	0,61	0,62	0,64	n.a
Kacang-kacangan	9,89	10,09	10,29	n.a
Gula	2,24	2,29	2,33	n.a
Sayuran dan buah	19,38	19,77	20,16	n.a

Sumber : BPS Kabupaten Malinau (2020)



4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perusahaan swasta harus dilaksanakan dengan bijaksana, agar daya dukung lingkungan hidup tetap terjaga dan tercipta iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat meliputi pelaksanaan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah diterbitkan izin lingkungan, penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air serta ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah, yang perkembangannya di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Tabel 2.25. Berdasarkan data pada tabel 2.25 dapat dinyatakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup masih sangat minim, jika dilihat dari upaya penghijauan wilayah pada wilayah lahan longsor. Sesuai dengan Surat Edaran No 4 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka untuk urusan lingkungan hidup wajib menyampaikan data capaian indeks lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas air laut.

Tabel 2. 25
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,343	0,33	0,317	n.a
Cakupan Pelaksanaan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah diterbitkan/dikeluarkan izin lingkungan	4	3	3	n.a



INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan longsor dan Sumber Daya Air (ha)	n.a	100	170,9	n.a
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	n.a	n.a	n.a	n.a
Penanganan Limbah B3	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Lingkungan Hidup	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Kualitas Air	n.a	n.a	n.a	50
Indeks Kualitas Udara	n.a	n.a	n.a	94
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	n.a	n.a	n.a	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau (2020), Kementerian Lingkungan Hidup (2021)

Secara umum Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB, hal ini didasarkan pada capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang tersedia menunjukkan indikator TPB di Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional telah mencapai 33 % atau sebanyak 32 indikator dari total 98 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Malinau. Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional mencapai 11 % atau sebanyak 11 indikator. Sementara untuk Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 1 indikator. Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang belum/ tidak memiliki data sebanyak 55 % atau sebanyak 54 indikator. Capaian indikator TPB Kabupaten Malinau terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel 2.26.

Tabel 2. 26
Capaian Indikator TPB Kabupaten Malinau Terhadap Target Nasional

NO	KRITERIA	INDIKATOR (jumlah)	PERSENTASE (%)
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	32	33



NO	KRITERIA	INDIKATOR (jumlah)	PERSENTASE (%)
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target	11	11
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	1	1
4	Indikator TPB yang belum memiliki data	54	55
	Total indikator TPB Kabupaten Malinau	98	100

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

5. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan urusan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menunjukkan kinerja yang masih fluktuatif dilihat dari realisasi atas target yang telah ditetapkan, khususnya jika ditinjau dari indikator persentase kepemilikan KTP, bayi berakte kelahiran dan penerbitan kartu keluarga (Lihat tabel 2.26). Data tersebut juga mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga.

Tabel 2. 27
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan KTP	65	80	87	n.a
Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	65	80	87	n.a
Persentase bayi berakte kelahiran usia 0-18 tahun	68	71	80	n.a
Pasangan berakte nikah (Non Muslim)	44	47	57	n.a



Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	47	54	55	n.a
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	88	84	81	n.a

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (2020)

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB aktif dan baru, jumlah kelompok akseptor KB, jumlah klinik KB, dan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif. Berkenaan dengan hal ini, capaian kinerja dalam pengendalian penduduk dan KB dapat dilihat pada Tabel 2.28. Patut menjadi catatan bahwa di kabupaten Malinau, pemerintah tidak melayani pelayanan KB, sehingga program KB dilakukan secara mandiri. Banyak peserta yang tidak melaporkan karena tidak dilakukan pencatatan oleh petugas, hal ini berdampak pada cakupan pelayanan KB dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan secara signifikan, dengan upaya penertiban pencatatan/laporan puskesmas melalui pendataan PIS-PK, cakupan pelayanan KB tahun 2019 mengalami peningkatan.

Tabel 2. 28
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta KB Baru	990	610	192	n.a
Jumlah Peserta KB Aktif	988	613	3.897	n.a
Jumlah Kelompok Akseptor	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Klinik KB	n.a	n.a	12	n.a
Cakupan Sasaran Pasangan Usia subur	1.027	12.573	13.452	n.a



menjadi peserta KB
Aktif

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (2020)

7. Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan memberikan kemudahan dalam pergerakan manusia, barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dengan demikian bermakna bahwa pertambahan sarana angkutan umum dan kendaraan pribadi harus diiringi dengan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dermaga/ pelabuhan dan/atau terminal yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Beberapa indikator kinerja bidang perhubungan adalah jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal/pelabuhan/udara per tahun. Berkenaan dengan hal ini perkembangannya di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Tabel 2.28. Tabel 2.28 menunjukkan kecenderungan peningkatan kedatangan dan keberangkatan orang dari dan keluar Kabupaten Malinau. Oleh karenanya layanan terhadap mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Tabel 2. 29
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten
Malinau Tahun 2017-2020

Bidang	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Udara	Jumlah Keberangkatan	22.357	11.340	44.018	n.a
	Jumlah Kedatangan	19.619	31.716	39.502	n.a
Darat	Jumlah Keberangkatan	6.496	11.340	15.162	n.a
	Jumlah Kedatangan	3.764	5.559	8.661	n.a

Sumber: Dinas Perhubungan - UPTD Terminal (2020)

8. Komunikasi dan Informatika

Sehubungan dengan perkembangan sistem IT, penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang sangat strategis bagi daerah, hal tersebut dapat dilihat dampaknya dari berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis informasi teknologi. Berbagai urusan di bidang pemerintahan dan layanan terhadap masyarakat telah diselenggarakan melalui sistem



informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Malinau telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.malinau.go.id> dan juga terdapat subdomain yang dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan desa yang terjangkau komunikasi. Sedangkan capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di wilayah ini adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30. Dalam hal ini, masih terdapat desa yang belum terjangkau sistem komunikasi dan informasi.

Tabel 2. 30
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Keberadaan Website Milik Pemerintah Kabupaten Malinau	n.a	100	100	n.a
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan	n.a	30	n.a	n.a
Persentase desa yang terjangkau komunikasi	70	95.41	95,41	n.a

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau (2020)

9. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, karena keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat dapat menjadi wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan koperasi dan UKM serta perkembangan kemampuan manajemennya dapat di lihat pada Tabel 2.30, dimana terlihat adanya peningkatan dalam jumlah dan yang mampu



menjalankan kegiatan sesuai kaidah manajemen. Namun terlihat bahwa kemampuan pengelolaan/manajemennya masih perlu mendapatkan pembinaan/pendampingan.

Tabel 2. 31
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif (%)	73	78	78	65
Jumlah UKM (unit)	506	506	506	n.a
Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen (%)	21	25	28	n.a
UKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen (unit)	506	506	506	n.a

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau (2020)

10. Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Malinau memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barangdan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Malinau dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Malinau, jumlah investasi yang dikeluarkan investor berskala nasional cenderung meningkat, namun baru mencapai 6 (enam) ratusan miliar rupiah pada tahun 2019 (Lihat Tabel 2.32).

Tabel 2. 32
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	n.a



PT	-	-	9	n.a
CV	-	-	25	n.a
UD/Toko	-	-	23	n.a

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Malinau (2020)

Tabel 2. 33
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
PMA	n.a	n.a	225.000.000	374.000.000.000
PMDN	n.a	n.a	613.796.000.000	54.000.000.000
PMA dan PMDN	n.a	n.a	614.021.000.000	428.000.000.000

Sumber : Dinas DPMPTSP Kabupaten Malinau (2021)

11. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara semata, organisasi kepemudaan yang pengurus dan anggota terdiri atas pemuda dan pemudi juga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Oleh karenanya, pembinaan terhadap organsiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuh kembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan stategis bagi daerah untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan fakta menunjukkan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Lihat Tabel 2.33).

Tabel 2. 34
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda: persentase organisasi	65,01	79	94	n.a



kepemudaan yang aktif

Jumlah Organisasi Olahraga: persentase organisasi olah raga yang aktif	65	70	73	n.a
--	----	----	----	-----

Sumber : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Malinau (2020)

12. Statistik

Sebuah rencana yang baik dapat dihasilkan dari perencanaan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tidak terkecualikan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harus terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Beberapa dokumen yang telah disusun oleh Kabupaten Malinau, baik disusun oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Malinau Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dokumen statistik lainnya. Tetapi dalam berbagai perencanaan daerah masih sangat dirasakan bahwa data yang tersedia masih kurang, bahkan dalam berbagai pertemuan data yang dipublikasikan oleh pihak pemerintah daerah tersebut masih sering diperdebatkan, sehingga mengupayakan kecukupan data dan meningkatkan validitas berbagai data tersebut masih perlu dilakukan.

13. Persandian

Persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Perangkat daerah yang sudah menggunakan sandi dalam komunikasi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perangkat daerah. Prestasi ini tentu



masih jauh dari harapan dan belum optimal, sehingga di masa mendatang perlu ditingkatkan, khususnya bagi perangkat daerah yang informasinya perlu dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2. 35
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1	1	1	n.a
persentase pengamanan informasi	0	0	0	n.a

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Malinau (2020)

14. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan lembaga pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi baca para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan daerah yang didukung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumberdaya lainnya. Layanan kepubstakaan dan kearsipan di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun layanan kepubstakaan dengan pendekatan penggabungan cara elektronik dan cetak (*hybrid library*) cenderung masih kurang atau belum optimal (Lihat Tabel 2.35), sehingga perlu terus dikembangkan.

Tabel 2. 36
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah arsip OPD dan dari gudang umum Setkab Malinau yang telah didata dan ditata	53	64	113	n.a
Jumlah sekolah/desa yang dikunjungi oleh	18	25	30	n.a



perpustakaan keliling
dan mobil pintar

Sumber : Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Malinau (2020)

2.3.3 Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau dari sektor pariwisata. Berdasarkan data yang ada, capaian kinerja pariwisata Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik ditinjau berdasarkan kunjungan wisata, partisipasi kelompok budaya, maupun pelestarian jumlah warisan budaya. Hal ini merupakan hasil positif dari berbagai promosi wisata Kabupaten Malinau, yang dilakukan dengan cara memperkenalkan kebudayaan tradisional/adat masyarakat lokal di berbagai event nasional maupun internasional. Tetapi, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata ke daerah ini cenderung masih rendah/kurang (Lihat Tabel 2.36) jika dibandingkan daerah lain yang sudah maju fasilitas/infrastruktur wisatanya.

Tabel 2. 37
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten
Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	
Kunjungan Wisata	50	95	308	1.535
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kelompok Seni Dan Budaya	100	100	100	n.a
Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan (Cagar Budaya)	100	100	120	n.a

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Malinau (2020)

2. Pertanian

Kondisi Kabupaten Malinau yang agraris, menjadikan sektor pertanian berkontribusi cukup dominan dalam pembangunan



ekonomi Kabupaten Malinau. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahterah, dan berdaya saing. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, meliputi peningkatan produksi tanaman pangan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan lembaga tani yang menerapkan teknologi pertanian. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa kinerja sektor pertanian Kabupaten Malinau dalam kontribusinya terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan, namun dalam produksi tidak mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.37). Hal ini berarti persoalan rendahnya produktifitas pertanian, khususnya tanaman pangan (padi) masih menjadi tantangan.

Tabel 2. 38
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Peningkatan produksi padi (ton)	17.265	15.861	11.799	n.a
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (miliar Rp)	1.033,60	1.076,08	1.170,12	1.276,93

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau (2020)

3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya yang cenderung mengalami peningkatan akan sangat berperan dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dan berkembangnya produk olahan berbahan baku ikan. Dimana ketiga hal tersebut menjadi indikator utama kinerja di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan tiga indikator tersebut diketahui kinerja sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Malinau sebagaimana tersaji pada Tabel 2.38.



Berdasarkan Tabel 2.38 dapat dinyatakan bahwa produksi perikanan budidaya Kabupaten Malinau masih rendah dan cenderung naik turun bobotnya, sedangkan produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan, sementara konsumsi ikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian yang menjadi persoalan dan tantangan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas perikanan, khususnya perikanan budidaya.

Tabel 2. 39
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan budidaya (ton)	144,3	93,34	126,56	41,52
Konsumsi ikan (kg/Kapita)	28,11	54,23	59,25	n.a
Produksi perikanan tangkap (ton)	144,56	101,79	94,43	95,62

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Malinau (2020)

4. Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malinau. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Malinau belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB serta pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Malinau yang cenderung masih tidak stabil dan masih rendah dibanding sektor lainnya.

Tabel 2. 40
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	2,86	2,77	2,59	2,56
Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga	2,95	2,14	n.a	n.a



Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	4,02	4,13	4,17	4,39
---	------	------	------	------

Sumber : Malinau dalam Angka (2021)

5. Kehutanan

Kabupaten Malinau memiliki areal hutan dengan luas lebih dari satu juta hektar (data belum tersedia dengan tepat), dengan rincian dari tahun 2017-2019, Kawasan Hutan Suaka Alam (994.054,20 Ha), Kawasan Hutan Lindung (674.768,48 Ha), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (1.564.801,40 Ha), Kawasan Hutan Produksi Tetap (365.158 Ha) dan Kawasan Hutan Produksi Konversi (30.117,50 Ha). Sedangkan program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2018-2019 sebesar 10 hektar. Keberadaan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi tersebut menyiratkan adanya proses perubahan hutan alam yang mengarah pada degradasi dan deforestasi akibat aktifitas eksploitasi hasil hutan kayu. Hal patut menjadi perhatian khusus, agar kegiatan produksi di kawasan hutan tersebut dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan pengelolaan hutan secara lestari, sehingga terwujudnya harapan “hutan memberi manfaat yang terus menerus”.

Tabel 2.41
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kehutanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Luas areal hutan (Ha)	n.a	n.a	n.a	n.a
Kawasan Hutan Suaka Alam (Ha)	994.054,20	994.054,20	994.054,20	n.a
Kawasan Hutan Lindung (Ha)	674.768,48	674.768,48	674.768,48	n.a
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	1.564.801,40	1.564.801,40	1.564.801,40	n.a
Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	365.158	365.158	365.158	n.a
Kawasan Hutan Produksi Konversi (Ha)	30.117,50	30.117,50	30.117,50	n.a
Bertambahnya populasi tanaman kehutanan untuk penghijauan dan konservasi	n.a	-	-	n.a



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
lingkungan (juta pohon)				
Terwujudnya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	n.a	10	10	n.a
Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit)	n.a	-	4	n.a
Produksi Kayu Bulat/log (m³)	n.a	n.a	n.a	n.a
Produksi Kayu Olahan/log (m³)	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau (2019)

2.3.4 **Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pebaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malinau tersebut dapat diketahui hasilnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.42. Berdasarkan Tabel 2.42 tersebut dapat diketahui bahwa masih belum primanya tata kelola yang dilakukan.

Tabel 2.42
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n.a	CC	C	C
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP



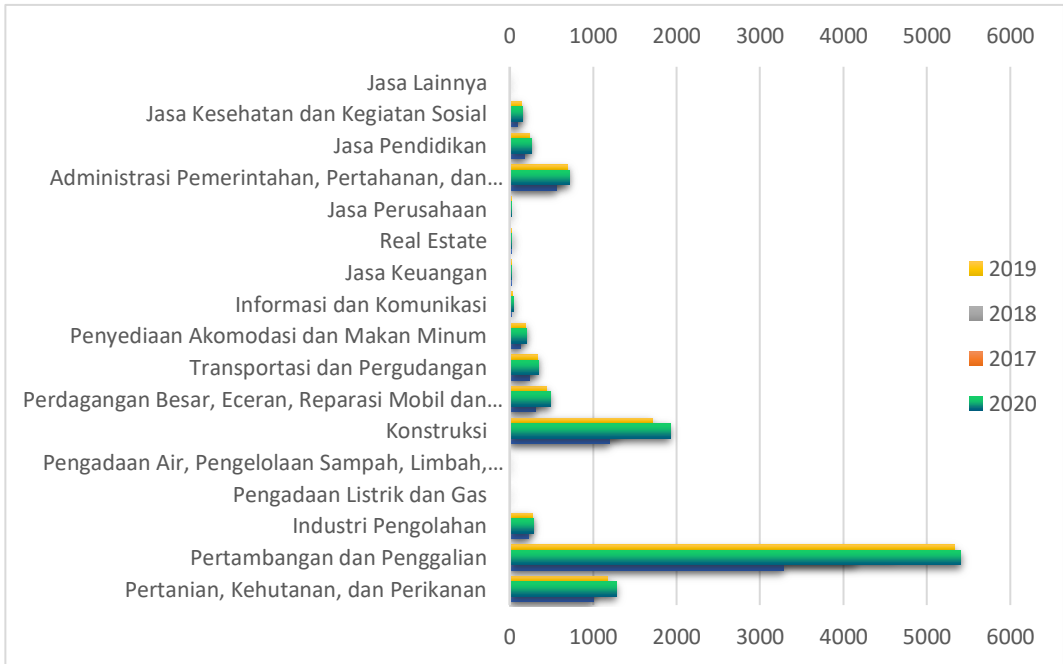
NILAI SAKIP	CC	CC	CC	CC
NILAI LPPD	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Inspektorat Pemkab Malinau dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (2021)

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

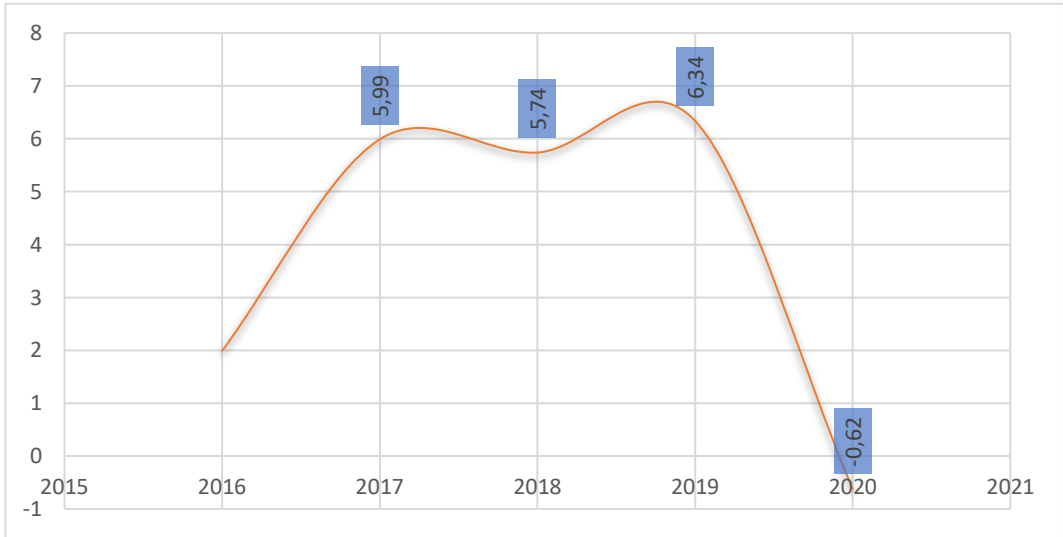
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Peran sektor primer pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan masih sangat dominan memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau, oleh karenanya perlambatan pertumbuhan pada dua sektor tersebut berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau (Lihat Gambar 2.13 dan 2.14).



Sumber : Malinau Dalam Angka (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 2. 13 Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020



Sumber : Malinau Dalam Angka (2019) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat menggambarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Malinau yang ekonomi rumah tangganya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok). Hal ini juga terlihat dari pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Malinau yang cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk kelompok barang makanan, sedangkan pengeluaran perkapita menurut kelompok barang bukan makanan cenderung meningkat secara fluktuatif (Lihat Tabel 2.43 dan 2.44).

Tabel 2.43
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang makanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (Rp)

KELOMPOK BAHAN MAKANAN	PENGELUARAN RATA-RATA PER BULAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	87.015	92.169	92.149	90086
Umbi-umbian	7.57	6.289	7.258	5380
Ikan/ udang/ cumi/ kerang	74.766	91.428	88.593	93475
Daging	55.553	50.665	61.373	54267
Telur dan Susu	42.525	46.187	44.810	51717
Sayur-sayuran	67.954	63.603	58.518	62874
Kacang-kacangan	10.091	11.814	10.883	11675



Buah-buahan	19.248	30.084	24.574	41884
Minyak dan Kelapa	14.549	16.965	14.364	16310
Bahan Minuman	26.440	28.130	26.443	26419
Bumbu-bumbuan	15.265	18.228	14.616	17405
Konsumsi Lainnya	13.053	12.304	14.425	13642
Makanan dan Minuman Jadi	138.498	207.919	146.214	203102
Rokok dan tembakau	88.853	77.900	79.935	101756
Jumlah	653.810	753.685	686.174	789.992

Sumber: Malinau Dalam Angka (2019),Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021).

Tabel 2. 44
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (Rp)

KELOMPOK BARANG BUKAN MAKANAN	PENGELUARAN RATA-RATA PER BULAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	416.551	753.684	414.084	439025
Aneka barang dan jasa	145.692	509.887	150.481	177020
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	25.128	213.471	29.966	34718
Barang tahan lama	28.269	40.761	36.782	73879
Pajak, pungutan, dan asuransi	34.285	72.895	44.087	52490
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	8.162	49.980	18.576	11307
Jumlah	658.087	1.640.678	693.976	788.439

Sumber: Malinau Dalam Angka (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021).

2.4.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur

Percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Malinau membutuhkan ketersediaan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang memadai. Oleh karena pembangunan



infrastruktur merupakan aspek sangat penting dan vital di dalam proses percepatan pembangunan di daerah ini. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai akan menjadikan Kabupaten Malinau memiliki keunggulan daya saing dibandingkan dengan daerah lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) pendukung tersebut tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah saja, akan tetapi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, dimana keterlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah akan dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang pembangunan tersebut meliputi infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan air minum serta energi. Bagaimana ketersediaan jaringan jalan, listrik dan air minum disajikan pada Tabel 2.45, 2.46 dan 2.47.

Tabel 2. 45
Kondisi Jalan di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

URAIAN		TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Jalan Negara (km)		0	0	0	n.a
Jalan Provinsi (km)		0	111,82	0	n.a
Jalan Kabupaten (km)		325,32	1.043,20	1043,2	1043,2
a. Baik		192,6	68,06	72,02	79,19
b. Sedang		88,54	451,74	446,26	439,50
c. Rusak		27,74	113,84	116,5	108,33
d. Rusak Berat		16,44	409,56	408,43	416,22
Total Jalan		325,32	1.043,20	1043,20	1043,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021

Infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten. Total panjang jalan Kabupaten Malinau mencapai 1.043,2 km, jalan di Kabupaten Malinau ini belum proporsional bila dibandingkan luas wilayah dan penyebaran area permukiman penduduk, sehingga konektifitas



antar wilayah permukiman di daerah ini masih sangat rendah. Selain infrastruktur jalan, tenaga listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Produksi listrik, daya terpasang dan listrik terjual di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data disajikan di tabel 2.46. Hal ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah pelanggan PT. PLN. Namun, demikian ketersediaan listrik di wilayah ini belum dapat menjangkau seluruh penduduk di wilayah ini, khususnya pada wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten atau kecamatan.

Tabel 2. 46
Jumlah Pelanggan dan Produksi pada PT. PLN (Persero)
Ranting Malinau di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

URAIAN	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	17.445	19.352	14.431	16.386
a. Rumah Tangga	15.293	17.170	19.175	n.a
b. Sosial	620	591	695	n.a
c. Perkantoran	254	264	279	n.a
d. Badan Usaha	1.206	1.252	1.312	n.a
e. Industri	8	11	14	n.a
f. Penerangan Jalan Umum	64	64	64	n.a
g. Layanan Khusus	0	0	0	n.a
Produksi Listrik				
a. Daya Terpasang (KW)	31.988.492	35.636.400	39.748.300	32.381.700
b. Produksi Listrik (KWh)	54.692.610	57.387.990	63.793.650	69.734.397
c. Listrik Terjual (KWh)	51.818.201	55.105.039	61.071.168	67.222.863
d. Dipakai Sendiri (KWh)	n.a	n.a	n.a	2.844
e. Susut/Hilang (KWh)	2.874.420	2.282.950	2.722.480	3.115.911

Sumber : Malinau Dalam Angka (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021)



Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat (air minum) semakin meningkat, hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Pemenuhan kebutuhan akan air minum bersih dan sehat (air minum) di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air minum yang disediakan oleh PDAM disalurkan ke sektor rumah tanggadan kantor pemerintah, diikuti oleh sektor hotel/toko/industri/perusahaan, dan badan sosial/rumah ibadah disajikan pada Tabel 2.47. Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan pada berbagai jenis konsumen cenderung selalu mengalami peningkatan/kenaikan, namun air minum tersebut belum dapat menjangkau seluruh penduduk di wilayah ini, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Telekomunikasi merupakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Ketersediaan layanan telekomunikasi di suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah memiliki kesadaran akan informasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir 2019, ketersediaan layanan telekomunikasi menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam berbagi informasi dan melakukan berbagai aktivitas di rumah akibat *sosial distancing*. Cakupan layanan telekomunikasi di tingkat kecamatan didapatkan dengan membagi luas wilayah yang tercoverage dengan luas wilayah keseluruhan dikalikan dengan 100 persen. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara, data cakupan layanan telekomunikasi merupakan kewenangan pusat. Akan tetapi, terdapat data jumlah blankspot dalam satuan desa atau kelurahan. Jumlah blankspot di Kabupaten Malinau jumlahnya ada 10 desa atau kelurahan, dan setiap tahun jumlahnya tetap. Sedangkan di tabel 2.47 jumlah pasar tradisional dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari 12 unit pasar meningkat menjadi 18 unit pasar tradisional yang aktif.



Tabel 2. 47
Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga (tempat tinggal) dan instansi/kantor pemerintah	6.474	7.977	8.651	n.a
Hotel/objek wisata, toko industri, perusahaan	1.835	1.989	2.157	n.a
Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dst	52	52	214	n.a
Sarana Umum	0	0	0	
Jumlah	8.361	10.018	11.022	12.416

Sumber :PDAM Kabupaten Malinau (2021)

Tabel 2. 48
Jumlah Blankspot di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	SATUAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah Blankspot	Desa/kel	10	10	10	n.a

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2019

Tabel 2. 49
Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	SATUAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah Pasar Aktif	unit	12	18	18	n.a
Jumlah Pasar Non Aktif	unit	0	0	0	0

Sumber Dinas Perdagangan dan Industri 2020.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Arus investasi ke daerah harus didukung dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Kondisi daerah yang sering terjadi konflik, menimbulkan keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi di daerah. Dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif dan aman, Pemerintah Daerah



Kabupaten Malinau dan instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak dan konflik sosial di masyarakat. Berdasarkan data yang ada dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Malinau merupakan daerah yang kondusif bagi aktifitas investasi karena rendahnya tingkat kriminalitas dan pelanggaran kamtibmas di Kabupaten ini (Lihat Tabel 2.50)

Tabel 2. 50
Tindak Kriminal dan Pelanggaran Kamtibmas Kabupaten
Malinau Tahun 2016–2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kejahatan Kesusilaan	8	1	2	n.a
Perjudian	0	1	0	n.a
Kejahatan Terhadap Nyawa	1	0	0	n.a
Penganiayaan	13	12	12	n.a
Menyebabkan Mati/Luka Karena Alpha	0	0	0	n.a
Pencurian	34	8	10	n.a
Pemerasan Dan Pengancaman	2	1	2	n.a
Penggelapan	6	4	6	n.a
Penadahan	0	0	0	n.a
Kejahatan Penerbitan Dan Percetakan	0	0	0	n.a
Tindak Pidana Ekonomi	3	0	0	n.a
Tindak Pidana Senjata Tajam	4	3	0	n.a
Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	24	49	24	n.a
Tindak Pidana Perlindungan Anak	0	4	2	n.a
Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	17	24	32	n.a
Tindak Pidana Devisa	0	0	0	n.a
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)	0	2	1	n.a
Tindak Pidana Lain	22	18	6	n.a
Jumlah	134	127	97	n.a

Sumber: Kepolisian Resor Malinau (2020)



2. Perizinan

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Malinau, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Jenis perizinan yang paling banyak diterbitkan oleh Kabupaten Malinau diantaranya yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin usaha jasa kontruksi (IUJK), Surat Izin Praktek Dokter (umum, special, dan gigi), surat izin praktek perawat, surat izin praktek bidan. Berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan daya saing (kemampuan) pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perijinan usaha.

Tabel 2. 51
Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Bidang Penanaman Modal	Izin Prinsip	1	1	0	n.a
Dinas PU Dan PERKIM	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	59	88	31	n.a
	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	12	21	15	n.a
	Izin Reklame	0	0	0	n.a
	Sertifikat Laik Fungsi	0	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Dokter (Umum, Spesialis, Dan Gigi)	22	26	63	n.a
Bidang Kesehatan	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), Izin Apotek	07-Jan	3	11	n.a
	Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK)	0	6	12	n.a
	Surat Izin Praktek Apoteker Pengganti Dan Pendamping (SIPAPP)	0	1	1	n.a
	Surat Izin Praktek Asisten Apoteker (SIPAA)	11	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	28	72	169	n.a
	Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)	0	0	12	n.a
	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	14	78	120	n.a
	Izin Apotik	1	3	1	n.a
	Izin Toko Obat	1	1	1	n.a
	Surat Izin Pengobatan Tradisional (Akupuntur, Refleksionis, Shinse Dan Tabib	0	0	0	n.a
	Izin Tukang Gigi	0	0	0	n.a
	Izin Optik	0	1	0	n.a
	Izin Klinik Kesehatan	0	0	1	n.a
	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	n.a
	Izin Kesehatan Jasa Boga Dan Catering	1	3	0	n.a



DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
	Izin Kesehatan Warung Dan Restoran	0	1	0	n.a
	Izin Pusat Kebugaran	0	0	0	n.a
	Izin Salon	1	0	0	n.a
	Izin Pengecer Pestisida	0	0	0	n.a
	Surat Izin Kerja (SIK) Bidan	0	0	0	n.a
	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi	0	0	0	n.a
	Izin Praktek Gizi (SIPG)			7	n.a
	Izin Depo Air Minum	1	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Perekaman Medis Informasi Kesehatan (SIPPMIK)	0	0	3	n.a
	Surat Izin Praktek Analisis Kesehatan (SIPAK)	0	0	15	n.a
	Surat Izin Kesehatan Lingkungan (SIKL)	0	0	1	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Fisioterapi (SIPPF)	0	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Elektromedis (SIPPE)	0	0	1	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Radiologi (SIPPR)	0	0	2	n.a
Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	97	108	26	n.a
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	153	143	20	n.a
	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	n.a
	Izin Perluasan (IP)	0	0	0	n.a
	Izin Moulding	0	0	0	n.a
Bidang Perhubungan	Izin Usaha Angkutan/Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	n.a
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	0	0	2	n.a
	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Angkutan Barang Di Jalan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	0	0	0	n.a
	Izin Trayek/Izin Operasi	0	0	0	n.a
	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	0	0	0	n.a
	Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0	0	0	n.a
Bidang Pariwisata	Izin Usaha Hotel Berbintang Dan Melati	1	0	0	n.a
	Izin Usaha Rumah Makan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Hiburan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Restoran	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Kos-Kosan Diatas 10 Kamar	0	0	0	n.a
Bidang Pertanahan	Izin Lokasi Atas Tanah	1	8	0	n.a
Bidang Pertanian	Izin Usaha Perkebunan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman	0	0	0	n.a
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Izin Usaha Proses Produksi	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Prouksi Dan Penanganan Pasca Panen	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pembenihan Tanaman	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Budidaya Hortikultura	0	0	1	n.a
	Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Budidaya Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Rusa, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Ayam Buras, Itik, Angsa Dan Entok)	0	0	0	n.a



DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
	Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemotongan Hewan Dan Unggas	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Ternak/Hewan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Bahan Asal Ternak (Kulit, Susu, Daging Dan Ternak)	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0	n.a
	Usaha Peternakan Lainnya	0	0	0	n.a
	Izin Lingkungan Hidup	0	0	0	n.a
Bidang Lingkungan Hidup	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	0	0	0	n.a
	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air	0	0	0	n.a
	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0	n.a
Bidang Tenaga Kerja	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0	0	0	n.a
	Izin Operasionalpusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PBKM)	0	0	0	n.a
Bidang Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	0	0	0	n.a
Bidang Kehutanan	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	0	0	0	n.a
Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	160	147	0	n.a
	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	5	0	n.a
	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	0	n.a
Bidang Pertanian	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunana Usaha Budidaya (STD-B)	0	0	0	n.a
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Tanda Daftar Usaha Hortikultura	0	0	1	n.a
Bidang Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	n.a
Bidang Penanaman Modal	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	0	0	n.a
	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan (SKPP)	0	0	0	n.a
Bidang Lingkungan Hidup	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	0	0	0	n.a
	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	0	0	0	n.a
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SIPPL)	0	0	9	n.a
Bidang Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	0	0	12	n.a
Bidang Tenaga Kerja	Kartu Antar Kerja 1 (AK.1)	0	0	410	n.a
	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0	n.a
Bidang Dinas Perikanan	Tanda Catat	0	0	0	n.a
Bidang Dinas Perhubungan	Izin Rekomendasi Terminal Khusus (Tersus)	0	0	0	n.a

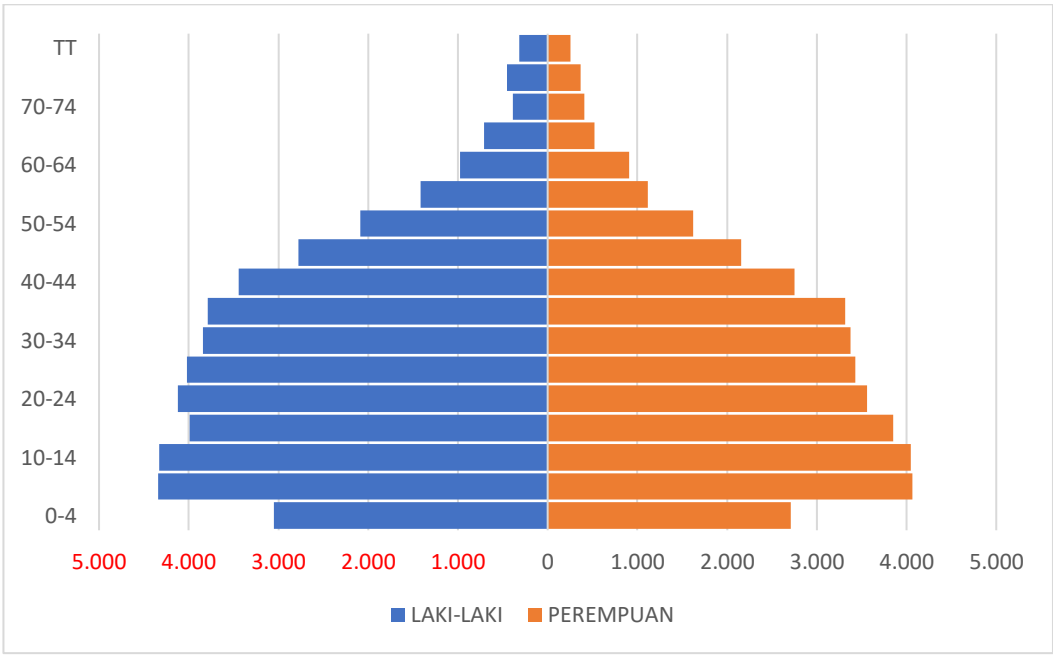
Sumber: DPMPTSP Malinau, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Seperti yang telah dibahas pada sub bab terdahulu, jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan



kelompok umur, penduduk Kabupaten Malinau didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun, sedangkan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami peningkatan dengan angka peningkatan yang signifikan. Sementara, untuk kelompok usia tua mengalami kecenderungan tidak mengalami perubahan yang berarti. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi peningkatan daya saing Kabupaten Malinau untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai catatan khusus, bahwa dari penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikannya diketahui bahwa umumnya adalah berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah (79,78%), sedangkan yang berpendidikan tinggi terkonsentrasi pada Pegawai Negeri Sipil (57,50% dari 3.365 PNS).



Gambar 2. 15 **Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2019**

Sumber :Malinau Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menindaklanjuti amanat dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan



Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

2.5.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun realisasi SPM bidang pendidikan adalah:



1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi PAUD di Kabupaten Malinau mencapai 60,20 persen.
2. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan dasar adalah anak SD/ Mi/SMP/MTs /sederajat. Pada tahun 2020 persentase Pendidikan dasar yang mendapat layanan pendidikan di Kabupaten Malinau adalah 99,40 persen.
3. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan adalah anak SD/Mi/SMP/MTs/sederajat. Pada tahun 2020 persentase Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan pendidikan di Kabupaten Malinau adalah 95,24 persen.
4. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal. Pada tahun 2020, Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal S1/DIV di Kabupaten Malinau capaiannya adalah 85,99 persen untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama/MTs.

2.5.2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun realisasi SPM bidang Kesehatan adalah

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil 80,3 persen;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin 91,6 persen;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 79,8 persen;
- d. pelayanan kesehatan balita 57,1 persen;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 41,1 persen;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 persen;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 persen;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 persen;



- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100 persen;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 persen;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 persen; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 100 persen.

2.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah provinsi meliputi :

- 1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum sehari-hari kabupaten/kota Pemenuhan SPM kebutuhan Air Minum sehari-hari lintas kabupaten/kota untuk tahun 2020 sebesar 0,57 persen
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik lintas kabupaten/kota Pemenuhan SPM penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota untuk tahun 2020 sebesar n/a (not available), hal ini dikarenakan belum ada realisasi pembangunan pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota sebesar 80 persen.

2.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT /M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah daerah meliputi :



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah. Pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2020 sebesar 0
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2020 sebesar 0.

2.5.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut :

- a) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
- b) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
- c) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 100 persen;
 2. pelayanan informasi rawan bencana data n.a;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana data n.a;



4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana data n.a; dan
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 persen.

2.5.6 Sosial

Operasionalisasi SPM Bidang sosial berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi meliputi

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 0 persen,
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti 0 persen,
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 0 persen, dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten data n.a (not available).

2.6. CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil pembangunan yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berbagai capaian pembangunan seharusnya dapat terlihat pada sasaran pembangunan (sasaran pokok) dengan indikator sebagai tolok ukurnya. Dalam rumusan perencanaan pembangunan, terdapat sebanyak 42 indikator pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021 yang diselaraskan pada 23 sasaran pembangunan daerah. Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten Malinau di tahun 2019 “Sangat Tinggi” dengan capaian kinerja 114,22 persen dibandingkan target 2019 dan sebesar 105,02 persen jika dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan



pembangunan jangka menengah yakni tahun 2021. Jika melihat perbandingan pembangunan di tahun 2019, maka dari 42 indikator tersebut di atas sebanyak 32 indikator berkategori “Sangat Tinggi” (76,19%) dan kategori “Tinggi” hanya 1 (satu) indikator saja (2,38%). Adapun pada perbandingan dengan target akhir RPJMD Malinau yakni tahun 2021, maka terdapat 27 indikator memiliki capaian “Sangat Tinggi” (64,29%) dan capaian “Tinggi” sebanyak 6 indikator (14,29%).

Tabel 2. 52
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	STATUS
Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	Sangat Tinggi
	Harapan lama sekolah (tahun)	Sangat Tinggi
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Sangat Tinggi
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	Sangat Tinggi
	Prevalensi Balita Stunting	Sangat Tinggi
Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	Sangat Tinggi
	Persentase Penduduk Miskin (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk.Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang (%) wisatawan	Sangat Tinggi
Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (%)	Tinggi
	Persentase Jalan dalam kondisi baik/mantap (%)	Sangat Tinggi
	Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas (%)	Sangat Tinggi
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi (%)	Sangat Tinggi
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan	Pendapatan Perkapita Masyarakat (Rp)	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR	STATUS
Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	Rendah
	Menurunnya angka pengangguran/Tk. Pengangguran (%) terbuka	Sangat Tinggi
Mengembangkan Produk Unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (%)	na
Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) perdagangan	Sangat Tinggi
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	Rendah
	Tingkat pertumbuhan perdagangan (%)	Sangat Rendah
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat Pertumbuhan Industri (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan	Sangat Tinggi
	Rasio tempat ibadah per penduduk	Sangat Tinggi
Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase Konflik SARA %	Sangat Tinggi
	Indek kualitas lingkungan hidup	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas udara (ISPU)	Sangat Tinggi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indek Reformasi birokrasi	Sangat Tinggi
	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Sangat Tinggi
	Nilai Sakip	Rendah
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesetaraan gender	Indek pembangunan gender (%)	Sangat Tinggi
	Indek pembangunan gender (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indek pemberdayaan gender (%)	na
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Sedang



SASARAN	INDIKATOR	STATUS
	Jumlah wisatawan	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Cagar Budaya) (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sedang
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Sedang
RATA-RATA CAPAIAN		Sangat Tinggi

Secara umum, kesimpulan yang didapatkan dari berbagai evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah terlihat kesesuaian sistematika maupun substansi rumusan RPJMD dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyusunannya RKPD 2017-2019 dilakukan sebelum dirumuskan perubahan RPJMD 2016-2021 sehingga evaluasi pembangunan tahun 2016-2019 khususnya dalam melihat uraian program dan kegiatan pembangunan maupun keuangan daerah terlihat belum selaras. Meskipun begitu, secara konten masih memiliki beberapa poin yang terintegrasi meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda;
3. Terdapat perbedaan antara rumusan program dalam RPJMD 2016-2021 dengan Rencana Strategis OPD 2016-2021;
4. Semakin rendahnya capaian status kinerja pembangunan daerah ketika mendekati titik akhir RPJMD 2016-2021 mengindikasikan penurunan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
5. Belum adanya capaian program pembangunan tahun 2021 karena masih berjalan; dan
6. Belum optimalnya ketersediaan data dalam mendukung evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Sedangkan rekomendasi perbaikan dalam evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau untuk



menyempurnakan pembangunan Kabupaten Malinau periode pembangunan 2021-2026:

1. Penyesuaian setiap tahapan rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Melakukan sinkronisasi kembali antara program pada rumusan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Meninjau kembali berbagai program yang memiliki capaian status kinerja rendah dan tergolong stagnan serta merumuskan ulang program bersangkutan untuk meningkatkan akselerasi capaian hasil pelaksanaan pembangunan;
4. Perlu peninjauan kembali tujuan, sasaran dan indikator yang belum relevan dengan konsep pembangunan maupun dalam hal ketersediaan data secara berkesinambungan; dan
5. Perlu adanya penyempurnaan dalam perumusan permasalahan dan isu strategis yang up to date maupun arah kebijakan dan program kegiatan yang sesuai dengan potensi daerah dan perkembangan jaman.



BAB

3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

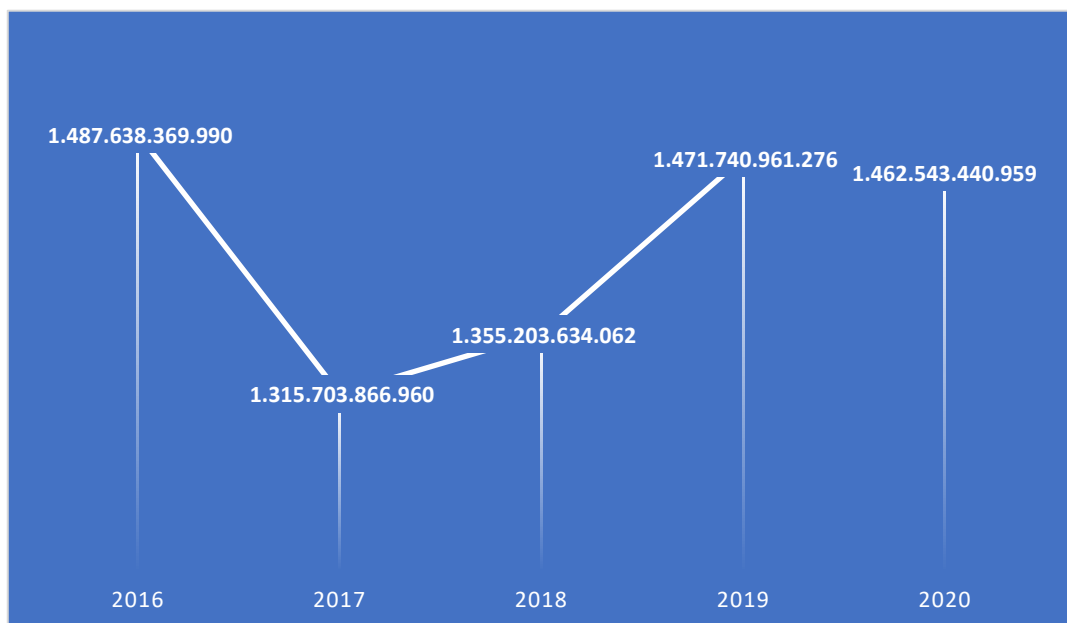
Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.487.638.369.990,- dan turun di tahun 2020 sebesar Rp. 1.462.543.440.959,- dengan pertumbuhan minus 0,15 persen.



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)

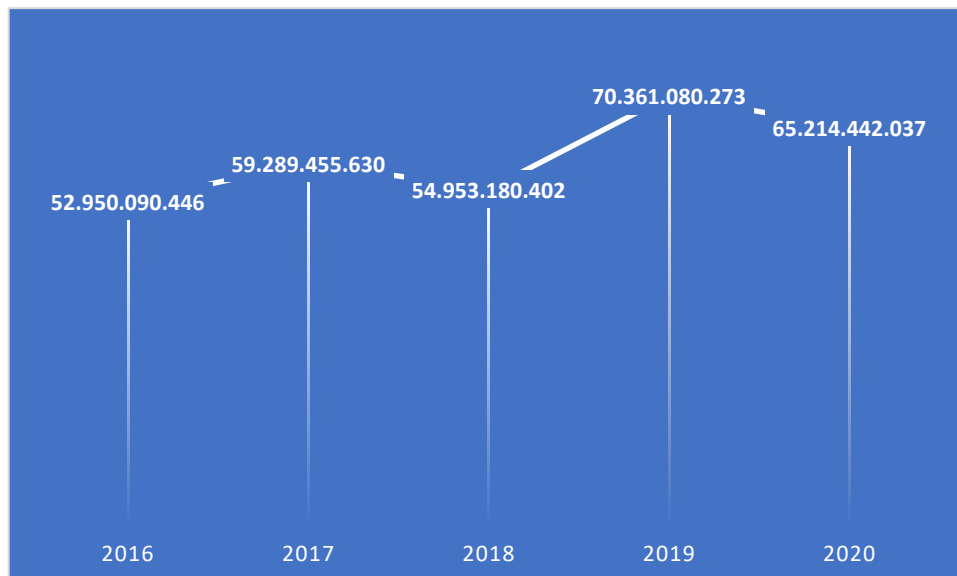
Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dan jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2016 dan tahun 2020, pendapatan daerah Kabupaten Malinau mengalami penurunan sebesar minus 1 persen dengan rata-rata penurunan pendapatan daerah per tahun sebesar minus 0,24

persen. Penurunan pendapatan daerah tersebut terjadi pada sektor Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer.

Penurunan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah mengalami penurunan, khususnya Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut perlu dilaksanakan kordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, melakukan kajian terhadap komponen penentu DAU sebagai bahan masukan Pemerintah Pusat dan meningkatkan indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan dana transfer agar pendapatan daerah diterima dengan optimal.

Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau 2016-2020 (Milyar Rupiah)

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau tahun 2016 sebesar Rp. 52,950 milyar sedangkan PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 65,214 milyar Selama kurun waktu 2016-2020 PAD Kabupaten Malinau mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 30,38 persen.

Adapun komponen – komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut :



a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mencapai target yang ditetapkan dalam APBD meningkat sebesar 619,61 persen rata-rata pertumbuhannya.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Target PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2016 dan 2020 menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 88,52 persen

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memperoleh PAD yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016 dan 2020, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun sebesar minus 4,60 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja PAD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020. rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 33,45 persen..

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau Bersumber dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- b. Dana Perimbangan,
- c. Transfer Pemerintah Pusat
- d. Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan
- e. Bantuan Keuangan.

Meskipun Pendapatan Transfer mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2020 Pendapatan Transfer mengalami penurunan. Secara umum, Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar minus 5,31 persen.



Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :

a) Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pada tahun 2016 dan 2020, Target Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menurun sebesar rata-rata minus 6,35 persen.

b) Dana Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2016 dan 2020, Target Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan tumbuh negatif sebesar 16,21 persen

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pada tahun 2016 dan 2020, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat tajam sebesar 53,73 persen. Adapun rincian lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

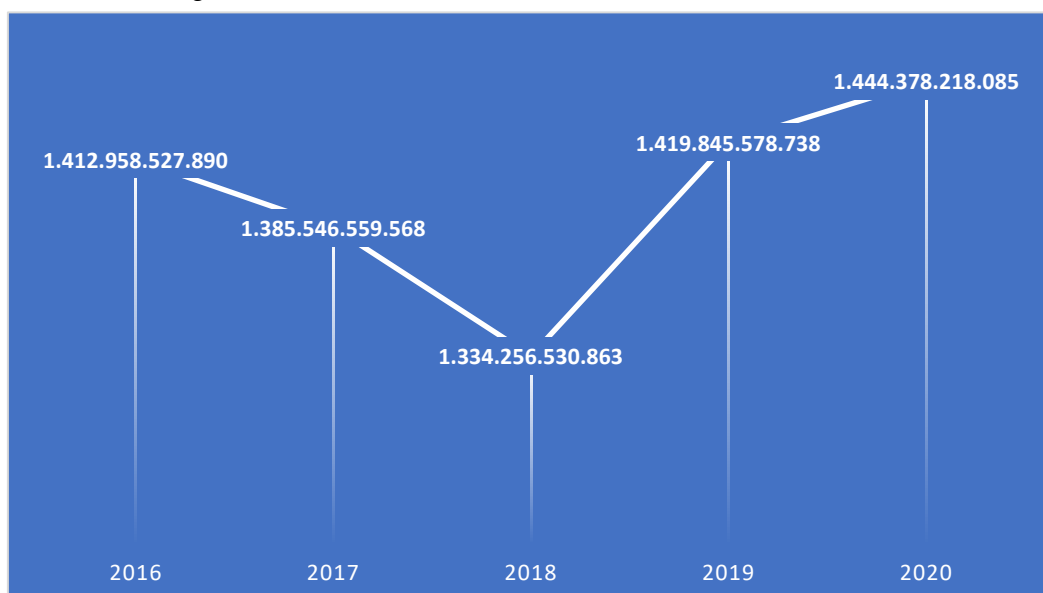
1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2016 dan 2020, Pendapatan Hibah tumbuh negatif sebesar 24,04 persen

2) Pendapatan Lainnya

Pada tahun 2016 dan 2020, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Lainnya penyumbang pendapatan terbesar naik positif sebesar 50,11 persen.

2. Belanja Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 3 Transfer Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020



Belanja Daerah Kabupaten Malinau selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan yang berfluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan meningkat 0,92 persen. Belanja daerah terbesar dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

Belanja Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi diarahkan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan, akses, gaji ke tiga belas), tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (uang makan, tunjangan guru terpencil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan paramedis), belanja hibah belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja barang dan jasa. Pada tahun 2016 dan 2020, Belanja Operasional meningkat sebesar 0,70 persen.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Malinau dialokasikan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Belanja modal diarahkan untuk membiayai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan / irigasi / jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Alokasi belanja modal terbesar diarahkan untuk membiayai pembangunan gedung dan bangunan serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringannya. Pada tahun 2016 dan 2020, belanja modal Kabupaten Malinau menurun sebesar minus 48,30 persen rata-rata per tahunnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.



Pada tahun 2016 dan 2020, alokasi belanja tidak terduga sebesar meningkat sebesar Rp. 38.892.325.734,-

4) Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Malinau terdiri dari Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. Pada tahun 2016 dan 2020, alokasi transfer Kabupaten Malinau meningkat rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 100,12 persen.



Tabel 3. 1
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
PENDAPATAN	1.487.638.369.990	1.315.703.866.960	1.355.203.634.062	1.471.740.961.276	1.462.543.440.959	-1,22%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.950.090.446	59.289.455.630	54.953.180.402	70.361.080.273	65.214.442.037	30,38%
Pajak Daerah	1.751.870.417	8.956.402.934	8.702.286.031	13.572.119.158	10.103.027.404	619,61%
Retribusi Daerah	14.176.909.929	1.376.106.350	2.340.910.905	1.693.507.434	1.444.868.069	-88,52%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.089.642.445	6.548.674.596	5.889.163.498	5.549.995.354	3.250.680.717	-4,60%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.287.452.420	42.408.271.751	38.020.819.967	49.545.458.328	50.415.865.848	33,45%
PENDAPATAN TRANSFER	1.418.343.179.544	1.240.528.052.539	1.282.161.537.859	1.386.043.958.923	1.221.925.653.921	-5,31%
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.379.112.239.737	1.212.129.134.446	1.252.652.966.371	1.343.423.019.144	1.147.461.770.413	-6,35%
Dana Bagi Hasil Pajak	39.230.939.807	28.398.918.093	29.508.571.488	32.195.858.745	34.979.905.378	-16,21%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA				193.032.307.921	188.473.396.312	
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA				814.152.557.000	784.353.307.000	
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA				97.886.691.067	97.978.950.122	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA				50.055.229.411	41.676.211.601	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA				148.072.875.000	21.601.351.000	
Dana Penyesuaian - LRA				148.072.875.000	21.601.351.000	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				42.620.939.779	43.149.023.138	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA				42.620.939.779	43.149.023.138	
Bantuan Keuangan - LRA				8.027.500.000	9.713.509.370	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA				8.027.500.000	9.713.509.370	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.345.100.000	15.886.358.791	18.088.917.801	15.335.922.080	175.403.345.000	53,73%
Pendapatan Hibah		3.454.551.391	5.704.717.801	2.528.000.000	2.935.000.000	-24,04%
Pendapatan Lainnya	16.345.100.000	12.431.807.400	12.384.200.000	12.807.922.080	172.468.345.000	50,11%
BELANJA DAN TRANSFER	1.412.958.527.890	1.385.546.559.568	1.334.256.530.863	1.419.845.578.738	1.444.378.218.085	0,92%
BELANJA	1.258.606.307.496	1.125.307.832.568	1.064.237.806.883	1.112.522.203.738	1.130.771.445.085	-11,25%
BELANJA OPERASI	931.205.172.812	796.050.981.426	892.240.769.314	936.938.745.462	940.227.025.204	0,70%
Belanja Pegawai	458.253.792.032	444.985.723.850	459.130.216.654	475.652.043.194	481.304.058.967	4,10%
Belanja Barang Dan Jasa	385.017.516.718	307.870.815.692	369.575.357.048	396.782.006.547	369.937.443.643	1,27%
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi	10.276.371.514	6.036.814.177	360.659.600	2.401.130.200	1.881.918.000	-78,02%
Belanja Hibah	74.941.479.492	35.709.840.307	62.873.345.512	56.626.115.521	83.194.061.169	-16,81%
Bantuan Sosial	2.716.013.156	1.447.787.400	301.190.500	5.477.450.000	3.909.543.425	85,37%



Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
BELANJA MODAL	327.401.134.684	329.256.851.142	171.991.537.569	175.583.458.276	151.652.094.147	-48,30%
Belanja Tanah	952.578.999	4.256.251.259	1.767.981.289	2.692.520.411	78.305.181	16,73%
Belanja Peralatan Dan Mesin	39.887.755.144	19.914.481.284	35.147.498.459	34.751.331.482	25.507.715.860	-19,36%
Belanja Gedung Dan Bangunan	7.921.446.940	49.173.907.356	21.924.797.602	60.293.802.288	50.360.093.912	627,65%
Belanja Jasa, Irigasi Dan Jaringan	278.063.426.101	254.775.521.088	112.723.572.469	76.664.016.846	74.974.715.067	-72,58%
Belanja Aset Tetap Lainnya	340.751.500	890.040.155	30.000.000	16.500.000	-	-100,00%
Belanja Aset Lainnya	235.176.000	246.650.000	397.687.750	1.165.287.249	731.264.127	341,01%
BELANJA TIDAK TERDUGA			5.500.000		38.892.325.734	
belanja tak terduga			5.500.000		38.892.325.734	
TRANSFER	154.352.220.294	260.338.727.000	270.018.723.980	307.323.375.000	313.606.773.000	100,12%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	154.352.220.294	260.338.727.000	270.018.723.980	307.323.375.000	313.606.773.000	100,12%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	154.099.999.577	260.338.727.000	270.018.723.980	8.027.500.000	-	-100,00%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	252.220.717			299.295.875.000	313.606.773.000	#DIV/0!
SURPLUS/(DEFISIT)	74.679.842.100	-69.842.692.608	20.947.103.199	51.895.382.538	18.165.222.874	-46,55%
PEMBIAYAAN PENERIMAAN	20.406.806.269	92.007.206.040	20.818.430.950	237.983.447.541	236.622.534.646	1064,53%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	20.375.160.269	91.989.793.040	20.816.830.990	37.978.980.541	86.622.534.646	129,07%
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah Bank Dunia						
Penerimaan Kembali Piutang Daerah		17.415.000	1.600.000	4.467.000		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	31.646.000			200.000.000.000	150.000.000.000	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.406.806.269	92.007.206.040	20.818.430.950	237.983.447.541	236.622.534.646	1064,53%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000	
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			2.000.000.000	200.000.000.000	3.000.000.000	
Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman Bank Dunia)					150.000.000.000	
Pembiayaan Utang Kepada Pihak Ketiga						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000	
PEMBIAYAAN NETTO	20.406.806.269	92.007.208.040	18.818.430.990	37.983.447.541	83.622.534.646	126,73%
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	3.096.855.330					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	91.989.793.040	22.164.515.432	39.765.536.189	89.878.830.079	101.787.757.519	0,79%

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)



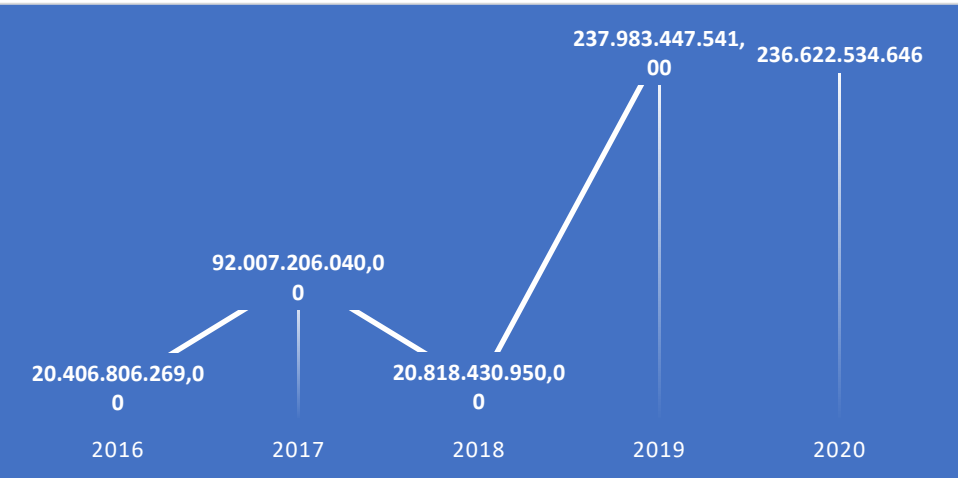
3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2016 dan 2020 dianggarkan meningkat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 329,01 persen Penerimaan pembiayaan tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

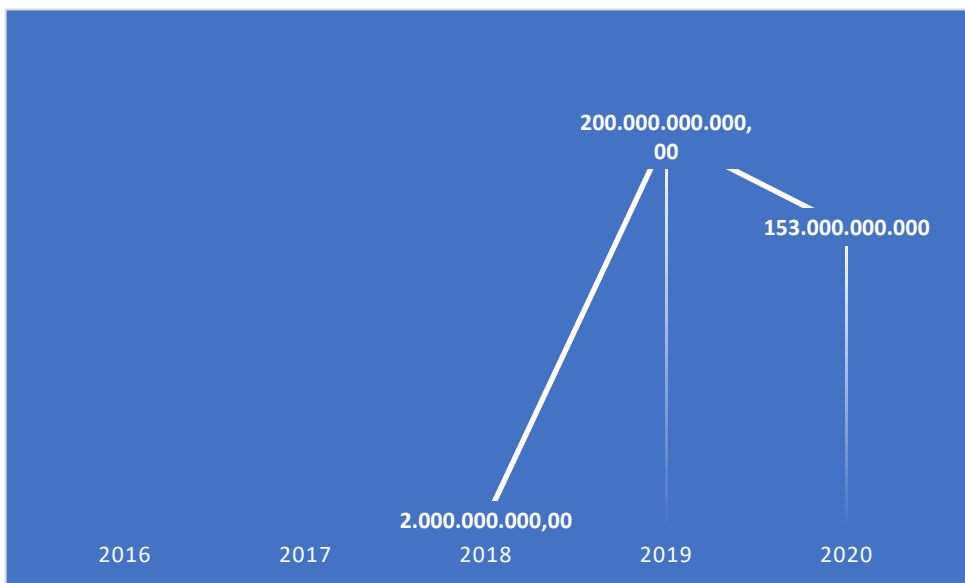


Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malinau selama tahun 2016-2020 dialokasi untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran utang kepada pihak ketiga. Pada tahun 2019 dan 2020, meningkat sangat tinggi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malinau.

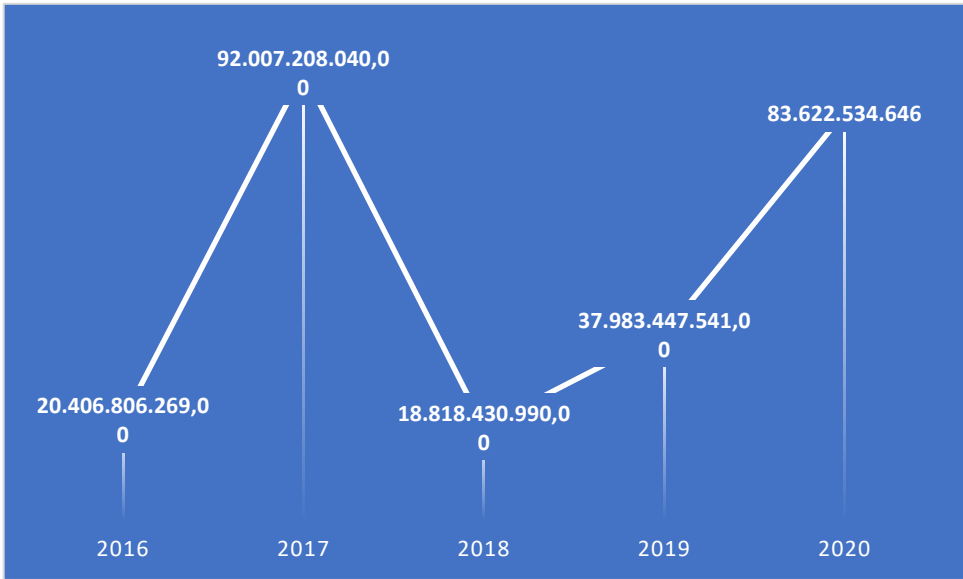


Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 5 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto yang dianggarkan harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto Kabupaten Malinau pada tahun 2016 dan 2020 meningkat sebesar 123,33 persen rata-rata pertumbuhan per tahunnya.

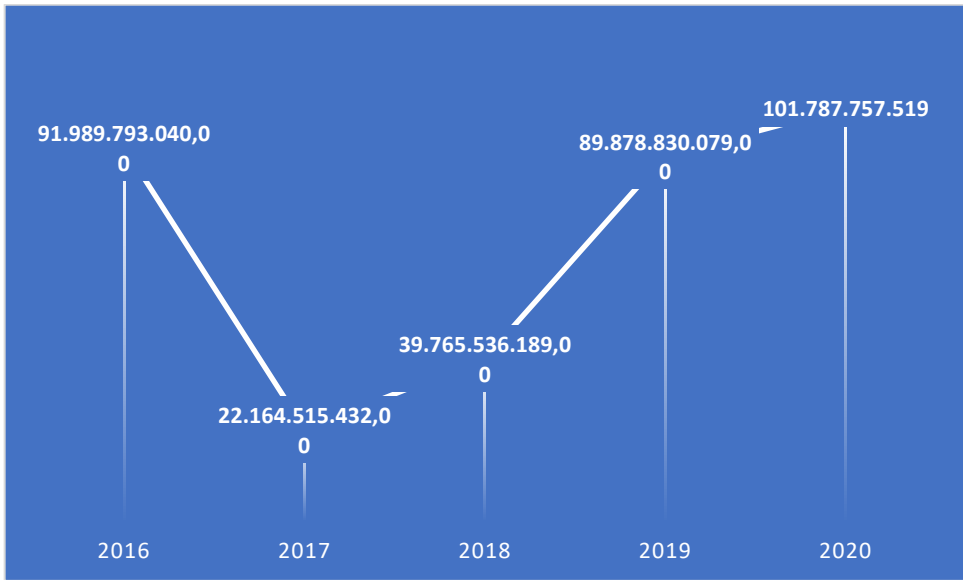


Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 6 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Realisasi SiLPA Kabupaten Malinau mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 dan 2020, SiLPA Kabupaten Malinau terealisasi meningkat sebesar 35,69 persen rata-rata pertumbuhannya.



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 7 Target dan Realisasi SILPA Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

3.1.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas



keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah daerah LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Sedangkan Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan entitas pada tanggal tertentu. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD dan Neraca Kabupaten Malinau tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 2
Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
ASET	5.359.454.379.542,42	4.994.155.623.518,90	4.840.095.778.151,28	4.951.225.759.723,33	4.828.120.654.139,19	-8,20%
ASET LANCAR	149.542.274.522,56	146.087.790.253,95	198.736.943.066,20	325.845.809.167,56	244.327.482.261,26	102,76%
Kas	97.737.283.524,35	25.512.375.014,04	40.876.410.003,17	91.090.307.048,84	101.884.161.897,36	-4,15%
Kas di Kas Daerah	76.778.682.818,73	1.053.600.846,62	19.244.893.255,85	70.760.651.001,84	92.914.312.006,69	-1,34%
Kas di Bendahara Penerimaan	560.665.780,00	117.257.200,00	80.144.300,00	103.839.456,00	97.229.350,00	-81,78%
Kas di Bendahara pengeluaran	200.000.000,00	257.833.500,00	22.593.313,00	10.172.100,00	366.037.939,00	-87,54%
Kas di Bendahara BLUD	12.813.908.980,00	16.829.900.092,00	17.693.670.431,00	14.399.892.064,00	6.367.029.845,00	-8,36%
Kas di Rekening JKN	2.360.025.945,62	1.907.092.990,97	166.645,32	10.632.505,00		-100,00%
Kas di Bendahara Dana BOS	5.024.000.000,00	5.346.690.384,45	3.834.942.058,00			-100,00%
Kas Lainnya				5.805.119.922,00	2.139.552.756,67	-22,08%
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		
Deposito	-	-	-	-		
Piutang	-	-	-	-		
Piutang Pendapatan Asli Daerah	3.443.892.737,00	4.537.972.793,00	5.827.188.129,00	6.964.924.489,00	0	-100,00%
Piutang Deviden	-	-	-	-		
Piutang Dana Bagi Hasil	26.804.097.587,08	75.713.634.456,32	71.178.188.129,00	121.270.671.832,23	88.612.150.212,80	318,30%
Piutang Pendapatan Dana BOS	-	-	-	-		
Penyisihan Piutang Pendapatan	-844.173.563,71	-1.407.471.947,00	-2.060.983.738,50	-2.634.130.532,75		-100,00%
Piutang lain-lain	9.886.749.990,00	1.014.274.108,14	12.460.126.287,00	16.324.997.271,83	6.584.357.788,00	31,59%
Penyisihan Piutang Lainnya	-441.529.629,00	-757.660.138,00	-808.609.095,84	-1.363.881.687,80	(5.732.239.456,12)	342,29%
Beban Dibayar di Muka	590.112.013,44	280.000.000,00	126.917.621,77	-		-100,00%
Persediaan	12.366.141.783,40	32.094.665.967,45	71.137.304.795,60	94.192.920.746,21	52.979.051.819,22	559,64%
INVESTASI JANGKA PANJANG	110.602.191.858,00	111.294.125.550,79	114.162.392.698,73	114.326.965.375,78	116.992.628.369,66	3,97%



URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
Investasi Non Permanen	1.873.012.174,00	1.469.931.680,79	1.273.517.800,78	1.277.573.895,78	943.236.889,66	-36,77%
Investasi Dana Bergulir	3.068.524.469,26	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	-11,60%
Dana bergulir diragukan tertagih	-1.195.512.295,26	-1.242.591.406,21	-1.439.005.286,22	-1.434.949.191,22	(1.769.286.197,34)	26,48%
Investasi Permanen	108.729.179.684,00	109.824.194.870,00	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	4,66%
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	108.729.179.684,00	109.824.194.870,00	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	4,66%
ASET TETAP	4.929.212.003.042,72	4.591.138.250.099,98	4.381.657.545.991,18	4.354.930.677.492,66	4.293.793.736.414,44	-11,96%
Tanah	232.781.375.655,48	1.405.187.169.340,44	1.405.060.954.740,66	1.407.532.353.790,66	1.406.125.600.660,67	504,51%
Peralatan dan Mesin	423.116.294.018,52	431.617.701.612,95	465.582.422.128,95	450.933.961.838,04	478.905.670.917,44	8,19%
Bangunan Gedung	1.689.117.576.725,42	1.622.047.450.945,46	1.646.343.602.774,08	1.737.854.602.512,08	1.764.653.239.504,08	3,28%
Jalan, Jembatan dan Jaringan	3.831.108.234.521,84	2.550.312.458.893,74	2.584.495.718.951,74	2.657.672.127.419,11	2.750.590.871.978,60	-30,03%
Aset Tetap Lainnya	22.490.208.738,00	22.879.520.463,00	22.906.520.463,00	21.422.085.223,00	21.225.842.975,00	-4,97%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	401.944.073.863,00	174.766.101.513,00	723.558.879.233,00	40.864.047.203,00	38.344.681.833,00	-89,99%
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	-	-	-	-	(2.166.052.171.454,35)	20,30%
DANA CADANGAN	-	-	-	-		
Dana Cadangan	-	-	-	-		
ASET LAINNYA	170.097.910.119,14	145.635.446.614,18	145.538.896.395,12	126.122.307.587,33	173.006.807.093,83	-19,76%
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-		
TPTGR	86.850.000,00	74.850.000,00	62.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00	-41,45%
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-		
Aset Tidak Berwujud	11.850.145.135,76	7.061.299.033,74	6.132.985.713,88	4.561.537.353,25	4.356.993.908,03	-61,95%
Akumulasi Amortisasi Aset tidak terwujud	-4.573.894.486,94	-	-	-		-100,00%
Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusnya	-	-	-	-		
Aset Lain-Lain	406.111.707.586,64	138.148.550.075,44	139.174.098.181,24	121.509.920.334,08	168.598.963.185,80	-67,53%
Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	-243.779.799.856,32	-	-	-		-100,00%



URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
ternak bergulir	402.901.740,00	350.747.500,00	168.962.500,00	-		-100,00%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.359.454.379.542,42	4.994.135.623.518,90	4.840.095.778.151,28	4.921.225.759.723,33	4.828.120.654.139,19	-8,61%
KEWAJIBAN	266.312.370.844,88	96.051.612.180,89	5.690.251.576,51	19.030.166.602,10	27.565.970.897,68	-92,16%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	266.312.370.844,88	96.051.612.180,89	5.690.251.576,51	19.030.166.602,10	27.565.970.897,68	-92,16%
Utang PFK	1.241.466.593,74	350.428.870,30	415.130,39	-		-100,00%
Utang Bunga	-	-	-	-		
Pendapatan diterima di muka	308.012.954,21	273.148.344,72	17.038.882,80	109.973.530,15	92.793.566,29	-65,78%
Utang Pajak	-	-	-	-	-	
Utang Langganan	-	-	-	-		
utang beban	19.842.929.805,00	5.862.321.286,30	4.005.359.882,30	8.913.994.162,93	5.083.307.647,39	-60,96%
Utang kepada pihak ketiga/rekanan	-	-	-	-		
Utang pengadaan aset tetap/kepada pihak ketiga	-	-	-	-		
Utang Lain-lain	244.919.941.491,93	89.565.613.679,57	1.667.437.681,02	10.006.198.909,02	22.389.869.684,00	-95,00%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-		
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-		
Utang Luar Negeri	-	-	-	-		
EKUITAS	5.093.142.008.697,54	4.898.104.011.338,01	4.834.405.526.574,77	4.902.195.593.121,23	4.800.554.683.241,51	-4,25%

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)



1) Analisis Rasio Neraca Daerah

Analisis rasio keuangan daerah merupakan analisis yang membandingkan besaran atau nilai yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada sub bab ini analisis rasio keuangan daerah yang akan dibahas adalah analisis rasio keuangan daerah terkait laporan neraca daerah.

Tabel 3. 3
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	-116.770.096.322	50.036.178.073	193.046.691.490	306.815.642.565	216.761.511.364
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (Current Ratio)	0,56	1,52	34,93	17,12	8,86
Rasio Quick (Quick Ratio)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	0,05	0,019	0,001	0,004	0,006
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,052	0,02	0,001	0,004	0,006
Rasio Kas	0,38	0,313	8,208	5,153	3,696

Sumber : Analisis diolah, (2021).

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar



kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Besaran nilai belanja tidak langsung sebagai realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur daerah Kabupaten Malinau menunjukkan besaran yang semakin menurun dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, dengan penurunan sebesar 68,76 persen di tahun 2020. Hasil perhitungan dapat di lihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malinau

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	TA 2016	931.205.172.812	1.279.013.113.765	72,81%
2	TA 2017	796.050.981.426	1.217.315.038.608	65,39%
3	TA 2018	892.240.769.314	1.085.056.237.833	82,23%



No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
4	TA 2019	936.938.745.462	1.350.505.651.279	69,38%
5	TA 2020	940.227.025.204	1.367.393.979.731	68,76%

Sumber : Analisis diolah, (2021).

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Malinau Tahun 2016–2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. Defisit riil yang terjadi ditutup dengan penerimaan pembiayaan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.487.638.369.990	1.315.703.866.960	1.355.203.634.062	1.471.740.961.276	1.462.543.440.959
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.258.606.307.496	1.125.307.832.568	1.064.237.806.883	1.112.522.203.738	1.130.771.445.085
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	000	000	2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000
	Defisit Riil	229.032.062.494	190.396.034.392	288.965.827.179	159.218.757.538	178.771.995.874

Sumber : Analisis diolah, (2021).

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026

Perhitungan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Malinau berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah, pembangunan di Kabupaten Malinau masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Maka dari itu anggaran di



analisis untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 3. 6
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
4	Pendapatan	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2,81	65.233.155.830	67.621.601.190	70.097.637.854	71.605.858.017	72.873.209.435
4.1.01	Pajak Daerah	3,22	10.846.710.000	11.250.207.612	11.668.715.335	12.102.791.546	12.310.959.560
4.1.02	Retribusi Daerah	3,59	1.753.946.500	1.816.913.179	1.882.140.362	1.949.709.202	2.019.703.762
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,02	3.325.430.716	3.467.426.608	3.615.485.724	3.769.866.964	3.893.141.614
4.1.04	Lain - Lain Pedapatan Yang Sah	2,61	49.307.068.614	51.087.053.791	52.931.296.433	53.783.490.305	54.649.404.499
4.2	Pendapatan Transfer	1,51	1.274.739.670.786	1.321.948.229.511	1.336.988.313.503	1.345.949.350.048	1.353.435.084.560
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,21	1.216.456.171.800	1.250.607.938.341	1.263.147.302.148	1.270.587.004.925	1.276.517.582.105
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,08	1.045.310.522.800	1.072.171.484.693	1.082.462.549.185	1.087.625.624.075	1.091.250.887.855
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (Dbh)	2,05	152.466.811.000	155.973.547.653	159.560.939.249	163.230.840.852	165.352.841.783
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	0,78	780.635.100.000	799.994.850.480	803.834.825.762	804.477.893.623	805.121.475.938
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	0,72	63.553.479.800	64.964.367.051	65.107.288.659	65.250.524.694	65.394.075.848
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	3,29	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Did)	0	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	2	171.145.649.000	178.436.453.647	180.684.752.963	182.961.380.851	185.266.694.249
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,18	58.283.498.986	71.340.291.170	73.841.011.354	75.362.345.123	76.917.502.455
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,56	45.712.198.986	51.842.204.870	54.128.446.105	55.432.941.656	56.768.875.550



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12,52	12.571.300.000	19.498.086.300	19.712.565.249	19.929.403.467	20.148.626.905
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	0	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
5	Belanja Daerah	1,56	1.350.428.226.616	1.401.525.230.701	1.419.041.351.357	1.429.510.608.065	1.438.263.693.995
5.1	Belanja Operasi	1,54	715.148.266.323	745.148.266.323	753.148.266.323	756.340.895.143	760.288.667.675
5.1.1	Belanja Pegawai	1,24	572.183.674.386	591.683.674.386	598.683.674.386	601.876.303.206	602.824.075.738
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	3,06	109.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	123.353.366.477
5.1.4	Belanja Subsidi	8,78	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	0	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590
5.2	Belanja Modal	1,97	309.500.575.293	320.806.774.731	327.574.596.071	332.574.596.071	334.574.596.071
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,92	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2	70.054.121.924	75.054.121.924	75.821.943.264	75.821.943.264	75.821.943.264
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1,75	125.138.354.553	125.138.354.553	130.138.354.553	134.138.354.553	134.138.354.553
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1,15	106.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	111.739.268.016



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,76	4.568.830.800	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238
5.3	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
5.3.1	Belanja Bantuan Keuangan	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
6	Pembiayaan Daerah	0	(3.000.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
	Total Penerimaan Anggaran	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
	Dikurangi					
6	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	589.405.230.464	657.043.681.345	660.958.170.182	660.958.170.182	666.543.018.120
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	764.022.996.152	745.981.549.356	759.583.181.175	770.052.437.883	773.220.675.875

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau 2021-2026

No		Uraian	Proyeksi Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Pendapatan	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
		PRIORITAS 1					
1		Belanja Pegawai	575.183.674.386	593.183.674.386	600.183.674.386	603.376.303.206	604.324.075.738
2		Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
3		Penyertaan modal	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		PRIORITAS 2					
1		Belanja Bersumber dana DAK	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287
2		Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Urusan Pemerintah	326.335.392.084	339.296.550.201	339.296.550.201	350.922.261.881	354.243.167.872



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

	Daerah					
	PRIORITAS 3					
1	Belanja Hibah	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870
2	Belanja Bantuan Sosial	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590
3	Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
	Surplus Anggaran Riil	45.863.417.686	55.124.871.498	60.171.916.832	52.839.335.761	53.802.300.389

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malinau. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Malinau. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Malinau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability) pembangunan di Kabupaten Malinau.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Malinau merupakan evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Malinau



dapat meliputi aspek kondisi wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek layanan umum serta yang tak bisa diabaikan adalah aspek keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia dan deskripsi tentang empat aspek pembangunan tersebut teridentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Malinau sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kondisi Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, Sesayap, Sembakung dan Sebuku, dimana sebagian besar wilayah berada di ketinggian > 300 m dpl, bergunung dan berbukit dengan kelerengan yang umumnya terjal. Pada wilayah yang demikian terbentang Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan kawasan dengan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan ikon Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan kawasan secara alami dan juga berpemandangan indah, yang penting secara nasional dan internasional serta mempunyai nilai dalam pemanfaatan ilmiah (ilmu pengetahuan), rekreasi/pariwisata dan juga pendidikan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Malinau adalah bagaimana dapat mempertahankan kelestarian ekosistemnya agar dapat menyangga perikehidupan wilayah sekitarnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara perlahan dari waktu ke waktu Pemerintah Kabupaten Malinau dihadapkan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, seperti degradasi hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan lainnya. Dimana permasalahan lingkungan hidup tersebut berdampak langsung pada penurunan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Malinau (Lihat Tabel 4.1), khususnya jika ditinjau berdasarkan tutupan hutannya.

Dalam hal kependudukan (demografi) Kabupaten Malinau masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan: (1) pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan berada di atas



pertumbuhan penduduk nasional dan Kalimantan Utara; (2) ketimpangan jenis rasio jenis kelamin, dimana penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya; dan (3) rendahnya tingkat kepadatan penduduk, dimana penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan (Lihat Tabel 4.1).

Tabel 4. 1
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kondisi Wilayah

Aspek Kondisi Wilayah		Permasalahan
1.	Geografi	1. Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup yang mengancam peran sebagai kabupaten penyangga lingkungan hidup wilayah sekitarnya 2. Penurunan daya dukung lingkungan hidup
2.	Demografi	1. Tingginya pertumbuhan penduduk 2. Ketimpangan rasio jenis kelamin 3. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fakta menunjukan bahwa dari waktu ke waktu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan baik ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Tetapi hal ini bukan berarti tantangan pembangunan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat ini telah terselesaikan, karena pada kenyataannya masih ada masyarakat miskin, menganggur, timpang pendapatannya dan tidak semua angkatan kerja bekerja. Sementara jika dilihat pertumbuhannya, Kabupaten Malinau masih dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Permasalahan-permasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini disajikan pada Tabel 4.2.



Tabel 4. 2
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek
Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat		Permasalahan
1.	IPM	Kemampuan masyarakat untuk mengakses/memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan masih berada pada batas bawah level kesejahteraan tinggi
2.	Indeks Gini	Distribusi tingkat ketimpangan pendapatan berada pada batas bawah ketimpangan rendah (0,289)
3.	Kemiskinan	Masih adanya penduduk berstatus miskin akibat keterisolasian (> 6.000 jiwa)
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK cenderung fluktuatif (dari 100 penduduk Kabupaten Malinau terdapat 69 s/d 75 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja).
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Masih adanya pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara
7.	PDRB	PDRB bertumpu pada sumber daya alam tak dapat pulih
8.	Inflasi	Belum terkendalnya tingkat inflasi.

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Layanan Umum

Pelayanan umum yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, layanan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup dan lain-lain merupakan sesuatu yang sifatnya *urgent* bagi masyarakat, yang kemudian mendukung capaian kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan layanan umum ini Pemerintah Kabupaten Malinau telah menunjukkan kinerja yang cukup berhasil. Tetapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aspek layanan umum ini harus terus mendapatkan perhatian untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.



Permasalahan berkenaan dengan layanan umum ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Layanan Umum

Aspek Layanan Umum		Permasalahan
1	Pendidikan	• APS, APK dan APM yang masih berfluktuatif • Adanya penduduk usia sekolah yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan
2	Kesehatan	Masih adanya kasus gizi buruk, kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian dalam kelahiran
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Infrastruktur yang belum memadai (optimal)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum tuntasnya permasalahan permukiman kumuh
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum maksimalnya jaminan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	Belum terselesaikannya penanganan sosial PMKS, fakir miskin dan KAT
7	Tenaga Kerja	Belum tuntasnya penanganan pengangguran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan belum menunjukkan kemajuan signifikan
9	Ketahanan Pangan	Belum maksimalnya jaminan ketersediaan pangan utama
10	Lingkungan Hidup	Masih minimnya penanganan kualitas lingkungan hidup
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian dan kartu keluarga
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih adanya cakupan sasaran kepesertaan KB baru dan layanan KB aktif yang belum terdata atau dilaporkan
13	Perhubungan	Kecenderungan peningkatan arus kedatangan dan keberangkatan orang
14	Komunikasi dan Informatika	Fasilitas teknologi informasi belum tersedia di seluruh desa
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kemampuan koperasi dalam manajemen masih rendah
16	Penanaman Modal	Masih rendahnya nilai investasi
17	Kepemudaan dan Olahraga	Rendah prestasi organisasi kepemudaan dan olah raga
18	Statistik	Kecukupan data dan validitas data untuk perencanaan pembangunan masih belum terpenuhi
19	Persandian	Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
20	Perpustakaan dan kearsipan	Masih kurangnya (belum optimalnya) layanan perpustakaan dengan model <i>hybrid library</i>
21	Pariwisata	• Rendahnya kunjungan wisata



Aspek Layanan Umum		Permasalahan
		• Belum memadainya fasilitas wisata daerah
22	Pertanian	Rendahnya produktifitas tanaman pangan
23	Kelautan dan Perikanan	Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap
24	Kehutanan	Degradasi dan rendahnya reboisasi- rehabilitasi hutan dan lahan
25	Perindustrian dan Perdagangan	Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi industri kecil dan rumah tangga
26	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Belum primanya tata kelola pemerintahan

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.4. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Malinau ditinjau berdasarkan daya saing ekonomi, infrastruktur dan kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dan menjadi permasalahan penting yang harus mendapat perhatian. Hal ini mengingat: (1) daya saing ekonominya masih bertumpu pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian dalam arti luas; (2) daya saing infrastrukturnya masih rendah, khususnya jika dilihat dari infrastruktur jalan, ketenagalistrikan dan jaringan air; dan (3) daya saing SDM yang masih rendah, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas (Lihat Tabel 4.4).

Tabel 4. 4
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah		Permasalahan
1	Ekonomi Daerah	Daya saing ekonomi daerah bertumpu pada sektor primer
2	Infrastruktur	Rendahnya daya saing infrastruktur (jalan, jembatan, listrik dan air), infrastuktur pencegah dan pengendalian banjir
3	Iklim berinvestasi	Masih adanya gejolak dan konflik sosial di masyarakat yang perlu untuk diselesaikan
4	Perijinan	Pelayanan perijinan masih terbatas jenis dan jumlahnya
5	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya daya saing SDM

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Keuangan Daerah



Permasalahan pembangunan Kabupaten Malinau ditinjau berdasarkan aspek keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Keuangan Daerah

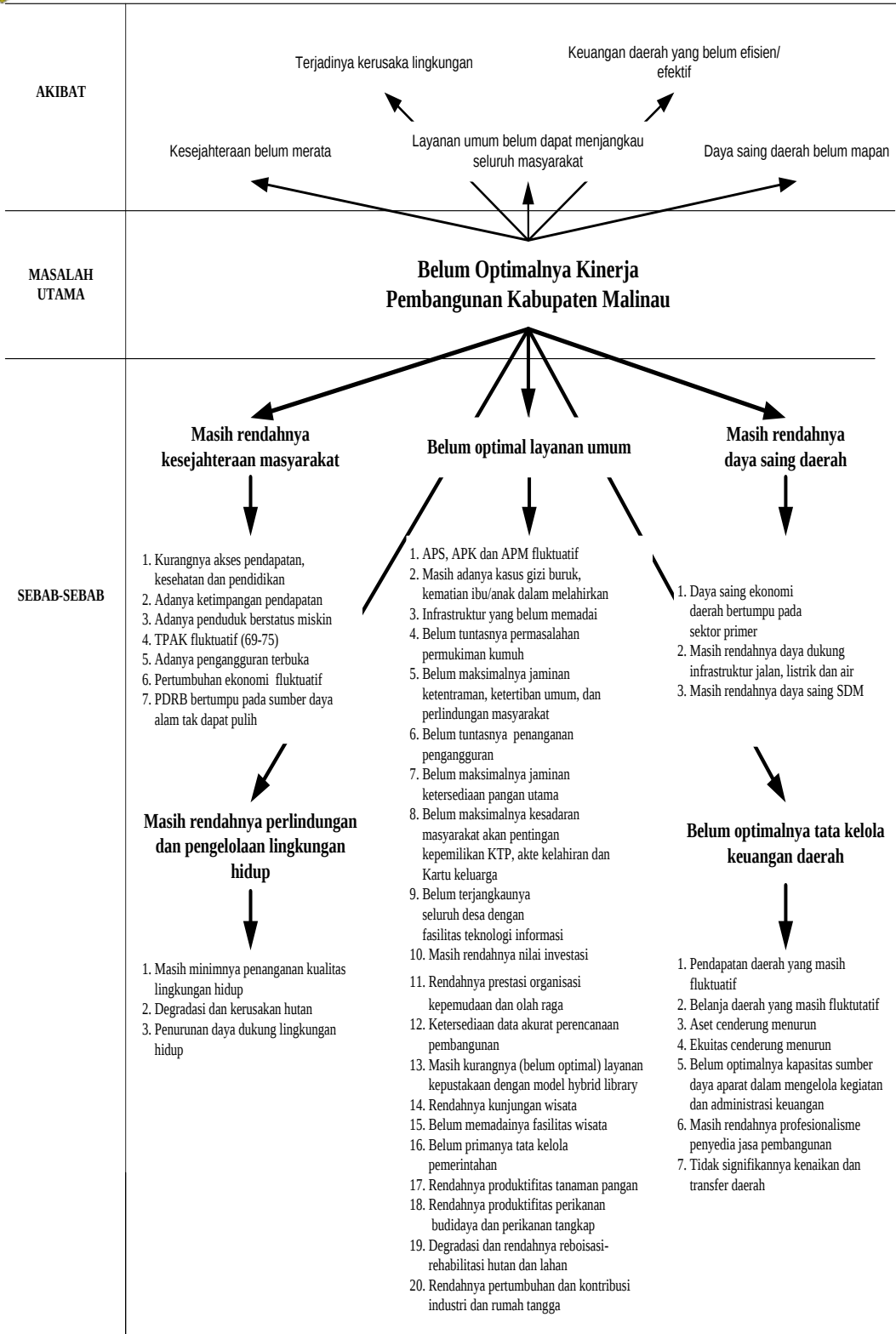
Aspek Keuangan Daerah		Permasalahan
1	Pendapatan daerah	Pendapatan daerah yang cenderung fluktuatif
2	Belanja daerah	Belanja yang cenderung fluktuatif
3	Aset	Aset yang cenderung meningkat
4	Ekuitas	Ekuitas yang cenderung menurun
5	Pengelolaan pendapatan daerah	a. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola kegiatan dan administrasi keuangan b. Masih rendahnya profesionalisme penyedia jasa pembangunan
6	Belanja daerah	Tidak signifikannya kenaikan realisasi transfer

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan pada berbagai urusan pemerintahan serta memperhatikan masukan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) teridentifikasi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kabupaten Malinau, yaitu:

- (1) Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Belum optimal layanan umum;
- (3) Masih rendahnya daya saing daerah;
- (4) Masih rendahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 5) Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah.

Secara lebih lengkap permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Malinau, sebab-sebab permasalahan pembangunan dan akibat yang terjadi adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Pohon Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malinau

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang, karena isu strategis dapat menjadi dasar bagi perumusan visi,

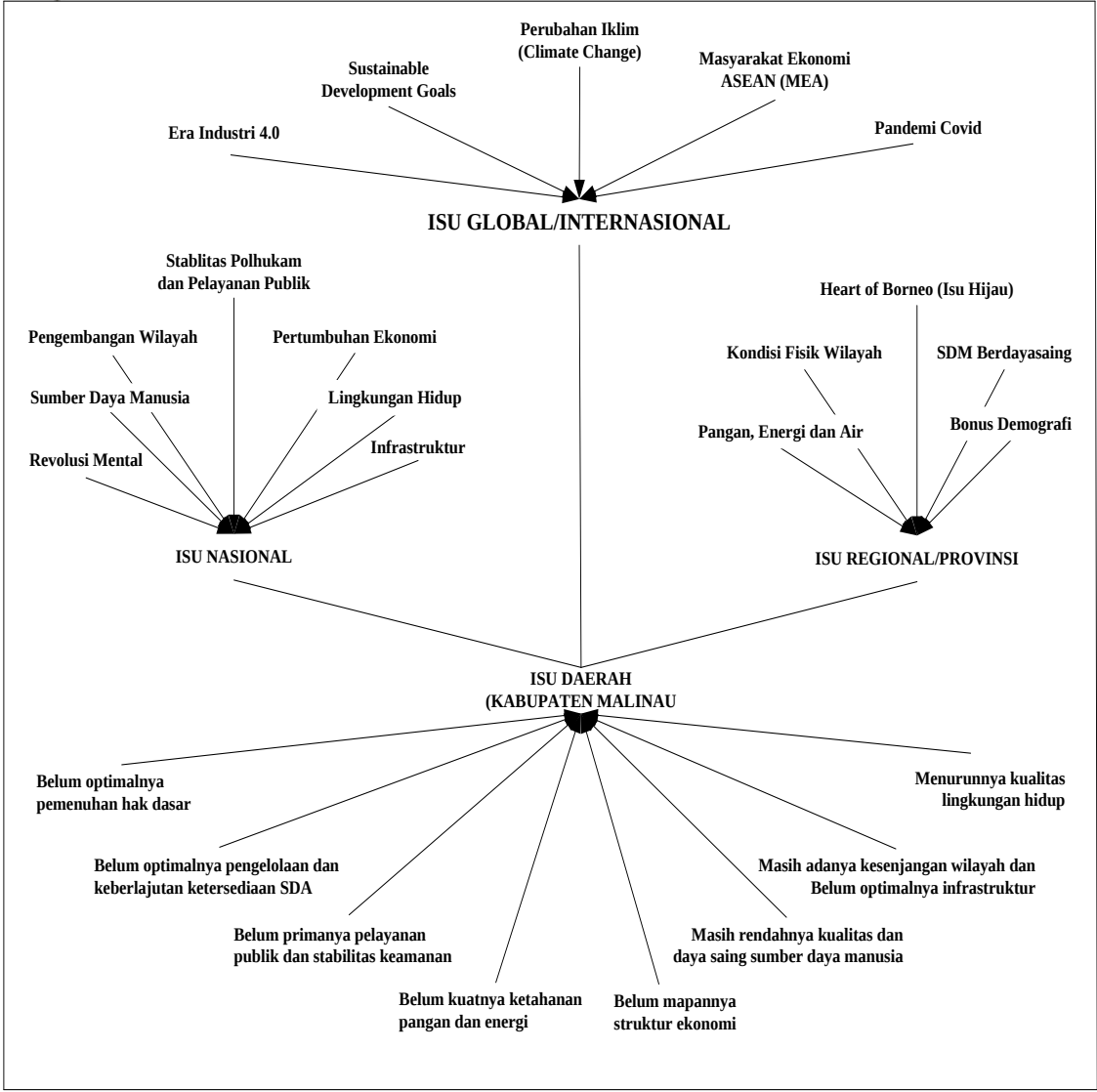


misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan melalui identifikasi berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang dapat memberi pengaruh krusial terhadap pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun 5 (lima) tahun ke depan.

Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan diterimanya (*acceptability*) prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara bertanggungjawab. Selain itu, dengan pemahaman atas isu-isu strategis diharapkan pemerintah/lembaga/organisasi dapat memiliki kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kondisi perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam hal rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Malinau, identifikasi isu-isu strategis dimaksudkan untuk dapat mengarah kepada fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis dimaksud mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan pada isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun, jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran tidak dapat direalisasikan.

Secara umum isu-isu strategis tersebut dapat diilustrasikan dengan Gambar 4.2. yang diuraikan secara rinci pada bagian selanjutnya.



Gambar 4. 2 Ilustrasi Isu-isu Strategis Global, Nasional dan Daerah

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

Selanjutnya isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Malinau dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu yang berkembang baik yang terjadi di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun yang terjadi di Kabupaten Malinau sendiri (daerah). Berkenaan dengan isu strategis tersebut diuraikan pada bagian berikut.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kesepakatan pembangunan global yang dimulai tahun 2016. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 berisi seperangkat tujuan



transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Adapun SDGs tersebut memiliki 17 Tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
- 11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan



memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan
- 17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs yang menekankan kepada pembahasan-pembahasan indikator-indikator pembangunan untuk mengatasi berbagai isu-isu strategis, meliputi: (1) kemiskinan; (2) ketahanan pangan; (3) gizi; (4) kehidupan yang sehat; (5) pendidikan yang inklusif; (6) kesetaraan gender; (7) ketersediaan air; (8) sanitasi; (9) energi; (10) pertumbuhan ekonomi; (12) infrastruktur; (13) kesenjangan antar wilayah; (14) pemukiman; (15) pola produksi dan konsumsi; (16) perubahan iklim; (17) kelestarian sumber daya laut; (18) penggunaan ekosistem darat berkelanjutan; (19) kedamaian masyarakat; dan (20) kemitraan global. Isu-isu tersebut saat ini dan di masa mendatang diyakini menjadi isu yang dihadapi oleh banyak negara dan daerah di dunia ini serta masih akan menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Apalagi bagi Kabupaten Malinau yang memiliki kawasan hutan serta keberadaannya yang merupakan wilayah hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara wajib untuk memberikan perhatian kepada isu SDGs tersebut.

4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Indonesia merupakan satu diantara beberapa negara yang menjadi anggota organisasi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang sudah menyepakati pelaksanaan MEA pada tahun 2015. Implikasi dari kesepakatan ini adalah kesiapan bangsa Indonesia dalam bersaing dengan bangsa lain anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Oleh karenanya, seluruh anak bangsa Indonesia harus menggali segala potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan meningkatkan daya saing.



Sebagaimana diketahui satu bidang yang menjadi fokus adalah bidang ekonomi. Saat ini beberapa negara ASEAN menunjukkan perkembangan signifikan, sebagai contoh Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang kini tidak hanya sekadar sebagai konsumen, melainkan juga menjadi produsen bagi negara-negara lain. Hal ini adalah nilai yang positif tentunya. Keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara-negara ASEAN dalam menggagas kerja sama dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggota. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan dari MEA itu sendiri, yakni: (1) Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (*production base*) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan; (2) Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce*, dan pengembangan infrastruktur; (3) Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan (4) Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global.

Dari ke 4 (empat) tujuan MEA sebagaimana disebut diatas, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 telah menelaah dan berkomitmen akan memasukan program yang sesuai untuk mendukung terlaksananya tujuan MEA di daerah ini.

4.2.1.3 Perubahan Iklim

Dalam beberapa dekade terakhir ini perubahan iklim (*climate change*) menjadi permasalahan bagi banyak negara di dunia.



Perubahan iklim ini merupakan akibat dari emisi gas rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi, sebagai akibatnya terjadi berbagai gangguan terhadap berbagai sendi kehidupan seperti produktivitas pertaniannya, transportasi, industri dan lain-lain, yang selanjutnya berdampak pada kegagalan perekonomian negara dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak lanjutannya adalah kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara yang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan memicu konflik.

Saat ini, perubahan iklim bukan lagi merupakan suatu isu melainkan suatu fenomena yang berdampak nyata di kehidupan manusia, diantaranya kelangkaan sumber daya alam (penurunan produksi pangan dan ketersediaan air), kerusakan habitat flora dan fauna, gangguan kesehatan, serta peningkatan bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim memiliki multiplayer dampak, perubahan iklim pada faktanya tidak hanya berpengaruh pada persoalan iklim dan sumberdaya alam, melainkan juga berpengaruh pada dinamika suatu komunitas baik dalam bentuk negara maupun kelompok adat. Bencana kekeringan dan instabilitas pangan nasional di Afrika menjadi salah satu contohnya.

Kabupaten Malinau sebagai salah satu kabupaten konservasi hutan di Indonesia telah berkontribusi terhadap isu perubahan iklim ini. Bahkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini terus ditingkatkan dan diperluas terutama hutan yang terletak pada kawasan Heart of Borneo (HoB) di Kabupaten Malinau. Selain itu, melalui kegiatan ini kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan HoB terus meningkat kesejahteraannya.

4.2.1.4 Era Industri 4.0

Saat ini dunia telah memasuki era baru revolusi industri keempat, di mana kekuatannya ditopang oleh revolusi industri ketiga dan pesatnya kemajuan bidang informasi teknologi. Revolusi industri ke empat ini ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita melihat suatu area baru yang terdiri dari tiga bidang ilmu independen: fisika, kimia, digital dan biologi.



Dimana dunia kini memperoleh internet dengan interkoneksi yang begitu cepat. Tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya bahwa kita bisa menjeleajahi dunia maya dengan menggunakan komputer. Selain itu, kita sekarang dapat melihat berbagai hal seperti: (1) otomatisasi terjadi pada pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara masal; (2) data yang masif baik jenis maupun jumlahnya yang saat ini dikenal sebagai “big data”; dan (3) sarana logistik yang terorganisasi dengan begitu baik.

Revolusi industri keempat bahkan menjadi fokus utama perdebatan pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum, WEF) pada tanggal 20-23 Januari 2016 di Davos, Swiss. Terdapat tiga hal yang membedakan revolusi industri keempat dibanding revolusi industri sebelumnya, yaitu: *Pertama*, inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan secara lebih cepat dari sebelumnya. *Kedua*, penurunan biaya produksi dan munculnya berbagai *platform* yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan yang menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola yang terbukti meningkatkan output pekerjaan. *Ketiga*, revolusi industri keempat ini berpengaruh global yang berarti terjadi dan terbentuk di hampir semua Negara/daerah di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada semua bidang industri, dan bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.

Oleh karenanya, revolusi industri keempat ini harus menjadi isu strategis dunia yang patut menjadi perhatian dalam kerangka pembangunan diberbagai belahan dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Mengapa demikian, karena revolusi industri keempat mempunyai potensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau, karena dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Telah diakui bahwa perkembangan revolusi industri keempat memberikan tawaran dan kesempatan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Banyak pakar berpendapat bahwa revolusi industri keempat dapat menaikkan rata-rata pendapatan



per kapita di dunia, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memperpanjang usia hidup manusia, dimana terlihat sekali teknologi yang dihasilkan di era ini telah memberikan kemudahan dalam kehidupan bagi penggunanya. Tetapi, revolusi industri ini juga dapat menyebabkan marjinalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, meningkatkan konflik dan menciptakan risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia di wilayah ini.

4.2.1.5 Pandemi Covid-19 Dan Ekonomi Global

Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara membuat perekonomian global semakin terpuruk. Bahkan banyak lembaga keuangan menyebut kondisi ini merupakan yang terparah sepanjang 90 tahun terakhir dan berpotensi terjadinya resiko resesi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, Jerman dan Inggris diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Jepang juga masuk dalam daftar negara yang ekonominya akan memburuk akibat dampak Corona. Di sisi lain, kondisi ini juga diikuti oleh terganggunya perdagangan global karena terdampak *corona virus*.

Saat ini berbagai negara harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi pandemi covid-19 yang telah menelan ratusan ribu korban jiwa dan jutaan orang yang diputus hubungan kerjanya. Ini artinya telah terjadi krisis kesehatan, yang diikuti krisis ekonomi dan pasar keuangan. Akibatnya semakin berkurangnya investasi yang kemudian menimbulkan masalah mendalam bagi para pelaku bisnis. Akhirnya untuk menyembuhkan luka tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat harus berupaya bekerja sama untuk menekan penyebaran virus sampai ditemukannya vaksin bagi virus korona. Hal ini bermakna pemerintah juga dihadapkan pada persoalan bantuan kepada pekerja dan kepada pengusaha.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Berbagai isu dihadapi Indonesia dalam pembangunan, isu tersebut antara lain adalah: (1) ketersediaan sumber daya alam (SDA) sebagai modal utama pembangunan makin berkurang,



dimana saat kondisinya makin berkurang. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa; (2) Masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), masih adanya ketimpangan pendapatan, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (terutama Pulau Jawa), terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; (3) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) belum optimalnya infrastruktur layanan dasar, ekonomi, energi dan ketenagalistrikan serta infrastruktur transformasi digital; (5) melemahnya ideologi dan belum kuatnya karakter bangsa; (6) penurunan kualitas lingkungan hidup; (7) masih perlunya pengembangan demokrasi; (8) belum mapannya tata kelola pemerintahan; (9) stabilitas politik hukum dan keamanan; dan (10) lain-lain. Berkenaan dengan isu strategis nasional ini secara rinci disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6
Isu Strategis Nasional Berdasarkan Agenda Pembangunan
2020-2024

Isu Strategis Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan
1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat
4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
Isu Strategis Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1. Masih adanya ketimpangan antarwilayah dengan ciri: a. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) b. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392 c. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa d. Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan e. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal,



desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 3:**Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas Dan Berdaya Saing**

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk.
3. Pemenuhan Layanan Dasar.
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
5. Pengentasan Kemiskinan.
6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 4:**Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan**

1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama.
5. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan.
6. Belum Optimalnya Peran Keluarga.
7. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 5:**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
 - b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
 - c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan.
 - d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
 - e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
 - f. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi
 - a. Konektivitas Jalan.
 - b. Konektivitas Kereta Api.
 - c. Konektivitas Laut.
 - d. Konektivitas Udara.
 - e. Konektivitas Darat.
 - f. Transportasi Perkotaan.
 - g. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan.
 - h. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan.
 - i. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan.
 - j. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
3. Energi dan Ketenagalistrikan
 - a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
4. Transformasi Digital
 - a. Penuntasan Infrastruktur TIK.
 - b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK.
 - c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 6:**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - a. Deplisi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup..
-



-
- b. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
-
- 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
 - a. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia.
 - b. Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi.
 - c. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim.
 - d. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah.
-
- 3. Pembangunan Rendah Karbon
 - a. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon.
 - b. Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon.
-
- Isu Strategis Agenda Pembangunan 7:**
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
-
- 1 Konsolidasi Demokrasi
 - a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
 - b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.
 - c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.
-
- 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - a. Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi yang meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi.
 - b. Belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan-Selatan.
 - c. Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosialbudaya.
 - d. Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total.
-
- 3 Penegakan Hukum Nasional
 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - a. Profesionalitas ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian, baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik.
 - b. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS).
 - c. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dengan mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.
 - d. Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.
-
- 4 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
 - a. Dinamika Ancaman Pertahanan.
 - b. Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal.
 - c. Dinamika Ancaman Siber.
 - d. Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika.
 - e. Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan.
 - f. Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat.
 - g. Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut.
 - h. Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam.
-

Sumber: RPJMN 2020-2024 (2020)



4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penyelarasan antara isu strategis dan misi kepala daerah terpilih yang di laksanakan dalam Rapat Koordinasi Gubernur menghasilkan kesepakatan isu strategis RPJMD tahun 2021-2026 adalah:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
2. Masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
6. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malinau dianalisis berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan disinkronisasikan dengan isu-isu strategis yang ada di ranah internasional, nasional dan provinsi. Hasil analisis isu-isu strategis yang juga memperhatikan berbagai masukan dari diskusi terfokus para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan selanjutnya perlu tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 yang dikelompokan berdasarkan aspek penting dalam agenda pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).
- 2) Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air



bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.

- 4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer).
- 6) Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- 8) Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

4.2.5 Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Malinau terdapat beberapa rekomendasi yang tersaji dalam tabel di bawah ini.



Tabel 4.7
Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD 2021-2026

No TPB	No Indikator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
Pilar Sosial					
TPB 01	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Ketenagakerjaan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Program	1. Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan 2. Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan 3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
TPB 03	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan dan P2KB	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupate	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan khusus terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait jaminan kesehatan
TPB 05	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Lingkungan					
TPB 11	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Malinau	1. Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 3. Pengembangan system peringatan dini (early warning system) bencana
				2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan Bencana 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapan bencana 4. Pengelolaan resiko bencana tingkat kabupaten 5. Penguatan kapasitas kawasan untuk



No TPB	No Indikator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
					pengecegan dan kesiapsiagaan bencana 6. Penanganan pascabencana 7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana
Pilar Hukum dan Tata Kelola					
TPB 16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 2. Advokasi kebijakan dan pedampingan peningkatan partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
				2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pedampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Ekonomi					
TPB 17	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 6. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan



No TPB	No Indikator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
					Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi 7. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026



4.3 SASARAN DAN ARAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya terkait dengan isu-isu strategis yang ada di wilayah ini, maka pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok (utama) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8 pada kolom **“Sasaran Pokok Pembangunan”**. Selanjutnya mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arahan pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.8 pada kolom **“Arahan Pembangunan”**.

Tabel 4. 7
Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS 1: <i>Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih)</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai pengelolaan SDA yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS 2: <i>Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Berkembang dan semakin mantapnya ekonomi lokal dalam rangka transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor ekonomi sekunder maupun tersier yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor primer dan industri pengolahan untuk penguatan kewirausahaan UMKM, dan koperasi yang berdayasaing
ISU STRATEGIS 3: <i>Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi,</i>	



<i>lingkungan hidup dan kawasan permukiman</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pendapatan, penurunan kemiskinan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan gizi serta sistem perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
ISU STRATEGIS 4: <i>Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya daya saing SDM melalui peningkatan Kesehatan dan Pendidikan penduduk	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
ISU STRATEGIS 5: <i>Belum optimalnya infrastruktur dan adanya kesenjangan antar wilayah</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan
ISU STRATEGIS 6: <i>Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi</i>	
Meningkatnya akses dan ketersediaan pangan dan energi	Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan dan energi
ISU STRATEGIS 7: <i>Menurunnya kualitas lingkungan hidup</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ISU STRATEGIS 8: <i>Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban keamanan melalui pemantapan reformasi birokrasi

**BAB 5****VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada:

- 1) Keinginan yang kuat untuk mewujudkan cita/harapan masyarakat dan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat.
- 2) Visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 -2025.
- 3) Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan memiliki cita-cita atau harapan masa depan yang lebih baik. Dimana cita-cita dan harapan tersebut disalurkan aspirasinya melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Sedangkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat merupakan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku bermasyarakat. Oleh karenanya cita-cita, harapan dan nilai-nilai luhur tersebut adalah keinginan akan perubahan kehidupan masyarakat yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Kabupaten Malinau.

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan adalah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Malinau, selanjutnya Visi RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 tersebut mendasari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026, yang didukung oleh Misi RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu, mandiri dan berakhlak mulia.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.



- 3) Mendorong pemerataan pembangunan di segala bidang.
- 4) Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dengan membuka peluang berinvestasi, baik luar maupun dalam.
- 5) Mewujudkan Daerah Perbatasan menjadi daerah yang layak huni, produktif dan mandiri, dan berfungsi sebagai halaman depan wilayah NKRI.
- 6) Meningkatkan peranan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten terdepan dalam Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pelestarian Lingkungan.
- 7) Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan meningkatkan mutu aparatur pemerintah yang bertaqwa kepada Tuhan YME, kreatif, inovatif, produktif, cerdas, sehat dan berdisiplin.

Sedangkan, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2020 menunjukkan masih ditemukan beberapa indikator tujuan dan sasaran yang capaiannya tidak sebagaimana yang ditargetkan. selain itu, capaian kinerja yang tinggi harus terus dapat dipertahankan, atau bahkan semakin ditingkatkan. Oleh karenanya capaian kinerja pembangunan dimasa yang akan datang harus diproyeksikan secara benar dengan mempertimbangan berbagai aspek pendukungnya, dengan harapan proyeksi capaian pembangunan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera.

5.1 VISI

Memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat, visi dan misi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025, capaian kinerja pembangunan daerah serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis daerah, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah:



**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI,
DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”**

Visi tersebut memiliki substansi nilai-nilai (*values*) atau pokok-pokok visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. Adapun nilai-nilai atau pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visi dan Penjabarannya

Nilai-Nilai / Pokok-pokok Visi	Penjabaran
Kabupaten Malinau yang Mandiri	Bermakna: 1.Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau. 2.Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). 3.Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau yang Damai	Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana



	masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.
Kabupaten Malinau yang Sejahtera	Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (<i>Rule of law</i>) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

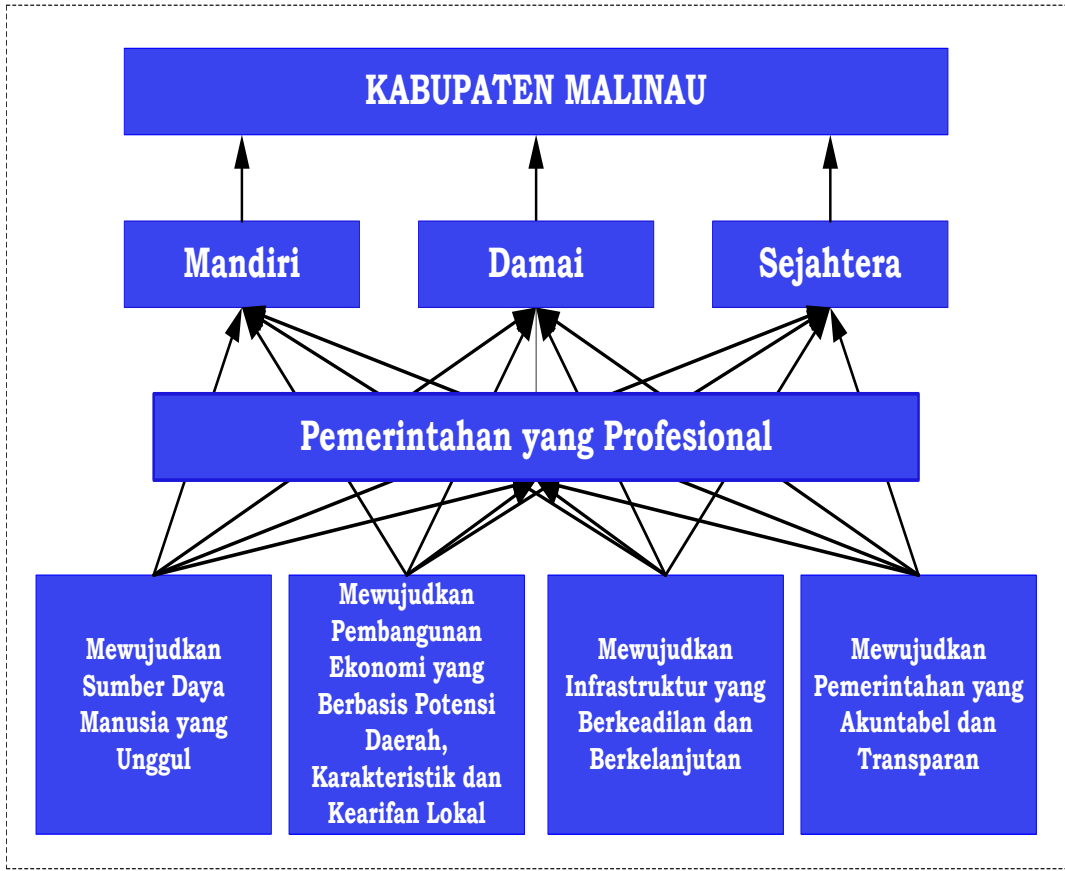
5.2 MISI

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;** melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.
- 2) **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal;** melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.
- 3) **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;** membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.
- 4) **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;** melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026, sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahanan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun



keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2.



Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026
Visi: Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul											
	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,94	72,52	72,85	73,18	73,51	73,84	74,17	74,17
	Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	persen	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	72,38
	Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	9,39	9,07	9,37	9,67	9,97	10,27	10,57	10,57
	Sasaran 3. Meningkatkan Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,08	4,14	4,24-5,14	4,35-5,25	4,44-5,34	4,55-5,45	4,64-5,54	4,64-5,54
	Sasaran 4. Meningkatkan	Indeks Ketahanan	poin	70,78	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Ketahanan Pangan	Pangan (IKP)									
	Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,65	2,7	2,75	2,78	2,8	2,82	2,85	2,85
	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Teneteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Resiko Bencana	poin	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
	Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	poin	81,36	82,36	83,36	84,36	85,36	86,36	87,36	87,36
	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama	poin	78		79,25	80,6	81,7	82,8	83,3	83,3
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	poin	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
MISI 2:											



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal	Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB	persen	-0,62	2,0-4,0	3,0-5,0	5,28	5,54	5,86	6,17	6,17
		2. Indeks Gini	poin	0,289	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	0,278
		3. Angka Kemiskinan	persen	6,63	7,30	6,5-6,75	6-6,5	5,5-6,5	5,5-6	5,5-6	5,5-6
		4. Laju Inflasi	persen	1,32	0,39	0,36	0,33	0,3	0,27	0,24	0,24
	Sasaran 1. Meningkatkan produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	1. Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB	persen	3,79	4,8	4,82	4,9	4,92	4,95	5	5
		2. Nilai Tukar Petani	poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	103,9
		3. Nilai Tukar Peternak	poin	103,11	103,15	103,2	103,25	103,3	103,35	103,4	104,4
		4. Nilai Tukar Nelayan	poin	102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	103,05
	Sasaran 2. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan	1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	persen	2,56%	2,60%	2,70%	2,70%	2,80%	3,00%	3,00%	0,03
		2. Kontribusi Pariwisata	persen	1.82%	1.82%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Karakteristik Wilayah	Terhadap PDRB									
	Sasaran 3. Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Koperasi Berkualitas	persen	65%	66%	70%	72%	74%	75%	80%	80%
		2. Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	persen	52,50%	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%	100%
	Sasaran 4. Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94.000.000.000
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan											
	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	N/A	3,5-4,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
	Sasaran 1. Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	49,70%	45,10%	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%	64,4%
		2. Persentase Daerah/Wilayah Banjir	persen	1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Lingkungan	3. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	persen	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
		4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	87%
		5. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92
	Sasaran 2. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	1. Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
		2. Rasio Rumah Layak Huni	rasio	4:05	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09
	Sasaran 3. Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 4. Berkembangnya Dukungan Sistem	Persentase Layanan Publik Yang	persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Informasi Pelayanan Publik	Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi									
	Tujuan 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	rasio	78,77	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35
	Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	poin	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
		3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan											
	Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)	Indeks RB	poin	CC	B	B	B	B	B	BB	BB
	Sasaran 1. Meningkatnya	1. Predikat SAKIP	poin	N/A	B	B	B	B	B	BB	BB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2. Nilai LPPD	poin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	C	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Desa)	persen	8,26	11,93	13,76	15,59	17,74	19,22	21,05	21,05

Sumber : data diolah 2021



5.4. **PENYELARASAN VISI DAN MISI RPJMD DENGAN VISI DAN MISI RPJMN DAN RPJMD KALTARA**

Keselarasan visi dan misi RPJMN dan RPJMD merupakan cerminan kesamaan harapan/keinginan dan langkah-langkah atas apa yang ingin dicapai. Memperhatikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMN dan yang dinyatakan dalam RPJMD Kabupaten Malinau, jelas diantara keduanya memiliki keselarasan. Keselarasan dalam visi tersebut terlihat pada cita-cita untuk Mandiri, Damai dan Sejahtera atau mandiri dan berdaulat. Sedangkan keselarasan dalam misi terlihat pada langkah-langkah yang sama untuk: (1) meningkatkan kualitas SDM; (2) meningkatkan perekonomian; (3) membangun infrastruktur; dan (4) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keselarasan visi dan misi tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan 5.4.

Tabel 5.3

Visi RPJMD Kabupaten Malinau dan Visi dalam RPJMN

Visi RPJMD	Visi RPJMN
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Tabel 5.4

Misi RPJMD Kabupaten Malinau dan Misi dalam RPJMN

Misi RPJMD	Misi RPJMN
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 3. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal	4. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	5. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 6. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 9. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan



Misi RPJMD	Misi RPJMN
	Terpercaya

Tabel 5.5
Visi RPJMD Kabupaten Malinau dan Visi dalam RPJMD Kalimantan Utara

Visi RPJMD Kab. Malinau	Visi RPJMD Kaltara
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju Dan Sejahtera

Tabel 5.6
Misi RPJMD Kabupaten Malinau dan Misi dalam RPJMD Kalimantan Utara

Misi RPJMD Kab. Malinau	Misi RPJMD Kaltara
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan 7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal	4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota



Misi RPJMD Kab. Malinau	Misi RPJMD Kaltara
	10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdaya-an Koperasi dan UMKM 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional (13)Mewujudkan pembangunan yang berbasis-kan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan 8. MewujudkanketahananEnergi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja



BAB STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6

Dalam upaya merealisasikan visi, tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang dicanangkan dalam pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program-program pendukungnya, secara terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Malinau periode RPJMD tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain: (1) pengkajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya; (2) pengkajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan; (3) pengkajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) pengkajian lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi daerah; (5) mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki; dan (6) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

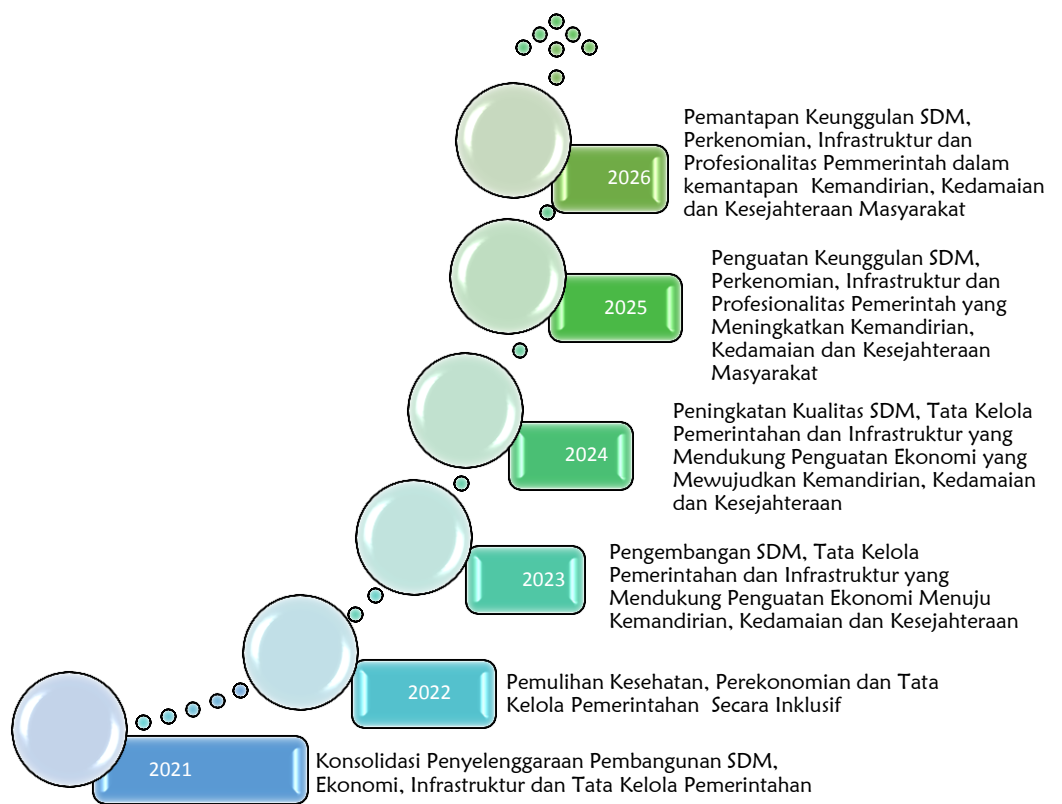
Di sisi lain, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah terpilih guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021–2026 yang rancang untuk dapat



mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1.

Arah kebijakan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan panduan yang mengarahkan perumusan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran setiap tahapan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. Penekanan tema/fokus setiap tahun selama periode RPJMD harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1

Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau sebagaimana sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1, maka



tahapan pembangunan secara berturut-turut dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah Tahap Konsolidasi (tahap 1 tahun 2021), Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 (tahap II tahun 2022), Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap III tahun 2023), Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap IV tahun 2024), Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap V tahun 2025) dan Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap VI tahun 2026). Secara rinci berkenaan dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Konsolidasi

Tahun 2021 merupakan tahapan I atau “Tahapan Konsolidasi”, dimana tahun 2021 merupakan masa transisi pemerintahan Kabupaten Malinau dari kepala Daerah Periode 2016 – 2021 kepada Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) periode tahun 2021 – 2024. Oleh karenanya, pada awal kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Malinau melakukan konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malinau yang meliputi: (1) penyelenggaraan pembangunan SDM; (2) penyelenggaraan pembangunan ekonomi; (3) penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun non fisik; (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik; (5) lain-lain sesuai urusan daerah. Sehingga tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah “Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan”. Sesuai kondisi, konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia tak terkecuali Kabupaten Malinau sejak tahun 2020 yang lalu. Dimana penyelenggaraan pembangunan bidang SDM, ekonomi, infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2) Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19



Tahun 2022 merupakan tahapan II atau “Tahapan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah “Pemulihan Kesehatan, Perekonomian dan Tata Kelola Pemerintahan Secara Inklusif”. Hal ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020 - 2021. Makna dari tema/fokus pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: Proses pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 perlu dilakukan mengingat dampak pandemi Covid-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan pemerintah sebagai pemain utamanya, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Malinau harus memastikan upaya pembangunan yang menjamin pemulihan kesehatan dan ekonomi, yang dilakukan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan ketahanan pangan; (3) Peningkatan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal; (4) Peningkatan nilai tambah sektor industri, perdagangan dan jasa; (5) Pembangunan infrastruktur pemerataan ekonomi; (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau harus tetap memperhatikan penyelenggaraan pembangunan bidang lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial, peningkatan dukungan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan lain-lain yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kabupaten Malinau.

3) Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahtera

Tahun 2023 merupakan tahapan III atau “Tahapan Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah



“Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, pengembangan berarti pemerintah selalu berusaha secara bertahap dan teratur melaksanakan pembangunan yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pengembangan SDM

Manusia merupakan modal utama pembangunan Kabupaten Malinau untuk menuju pembangunan yang mengikutsertakan semuanya dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) pengembangan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) pengembangan kualitas layanan pendidikan; (3) pengembangan produktivitas tenaga kerja; (4) pengembangan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) pengembangan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) pengembangan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) pengembangan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah Kabupaten Malinau harus terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk dunia usaha yang memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) pengembangan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) pengembangan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) pengembangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) pengembangan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) pengembangan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6)



pengembangan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) pengembangan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) pengembangan cakupan layanan publik; dan (9) pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan infrastruktur yang mampu menciptakan/menuatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeberlanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pengembangan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pengembangan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pengembangan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pengembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pengembangan pelayanan irigasi; (6) Pengembangan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pengembangan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pengembangan rumah layak huni; (9) Pengembangan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pengembangan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pengembangan Penguatan Ekonomi

Pengembangan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong perkembangan ekonomi yang mengarah pada penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pengembangan ekonomi dapat dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berdaya saing melalui: (1) Pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Pengembangan keberdayaan pelaku industri dan sarana



prasarana industri; (3) Pengembangan perizinan dan kestabilan harga; (4) Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Pengembangan perlindungan terhadap konsumen; (6) Pengembangan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Pengembangan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Pengembangan desa wisata budaya; Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif; (9) Pengembangan desa kreatif; (10) Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (11) Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM; dan (12) Pengembangan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

4) Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan tahapan IV atau “Tahapan Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah “Peningkatan Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, peningkatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin menambah/meningkatkan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi peningkatan dalam aspek kualitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan; (3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; (4) Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5)



Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Peningkatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Malinau semakin hadir dalam melindungi segenap warga masyarakat, memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat dunia usaha yang berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Peningkatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Peningkatan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Peningkatan cakupan layanan publik; dan (9) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar. Peningkatan pengembangan infrastruktur yang semakin menciptakan/ menguatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Peningkatan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Peningkatan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Peningkatan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Peningkatan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Peningkatan pelayanan irigasi; (6) Peningkatan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Peningkatan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Peningkatan



rumah layak huni; (9) Peningkatan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan public; (10) Peningkatan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Peningkatan Penguatan Ekonomi

Hasil dari upaya pengembangan inovasi dan kualitas investasi harus terus ditingkatkan untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi yang menguatkan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian ini dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin lebih baik dan semakin berdaya saing melalui: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Peningkatan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Peningkatan perizinan dan kestabilan harga; (4) Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen; (6) Peningkatan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Peningkatan desa wisata budaya; (9) Peningkatan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Peningkatan desa kreatif; (11) Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Peningkatan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

5) Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2025 merupakan tahapan V atau “Tahapan Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah “Penguatan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, penguatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau



secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin berdaya dalam melakukan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi penguatan/keberdayaan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penguatan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya penguatan dalam pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin unggul dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Penguatan layanan kesehatan masyarakat; (2) Penguatan layanan pendidikan; (3) Penguatan produktivitas tenaga kerja; (4) Penguatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Penguatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Penguatan keunggulan perekonomian

Penguatan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.



c. Penguatan Keunggulan Infrastruktur

Penguatan keunggulan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan pemenuhan pelayanan dasar. Penguatan keunggulan infrastruktur yang semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Penguatan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Penguatan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Penguatan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Penguatan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Penguatan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Penguatan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Penguatan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Penguatan keunggulan rumah layak huni; (9) Penguatan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Penguatan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Penguatan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Penguatan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin kuat dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang semakin prima/unggul serta berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Penguatan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Penguatan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Penguatan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi,



dan sumber-sumber lainnya; (6) Penguatan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Penguatan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Penguatan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Penguatan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6) Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2026 merupakan tahapan VI atau “Tahapan Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah “Pemantapan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah dalam kemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, pemantapan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin memperkuat pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi kemantapan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pemantapan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya memperkuat/ memperkuat pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin mantap/kokoh dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Pemantapan layanan kesehatan masyarakat; (2) Pemantapan layanan pendidikan; (3) Pemantapan produktivitas tenaga kerja; (4) Pemantapan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Pemantapan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Pemantapan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.



b. Pemantapan Keunggulan Perekonomian

Pemantapan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang sangat prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Pemantapan Keunggulan Infrastruktur

Pemantapan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pemenuhan pelayanan dasar. Pemantapan keunggulan infrastruktur yang semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/ berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pemantapan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pemantapan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pemantapan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pemantapan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pemantapan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Pemantapan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pemantapan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pemantapan keunggulan rumah layak huni; (9) Pemantapan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pemantapan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan



gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pemantapan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pemantapan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin mantap/kokoh dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang sangat prima/unggul serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah melalui: (1) Pemantapan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Pemantapan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Pemantapan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Pemantapan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Pemantapan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Pemantapan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Pemantapan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau
“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	1. Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan
			2. Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1. Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal
			2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Mengendalikan



			penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
	3. Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja	1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1. Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja
			2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
	4. Meningkatnya ketahanan pangan	2. Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	1. Memperkuat hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
			1. Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
			2. Meningkatkan diversifikasi pangan
2. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber	1. Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	1. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat	3. Meningkatkan penanggulangan kerawanan pangan
			1. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat



daya Manusia		2. Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
	2. Meningkatnya kesetaraan gender	1. Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
			2. Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
	3. Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	1. Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya	1. Menguatkan ideologi pancasila 2. Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal			
1. Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan	1. Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
			2. Meningkatkan produksi dan



Karakteristik Daerah	2. Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah		produktivitas perikanan
		1. Pengembangan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal	1. Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri
		2. Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	1. Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga
			2. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor
			3. Memantapkan perlindungan terhadap konsumen
		3. Peningkatan kunjungan wisata	4. Memperkuat peran jasa konstruksi dan jasa angkutan
			1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan
			2. Mengembangkan desa wisata budaya
			3. Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif



	3. Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	1. Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	4. Mengembangkan desa kreatif
			1. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
	4. Meningkatnya Investasi Daerah	1. Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif	2. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan			
1.	1. Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	1. Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase
			2. Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut
		2. Peningkatan infrastruktur air bersih	1. Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
		3. Peningkatan infrastruktur	1. Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

		perdagangan	tradisional
		4. Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
	2. Meningkatnya kualitas perumahan/ permukiman	1. Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman	1. Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman
			2. Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman
			3. Membangun rumah layak huni
	3. Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisolan daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
	4. Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
2. Mewujudkan Kualitas	1. Meningkatnya kualitas lahan,	1. Perlindungan dan	1. Mengendalikan pencemaran



Lingkungan Hidup	air dan udara	pengelolaan lingkungan hidup	udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
			2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan			
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	1. Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
		2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan berbasis kinerja
			2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

	2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	1. Penyelenggaran pemerintahan yang bersih	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
		2. Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	1. Meningkatkan WBK dan WBBM
	3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya	1. Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya
	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM 2. Peningkatan akses informasi publik 3. Meningkatkan cakupan layanan publik 4. Menyediakan informasi publik yg akurat dan up to date
	5. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa



6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang merupakan kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten. Kawasan strategis tersebut di Kabupaten Malinau terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Nasional, yang terdiri atas: (1) kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur); dan (2) kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*).
- 2) Kawasan Strategis Provinsi, yang ada di Kabupaten Malinau adalah Long Nawang dan kawasan sekitarnya yang akan dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal perbatasan dan pedalaman.
- 3) Kawasan Strategis Kabupaten, yang terdiri atas: (1) kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi (Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang); (2) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan sosial budaya (pusat pemerintahan Kabupaten Malinau, kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh); (3) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam (pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan); dan (4) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Taman Nasional Kayan Mentarang).

Secara rinci arah kebijakan pembangunan kawasan strategis Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis
Kabupaten Malinau 2021-2026

Kawasan Strategis		Arah Kebijakan	
Kawasan Strategis Nasional	1	Kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur)	1 Meningkatkan keunggulan SDM
			2 Membangun dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur perhubungan, dasar dan teknologi informasi
			3 Meningkatkan kesadaran bela negara
			4 Memfasilitasi kelancaran pelayanan lintas batas negara
			5 Mengembangkan kerjasama lokal perdagangan lintas batas
	2	Kawasan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	1 Mengupayakan peningkatan partisipasi pendanaan pelestarian kawasan <i>Heart of Borneo</i>
			2 Mengembangkan kawasan <i>Heart of Borneo</i> sebagai destinasi wisata alam dan budaya
Kawasan Strategis Provinsi	3	Long Nawang dan kawasan sekitarnya	1 Memfasilitasi pengembangan infrastruktur pemerataan ekonomi
			2 Mengembangkan infrastruktur pedesaan kawasan tertinggal dan pedalaman perbatasan
Kawasan Strategis Kabupaten	4	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi: Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang	1 Mengembangkan infrastruktur ekonomi, perdagangan dan jasa
			2 Mengembangkan ekonomi dan perdagangan lintas batas
			3 Meningkatkan produktifitas kawasan minapolitan dan agropolitan
	5	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya: pusat pemerintahan Kabupaten Malinau dan kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh	1 Mengembangkan infrastruktur perkotaan
			2 Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur warisan budaya
	6	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam: pertambangan batu bara di Kecamatan Malinau Selatan	1 Meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam batu bara
			2 Memperkuat pengawasan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang
	7	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: Taman Nasional	1 Memperkuat konservasi sumber daya hayati
			2 Memfasilitasi investasi sarana prasarana wisata lingkungan



Kawasan Strategis		Arah Kebijakan
	Kayan Mentarang	alam

Selain itu, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa dan wilayah kecamatan.

1) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Dengan memperhatikan program-program yang dicanangkan, meliputi Program Desa Sarjana, Program Milenial Mandiri, Program Rasda PLUS, Program RT Bersih dan Program WM Malinau Maju, maka strategi pembangunan wilayah desa di Kabupaten Malinau secara umum adalah “peningkatan kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa”. Strategi umum tersebut dijabarkan dalam strategi khusus sebagai berikut; (1) pengembangan potensi dan karakteristik keunggulan desa/kelurahan; (2) peningkatan ketahanan pangan; (3) peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim; (4) peningkatan kewirausahaan desa; dan (5) peningkatan konektivitas desa.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa; (2) mengembangkan SDM sesuai kebutuhan desa; (3) meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, kursus, magang); (4) meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi bencana; (5) membangun sarana prasarana dasar dan ekonomi, (6) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal pedesaan.

2) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan meliputi: (1) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (2) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (3)



peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun dan mengembangkan prasarana kewilayahan; (3) membangun dan mengembangkan prasarana dasar; (4) membangun dan mengembangkan prasarana ekonomi; (5) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keunggulan desa; (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau periode tahun 2021 – 2026 sangat ditentukan oleh program-program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik program yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja maupun program yang secara tidak langsung berpengaruh. Program-program tersebut terdiri atas berbagai kegiatan dan sub kegiatan turunan yang lazimnya merupakan tahapan terselesaikannya program. Secara rinci program-program pembangunan Kabupaten Malinau sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.3. Sedangkan keterkaitan program-program pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 diilustrasikan dalam bentuk Gambar 6.2 berikut:

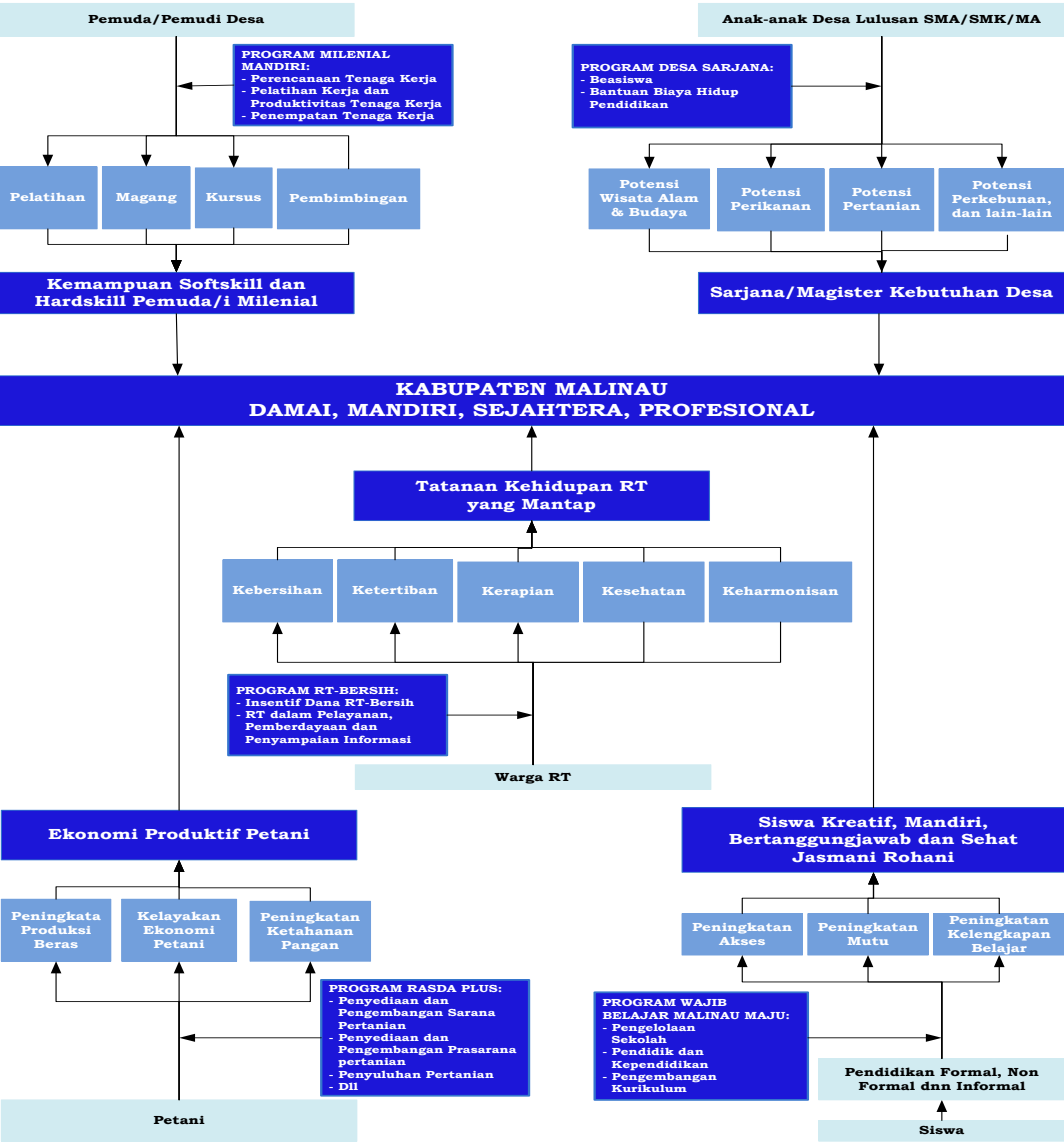


Gambar 6.2

Keterkaitan Program-Program Pembangunan Kabupaten Malinau Dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026



Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu: (1) Program Desa Sarjana; (2) Program Milenial Mandiri; (3) Program Rasda Plus; (4) Program RT-Bersih; dan (5) Program Wajib Belajar Malinau Maju. Alur pikir 5 (lima) program inovasi daerah tersebut dalam dengan visi Malinau periode tahun 2021 – 2026 diilustrasikan dalam bentuk Gambar 6.3.



Gambar 6.3
Ilustrasi Alur Pikir Program Inovasi Daerah



Secara rinci 5 program inovasi daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia pedesaan melalui penciptaan sarjana yang handal, yakni sarjana yang mampu menjadi pioner pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki desanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Malinau memiliki 109 desa yang memiliki potensi dan karakteristik serta permasalahan yang berbeda. Dengan demikian desa mengusulkan kebutuhan sarjana/sarjana terapan/ magister sesuai dengan kebutuhan desanya. Desa yang memiliki ekosistem yang baik dan menarik, desa yang memiliki adat istiadat yang terjaga secara turun temurun, desa yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, desa yang memiliki potensi tanaman perkebunan, desa penghasil ternak dan ikan, desa yang memiliki potensi hasil hutan non kayu yang melimpah, desa dengan karakteristik lahan yang bergunung dan berlereng terjal, desa yang memiliki lahan cenderung landai, dan desa-desa dengan potensi dan karakteristik lainnya tentu menghendaki kehadiran seorang sarjana/sarjana terapan/magister yang handal sesuai dengan kondisi tersebut bagi pengembangannya. Melalui Program Desa Sarjana pembangunan Kabupaten Malinau akan lebih dipercepat, oleh karenanya Program Desa Sarjana akan difasilitasi, dibiayai dan dikontrol oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal melalui skema beasiswa.

2) Program Milenial Mandiri

Program Milienial Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atributif (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hardskill*) bagi kaum muda milenial yang



telah selesai menempuh pendidikan formal, baik pada tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Program ini ingin menjadikan anak-anak (putra-putri) terbaik Kabupaten Malinau yang tersebar di desa-desa untuk menjadi pengelola potensi wilayah/desa, yang selanjutnya putra-putri terbaik tersebut diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional dan bahkan wirausahawan milenial. Program ini direalisasikan melalui fasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat agar kaum milenial mendapatkan pembinaan dan pelatihan/kursus/magang bersertifikat. Program-program yang berkenaan dengan program milenial mandiri ini meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja. Melalui upaya ini diharapkan generasi milenial dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan kerja, berkarakter positif, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan. Pelatihan/kursus/ magang yang harus diikuti oleh putra-putri milenial tersebut akan disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan daerah, seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTA, industri pengolahan, industri kerajinan tangan, seni rupa, industri batik daerah, industri kuliner, seni pertunjukan, industri periklanan, industri wisata dan lain-lain. Program Milenial Mandiri juga merupakan perwujudan “revolusi mental” yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, yaitu mengubah mental generasi milenial agar memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu berkompetisi dan berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

3) Program Rasda PLUS

Program Rasda PLUS dilatarbelakangi oleh keberadaan penduduk Malinau yang tersebar pada desa-desa yang menempati wilayah yang luas dan potensial bagi usaha tani, yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan produksi beras sehingga masyarakat/petani dapat memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri (sendiri); (2) menghidupkan ekonomi masyarakat melalui tanaman pangan (padi)



dan mendidik masyarakat agar tidak bergantung pada beras yang bersumber dari pemerintah; (3) meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dengan ketersediaan pangan yang cukup. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam Program Rasda PLUS adalah kemampuan memberikan nilai ekonomi produktif bagi para petani di Kabupaten Malinau. Program Rasda PLUS ini dilaksanakan melalui: (1) penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; (2) penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan (3) penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Dimana secara teknis kegiatannya meliputi: (1) perluasan lahan pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi lahan pangan potensial (lahan tidur); (2) peningkatan bantuan sarana prasarana (bibit unggul padi, alat pertanian, pupuk, jalan usaha tani, irigasi, dll); (3) pemberian insentif jaminan penghasilan; (4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan; (5) legalisasi dan perlindungan lahan pangan. Melalui Program Rasda PLUS ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk membeli beras yang dihasilkan petani Malinau yang selanjutnya di distribusikan kepada keluarga sasaran. Pelaksananya secara operasional dilakukan oleh BUMD Intimung Kabupaten Malinau. Oleh karenanya, program ini diharapkan dapat mendorong petani untuk mengolah lahan yang mereka miliki untuk dioptimalkan pemanfaatannya bagi tanaman pangan, sehingga produktivitas lahan dan produksi gabah/beras yang dihasilkan dapat semakin meningkat dan mencukupi konsumsi rumah tangga dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.

4) Program RT-Bersih

Program RT-Bersih merupakan program pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan menerapkan nilai-nilai filosofi Kerapian (Rapi), Ketertiban (Tertib), Kebersihan (Bersih), Kesehatan (Sehat), Keindahan (Indah) dan Keharmonisan (Harmonis) yang disingkat menjadi **RT-BERSIH**. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan dan membangun, sehingga peran warga RT (masyarakat) dalam pembangunan Kabupaten Malinau semakin meningkat. Sasaran utama program ini adalah mantapnya tatanan kehidupan bermasyarakat ditinjau berdasarkan kerapian, ketertiban, kebersihan, Kesehatan, keindahan dan keharmonisannya. Agar



program RT-Bersih ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, maka insentif yang diberikan kepada RT senilai Rp 260 jt, pemberiannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam pengelolaan dana ini pihak RT (Ketua dan Pengurus RT) yang merupakan *supporting line* atau *second opinion* dan sebagai lembaga yang paling dekat dengan warga serta paling mengetahui persoalan warga, sekaligus sebagai ujung tombak pelayanan, pemberdayaan dan penyampaian informasi kepada warga diberi hak penuh untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi) dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing RT. Harapannya dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kondisi RT yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki RT sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, program RT-Bersih ini dilaksanakan dengan adanya fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain yang kompeten.

5) Program Wajib Belajar Malinau Maju

Program Wajib Belajar Malinau Maju merupakan program pengembangan dari program wajib belajar. Program ini merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan serta penyiapan kelengkapan peralatan belajar siswa, terutama anak-anak generasi penerus bangsa yang berada di jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Program ini juga akan menekankan pada pemberian insentif pendidikan seperti insentif buku, baju, sepatu yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta didik. Namun demikian ditargetkan program ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga pembiayaan pendidikan dapat sekaligus memajukan Kabupaten Malinau. Insentif pendidikan tersebut harus mampu menumbuhkan usaha/industri disekitar



dunia pendidikan tersebut, seperti usaha/industri kecil sepatu, usaha/industri kecil pakaian/baju, maupun terbitnya buku-buku muatan lokal yang memiliki HaKI, sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Malinau.

Program-program inovatif tersebut operasionalisasinya melalui berbagai program-program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, dimana berbagai program tersebut direncanakan untuk dapat menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malinau juga harus tetap memperhatikan urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, misalnya urusan yang berkenaan dengan bidang Pendidikan tingkat SLTA, ketenagalistrikan, pertambangan, kehutanan, Daerah Otonom Baru (DOB) dan lain-lain, namun karena urusan tersebut juga menyangkut hajat hidup masyarakat Malinau, maka Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen memberi perhatian terhadap urusan-urusan tersebut melalui upaya koordinasi, fasilitasi maupun mediasi.

Dalam hal masyarakat di wilayah-wilayah 3T di Kabupaten Malinau belum dapat terlayani listrik, maka pemerintah daerah akan berupaya mengkoordinasikan dan memfasilitasi agar daerah-daerah tersebut dapat teraliri listrik, misalnya fasilitasi pengembangan PLTS, PLMH, PLTD oleh PLN atau memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTA Mentarang yang dicanangkan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi melalui investasi pihak swasta. Dalam hal, terjadi konflik usaha pertambangan dengan masyarakat lokal, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat lokal Kabupaten Malinau harus hadir sebagai fasilitator ataupun mediator dalam penanganan konflik tersebut. Demikian seterusnya untuk urusan-urusan lainnya yang bukan kewenangan kabupaten.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Malinau Tahun 2022 – 2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mandiri	MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL															
1.1	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,52	72,85		73,18		73,51		73,84		74,17		74,17		
1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,84	71,94		72,05		72,16		72,27		72,38		72,38		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar	89,5%	89,5%	53.434.598.4 00	89,5%	56.995.830.0 00	94,7%	60.465.830.00 0	95%	59.011.830.00 0	100%	60.174.830.00 0	100%	290.082.918.4 00	DINKES PPKB
		Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
		Cakupan Faskes Yg Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Ketersediaan Sdmk Sesuai	81%	81%	16.530.200.0 00	81%	25.289.060.0 00	81%	25.120.060.00 0	81%	25.120.060.00 0	81%	26.220.060.00 0	81%	118.279.440.0 00	DINKES PPKB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Manusia Kesehatan	Standar Di Faskes														
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100%	-	-	-	-	-	198.000.000	100%	548.000.000	100%	198.000.000	100%	944.000.000	DINKES PPKB
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM	100%	100%	480.000.000	100%	2.255.860.00 0	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	9.503.440.000	DINKES PPKB
1.1.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Angka)	9,07	9,37		9,67		9,97		10,27		10,57		10,57		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100%	100%	91.906.099.6 01	100%	99.839.656.6 01	100%	104.926.137.6 01	100%	106.754.859.6 01	100%	109.297.967.6 01	100%	512.724.721.0 05	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah	100%	100%	29.200.000.0 00	100%	28.313.552.8 04	100%	28.010.581.75 0	100%	28.330.645.75 0	100%	28.317.301.75 0	100%	142.172.082.0 54	DINAS PENDIDIKAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.1.3	Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,14	4,24-5,14		4,35-5,25		4,44-5,34		4,55-5,45		4,64-5,54		4,64-5,54		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100.000.000		-			100%	150.000.000		-	100%	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja	100%	100%	1.130.000.00 0	100%	1.480.000.00 0	100%	1.565.000.000	100%	1.865.000.000	100%	2.085.000.000	100%	8.125.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan	100%	100%	584.952.000	100%	599.055.000	100%	800.000.000	100%	581.000.000	100%	455.000.000	100%	3.020.007.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Peresentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Strutur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	-	100%	950.000.000	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	830.000.000	100%	675.000.000	100%	4.280.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
1.1.4	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Ikp)	72,21	73,65		75,09		76,52		77,96		79,4		79,4		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Infrastruktur Pendukung	0	1 Dokumen Perencanaan	50.000.000	1 Unit	207.922.632	0	-	0	-	0	-	1 Unit	257.922.632	DINAS KETAHANAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kemandirian Pangan Dalam Kondisi Baik		Gudang												PANGAN
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4%	4%	895.000.000	6%	662.028.623	6%	843.731.749	8%	766.323.219	8%	687.707.116	8%	3.854.790.708	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	7%	125.000.000	7%	126.950.000	7%	128.930.420	7%	130.941.735	8%	132.984.426	8%	644.806.580	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	57,50%	57,50%	50.000.000	57,50%	50.780.000	57,50%	51.572.168	57,50%	52.376.694	57,50%	53.193.770	57,50%	257.922.632	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.2	Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	2,7	2,75		2,78		2,8		2,82		2,85		2,85		
1.2.1.1	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman	100	100		100		100		100		100		100		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti		100%	739.872.550	100%	715.000.000	100%	764.000.000	100%	615.000.000	100%	805.000.000	100%	3.638.872.550	SATPOL PP
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	148.050.000	KECAMATAN MALINAU KOTA
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.994.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.994.000	KECAMATAN MALINAU UTARA DAN PERWAKILAN MALTARA TIMUR
		Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100%	100%	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	KECAMATAN MENTARANG
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	45 Kali	45 Kali	38.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	214.000.000	KECAMATAN MENTARANG HULU
		Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100%	100%	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	KECAMATAN BAHAU HULU
1.2.1.2		Indeks Resiko Bencana	124,4	124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		
1.05.03	Program Penanggulangan	Persentase Pelayanan Dalam		100%	1.124.000.00	100%	1.141.534.40	100%	1.159.342.336	100%	1.177.428.077	100%	1.195.795.955	100%	5.798.100.768	BPBD



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bencana	Rangka Pencegahan, Mitigasi Dan Penyelamatan Serta Evakuasi Korban Bencana			0		0									
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana		100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	DPPPAS
1.05.04	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kecamatan yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran		100%	150.000.000	100%	55.097.600	100%	125.000.000	100%	921.311.600	100%	125.000.000	100%	1.376.409.200	SATPOL PP
1.2.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangun Gender	82,36	83,36		84,36		85,36		86,36		87,36		87,36		
2.08.02	Program Pengarus-tamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarus-tamaan Gender	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	DPPPAS
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.150.000.000	DPPPAS
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data	Persentase Sistem Data Gender Dan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Gender Dan Anak	Anak														
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	290.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	810.000.000	DPPPAS
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	180.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.380.000.000	DPPPAS
1.2.3.1	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama (Poin)		79,25		80,6		81,7		82,8		83,3		83,3		
1.2.3.2		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	77,5	78,5		79,5		80,5		81,5		82,5		82,5		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	KESBANGPOL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau		100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	675.000.000	KESBANGPOL



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Budaya Politik															
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama		100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	KESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat		100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	KESBANGPOL
Mandiri- Sejahtera	MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL															
2.1	Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB (%)	2,0-4,0	3,0-5,0		5,28		5,54		5,86		6,17		6,17		
		2. Indeks Gini (Poin)	0,287	0,285		0,283		0,282		0,28		0,278		0,278		
		3. Angka Kemiskinan	6,63	7,30	6,5-6,75		6-6,5		5,5-6,5		5,5-6		5,5-6			
		4. Laju Inflasi	0,39	0,36		0,33		0,3		0,27		0,24		0,24		
2.1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor	1. Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Tnp, Holti, Ternak,	4,8	4,82		4,9		4,92		4,95		5		5		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	Perikanan) Terhadap Pdrb (%)														
2.1.1.2		2. Nilai Tukar Petani (Poin)	103,59	103,65		103,7		103,8		103,85		103,9		103,9		
2.1.1.3		3. Nilai Tukar Peternak (Poin)	103,15	103,2		103,25		103,3		103,35		103,4		104,4		
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	1.233.708.800	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.633.708.800	DISPERTAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	1.107.220.000	100%	5.025.000.000	100%	4.875.000.000	100%	4.925.000.000	100%	4.975.000.000	100%	20.907.220.000	DISPERTAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	490.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.790.000.000	DISPERTAN
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	-	-	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	DISPERTAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	49.396.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	449.396.000	DISPERTAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.27.07	Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan	100%	100%	2.097.075.200	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	2.997.075.200	DISPERTAN
2.1.1.4		4. Nilai Tukar Nelayan (Poin)	102,8	102,91		102,95		102,99		1103,02		103,05		103,05		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	68 Ton	70 Ton	475.000.000	72 Ton	525.000.000	74 Ton	525.000.000	76 Ton	525.000.000	78 Ton	555.000.000	370 Ton	2.605.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	175 Ton	184 Ton	913.940.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	5.763.940.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		8 Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	100.000.000	DINAS PERIKANAN
2.1.2.1	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,60%	2,70%		2,70%		2,80%		3,00%		3,00%		0,03		
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri	100%	100%	3.180.864.003	100%	2.247.716.783	100%	2.272.668.003	100%	2.683.668.003	100%	1.165.168.003	100%	11.550.084.795	DISPERINDAG



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	80%	80%	340.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	360.000.000	100%	1.735.000.000	DISPERINDAG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0%	0%	335.000.000	100%	899.951.220	100%	511.902.500	100%	505.000.000	100%	2.148.500.000	100%	4.400.353.720	DISPERINDAG
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi	100%	100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%	77.500.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	407.500.000	DISPERINDAG
2.1.2.2		2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1.82%	1.84%		1.84%		1.85%		1.85%		1.86%		1.86%		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	548.000.000	100%	630.000.000	100%	380.000.000	100%	1.080.000.000	100%	530.000.000	100%	3.168.000.000	DISBUDPAR
2.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	430.000.000	100%	540.000.000	100%	385.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	1.880.000.000	DISBUDPAR
2.1.3.1	Sasaran 3. Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Koperasi Berkualitas	66%	70%		72%		74%		75%		80%		80%		
2.1.3.2		2. Pesentase Peningkatan Usaha	55,40%	70,60%		73,30%		76,60%		83,30%		100%		100%		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Mikro Dan Kecil (%)														
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlinsungan Hak Kekayaan Intelektual	100%		-	100%	220.000.000		-		-		-	100%	220.000.000	DISBUDPAR
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	65.000.000	100%	210.000.000	100%	175.000.000	100%	240.000.000	100%	365.000.000	100%	1.055.000.000	DISBUDPAR
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100%	100%	850.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.850.000.000	DPPPAS
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100%	100%	680.300.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	3.401.300.000	DPMD
2.17.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan	100%	100%	390.304.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	790.304.000	DISPERINDAG
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil	Prosentase UMKM yang Diberdayakan	5%	5,0%	1.209.808.000	2,50%	891.000.000	4,70%	1.294.097.500	3,70%	895.000.000	3,10%	750.000.000	19%	5.039.905.500	DISPERINDAG



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Dan Usaha Mikro (UMKM)															
2.1.4.	Sasaran 4. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.050.000. 000	80.500.000.0 00		91.100.000.0 00		92.000.000.0 00		93.000.000.0 00		94.000.000.0 00		940000000 00		DPMPTSP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100%	100%	429.232.000	100%	435.928.019	100%	442.728.496	100%	449.635.061	100%	456.649.368	100%	2.214.172.944	DPMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100%	100%	293.756.000	100%	298.338.594	100%	302.992.677	100%	307.719.361	100%	312.519.783	100%	1.515.326.415	DPMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Perizinan	78,60%	78,66%	334.200.000	78,70%	339.413.520	78,75%	344.708.371	78,8%	350.085.822	78,85%	355.547.160	78,90%	1.723.954.873	DPMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	-0,02%	0,01%	572.627.000	0,01%	194.227.406	0,01%	197.257.354	0,01%	200.334.569	0,01%	203.459.788	0.03%	1.367.906.117	DPMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100%	100%	85.000.000	100%	86.326.000	100%	87.672.686	100%	89.040.379,50	100%	90.429.409	100%	438.468.474,5 2	DPMPTSP
Sejahtera	MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN															
3.1	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)(Poin)	3,5-4,5	3,7		3,8		3,9		4		4,1		4,1		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Dasar															
3.1.1.1	Sasaran 1. Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	45,10%	50,0%		52,1%		54,8%		59,6%		64,4%		64,4%		
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	100,00%	0,53%	44.509.081.1 00	0,54%	44.000.000.0 00	0,56%	45.317.823.02 4	0,58%	45.546.957.01 1	0,60%	45.733.699.53 4	0,60%	225.107.560.6 69	DPUPR PERKIM
3.1.1.2		2. Persentase Daerah/Wilayah Banjir (%)	1,24%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Di Kawasan- Kawasan Pusat Layanan		-	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	DPUPR PERKIM
3.1.1.3		3. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	100%	100%	1.070.000.00 0	100%	3.740.000.00 0	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	16.030.000.00 0	DISHUB
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	290.000.000	DISHUB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.1.1.4		4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	62%	67%		72%		77%		82%		87%		87%		
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	100%	56,40%	9.697.625.400	65,80%	1.100.000.000	66%	800.000.000	66,20%	800.000.000	66,40%	800.000.000	66,80%	13.197.625.400	DPUPR PERKIM
3.1.1.5		5. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	27,3	28,01		30,34		32,46		34,69		36,92		36,92		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	100%	10,45%	4.925.000.000	10,67%	7.000.000.000	10,97%	7.210.000.000	11,28%	7.282.100.000	11,59%	7.311.956.610	11,59%	33.729.056.610	DPUPR PERKIM
3.1.2.1	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman	1. Pesentase Pemukiman Yang Layak	76	77		79		80		81		81,97		81,97		
3.1.2.2		2. Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	4:05	7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Di Tangani	100%	0,58%		0,88%	1.100.000.000	1,18%	1.050.000.000	1,48%	850.000.000	1,78%	950.000.000	1,78%	3.950.000.000	DPUPR PERKIM



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Atau Warga Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	0%	55,30%		55,80%	350.000.000	56,10%	350.000.000	56,50%	350.000.000	56,70%	350.000.000	56,70%	1.400.000.000	
3.1.3	Sasaran 3. Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani Tik	100	100		100		100		100		100		100		
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100%	100%	1.172.223.400	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.572.223.400	DISKOMINFO
3.1.4	Sasaran 4. Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	78,18	78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100%	100%	4.783.312.600	100%	3.596.772.000	100%	3.496.772.000	100%	3.477.536.000	100%	3.367.536.000	100%	18.721.928.600	DISKOMINFO
3.2	Tujuan 4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)	78,95	79,03		79,11		79,19		79,27		79,35		79,35		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.2.1.1	Sasaran 1. Meningkannya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100		100		100		100		100		100		
3.2.1.2		2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,55	53,65		53,75		53,85		53,95		54,05		54,05		
3.2.1.3		3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,15	91,25		91,36		91,47		91,58		91,68		91,68		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 Poin	79,15 Poin	350.000.000	79,52 Poin	1.190.000.00 0	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,446 Poin	5.110.000.000	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota	85%	86%	9.170.000.00 0	87%	9.600.000.00 0	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	47.570.000.00 0	DLH
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	21,20%	5.083.349.20 0	21,30%	2.100.000.00 0	21,50%	1.600.000.000	21,80%	1.100.000.000	22%	700.000.000	22,15%	10.583.349.20 0	DPUPR PERKIM
Mandiri – Profesional	MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN															
4.1	Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Indeks Rb	Cc	B		B		B		B		BB		BB		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Daerah Yang Baik (Good Governance)															
4.1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Predikat Sakip	B	B		B		B		B		BB		BB		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	100%	100%	1.535.094.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.510.789.503	100%	7.342.437.503	BAPPEDA DAN LITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	100%	2.724.997.900	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.404.999.205	100%	8.044.994.720	BAPPEDA DAN LITBANG
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	1.250.000.000	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	261.773.489	100%	2.318.723.974	BAPPEDA DAN LITBANG
4.1.1.2		2. Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100%	100%	2.678.910.800	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.698.910.800	INSPEKTORAT
4.02.02	Program Dukungan	Persentase Unit Kerja Yang	100%	100%	15.021.484.7	100%	15.244.521.8	100%	15.244.521.80	100%	16.019.521.80	100%	16.327.579.40	100%	77.857.629.58	SEKRETARIAT DPRD



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Mendapat Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur			80		00		0		0		0		0	KABUPATEN MALINAU
4.1.2	Sasaran 2. Terselenggarany a Pemerintahan Yang Transparan	1. Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	-	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.400.000.00 0	100%	1.200.000.00 0	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.200.000.000	BPKD
4.1.3	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4%-6%	4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100%	100%	2.500.000.00 0	100%	1.750.000.00 0	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	9.400.000.000	BPKD
4.1.4	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		Bb		Bb		Bb		Bb		Bb		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pendampingan Yang Diilaksanakan	100%	100%	1.086.566.85 0	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.586.566.850	INSPEKTORAT
4.1.5	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan	Persentase Peningkatan Status Desa	11,93%	13,76%		15,59%		17,74%		19,22%		21,05%		21,05%		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Berbasis Desa	Mandiri														
2.13.02	Program Penataan Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.450.000.000	DPMD
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase Desa Yang Melakukan Kerjasama Antara Desa	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik	100%	100%	1.115.000.000	100%	1.515.000.000	100%	1.275.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.780.000.000	DPMD

Sumber data diolah 2021





KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DANPROGRAM

PERANGKAT DAERAH

BAB

7

7.1. Kerangka Pendanaan

7.1.1 Perkiraan Belanja Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada langsung selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja langsung tersebut termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja. Perkiraan alokasi belanja tersebut bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 selama lima (5) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2022- 2026 (Dalam Rp.)

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	TAHUN			
					2024	2025	2026	
4	Pendapatan	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2,81	65.233.155.830	67.621.601.190	70.097.637.854	71.605.858.017	72.873.209.435	
4.1.01	Pajak Daerah	3,22	10.846.710.000	11.250.207.612	11.668.715.335	12.102.791.546	12.310.959.560	
4.1.02	Retribusi Daerah	3,59	1.753.946.500	1.816.913.179	1.882.140.362	1.949.709.202	2.019.703.762	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,02	3.325.430.716	3.467.426.608	3.615.485.724	3.769.866.964	3.893.141.614	
4.1.04	Lain - Lain Pad Yang Sah	2,61	49.307.068.614	51.087.053.791	52.931.296.433	53.783.490.305	54.649.404.499	
4.2	Pendapatan Transfer	1,51	1.274.739.670.786	1.321.948.229.511	1.336.988.313.503	1.345.949.350.048	1.353.435.084.560	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,21	1.216.456.171.800	1.250.607.938.341	1.263.147.302.148	1.270.587.004.925	1.276.517.582.105	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,08	1.045.310.522.800	1.072.171.484.693	1.082.462.549.185	1.087.625.624.075	1.091.250.887.855	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (Dbh)	2,05	152.466.811.000	155.973.547.653	159.560.939.249	163.230.840.852	165.352.841.783	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	0,78	780.635.100.000	799.994.850.480	803.834.825.762	804.477.893.623	805.121.475.938	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	0,72	63.553.479.800	64.964.367.051	65.107.288.659	65.250.524.694	65.394.075.848	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	3,29	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Did)	0	-	-	-	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	2	171.145.649.000	178.436.453.647	180.684.752.963	182.961.380.851	185.266.694.249	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,18	58.283.498.986	71.340.291.170	73.841.011.354	75.362.345.123	76.917.502.455	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,56	45.712.198.986	51.842.204.870	54.128.446.105	55.432.941.656	56.768.875.550	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12,52	12.571.300.000	19.498.086.300	19.712.565.249	19.929.403.467	20.148.626.905	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-	
4.3.02	Dana Darurat	0	-	-	-	-	-	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	
5	Belanja Daerah	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995	
5.1	Belanja Operasi	1,54	715.148.266.323	745.148.266.323	753.148.266.323	756.340.895.143	760.288.667.675	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,24	575.183.674.386	593.183.674.386	600.183.674.386	603.376.303.206	604.324.075.738	
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	3,06	109.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	123.353.366.477	
5.1.4	Belanja Subsidi	8,78	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
5.1.5	Belanja Hibah	0	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	
5.2	Belanja Modal	1,97	309.500.575.293	320.806.774.731	327.574.596.071	332.574.596.071	334.574.596.071	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,92	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2	70.054.121.924	75.054.121.924	75.821.943.264	75.821.943.264	75.821.943.264	
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1,75	125.138.354.553	125.138.354.553	130.138.354.553	134.138.354.553	134.138.354.553	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1,15	106.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	111.739.268.016	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,76	4.568.830.800	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238	
5.3	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	



	Uraian	Pertumbuhan (%)	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
5.3.1	Belanja Bantuan Keuangan	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
6	Pembiayaan Daerah	0	(3.000.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau 2021

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
4. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
6. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).
7. Peningkatan pendapatan daerah.

7.2. RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dalam Kerangka Pendanaan



Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Disamping itu, juga disajikan target indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan akhir periode perencanaan yang akan dicapai.

Sesuai rancang bangun perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas juga dipisahkan menjadi dua, yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Pada dasarnya, program prioritas untuk perencanaan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Strategis atau tidaknya suatu urusan tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi untuk mencapainya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode, atau sebaliknya dapat menjadi operasional di periode berikutnya. Ketika suatu urusan atau program di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan akan lebih tinggi intensitasnya dari yang operasional. Begitu juga dengan penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala perangkat daerah. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu pada



identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan/fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.



Tabel 7. 2
Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	134.058.310.714	100%	148.139.617.115	100%	146.808.321.115	100%	146.809.321.115	100%	146.567.471.115	100%	722.383.041.174	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah	100%	100%	91.906.099.601	100%	99.839.656.601	100%	104.926.137.601	100%	106.754.859.601	100%	109.297.967.601	100%	512.724.721.005	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		25%	700.000.000	28%	1.225.000.000	30%	1.275.000.000	35%	1.175.000.000	40%	875.000.000	40%	5.250.000.000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 4	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	29.200.000.000	100%	28.313.552.804	100%	28.010.581.750	100%	28.330.645.750	100%	28.317.301.750	100%	142.172.082.054	Dinas Pendidikan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar	89,5%	89,5%	53.434.598.400	89,5%	56.995.830.000	94,7%	60.465.830.000	95,0%	59.011.830.000	100%	60.174.830.000	100%	290.082.918.400	Dinkes PPKB
			Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%						
			Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan	89,5%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%						



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Masyarakat (IKM)														
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Sdmk Yang Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	81%	81%	16.530.200.000	84%	25.289.060.000	84%	25.120.060.000	84%	25.120.060.000	85%	26.220.060.000	85%	118.279.440.000	Dinkes PPKB
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100%						198.000.000	100%	548.000.000	100%	198.000.000	100%	944.000.000	Dinkes PPKB
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang	100%	100%	480.000.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	9.503.440.000	Dinkes PPKB



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM														
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Program KB	53%	53%	540.381.300	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	3.911.901.300	Dinkes PPKB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kecamatan Dengan Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	53%	53%	1.462.830.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	3.717.710.000	Dinkes PPKB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Program Pengendalian Penduduk Yang Dilaksanakan	0%	0%		100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	293.640.000	Dinkes PPKB
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase unit kerja dengan pelayanan	100%	100%	65.526.170.097	100%	122.999.159.499	100%	124.385.597.538	100%	125.731.763.601	100%	126.179.576.441	100%	564.822.267.176	Dinkes PPKB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH	administrasi														
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	7 Bidang Urusan	20.911.008.192	100%	25.004.424.392	100%	25.974.601.368	100%	26.234.347.381	100%	26.335.950.066	100%	124.460.331.399	DPUPR PERKIM
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (UPTD)	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	12.000.000.000	100%	23.000.000.000	100%	23.920.000.000	100%	24.159.200.000	100%	24.258.252.720	100%	107.337.452.720	DPUPR PERKIM
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi	100%	10,45%	4.925.000.000	10,67%	7.000.000.000	10,97%	7.210.000.000	11,28%	7.282.100.000	11,59%	7.311.956.610	11,59%	33.729.056.610	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Rumah Tangga	100%	56,40%	9.697.625.	65,80%	1.100.000.	66%	800.000.0	66,20%	800.000.0	66,40%	800.000.0	66,80%	13.197.625.	DPUPR



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3	3	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak			400		000		00		00		00		400	PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	21,20%	5.083.349.200	21,30%	2.100.000.000	21,50%	1.600.000.000	21,80%	1.100.000.000	22%	700.000.000	22,15%	10.583.349.200	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir di Kawasan-Kawasan Pusat Layanan	100%		-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	100%	20%	23.502.514.700	50%	8.450.000.000	70%	9.450.000.000	80%	9.104.500.000	100%	10.668.478.450	100%	61.175.493.150	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Penyediaan	0%		-	0,92%	300.000.0	1,83%	300.000.0	4,59%	1.500.000.	5,50%	300.000.0	5,50%	2.400.000.0	DPUPR



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggujawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3	4	SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah				00		00		000		00		00	PERKIM	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	55,30%		55,80%	350.000.000	56,10%	350.000.000	56,50%	350.000.000	56,70%	350.000.000	56,70%	1.400.000.000	DPUPR PERKIM
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	100%	0,58%		0,88%	1.100.000.000	1,18%	1.050.000.000	1,48%	850.000.000	1,78%	950.000.000	1,78%	3.950.000.000	DPUPR PERKIM
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	50%	34,56%	2.000.000.000	36,64%	1.100.000.000	39,63%	1.400.000.000	42,62%	1.400.000.000	45,60%	1.400.000.000	45,60%	7.300.000.000	DPUPR PERKIM



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kabupaten/Kota														
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	57,50%	75%	5.970.403.800	70%	1.900.000.000	70%	1.957.000.000	70%	1.976.570.000	70%	1.984.673.937	70,5%	13.788.647.737	DPUPR PERKIM
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	60%	1.650.000.000	65%	2.500.000.000	70%	2.575.000.000	75%	2.600.750.000	80%	2.611.413.075	80%	11.937.163.075	DPUPR PERKIM
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	100%	53%	44.509.081.100	0,54%	44.000.000.000	0,56%	45.317.823.024	0,58%	45.546.957.011	0,60%	45.733.699.534	0,60%	225.107.560.669	DPUPR PERKIM
x	xx	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi	100%	100%	40.353.127.450	100%	40.472.902.400	100%	40.354.000.000	100%	39.706.688.400	100%	40.495.897.378	100%	#REF!	Satpol PP



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pamong Praja														
1	05	02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	739.872.550	100%	715.000.000	100%	764.000.000	100%	615.000.000	100%	805.000.000	100%	#REF!	Satpol PP
1	05	04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kot a yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	150.000.000	100%	55.097.600	100%	125.000.000	100%	921.311.600	100%	125.000.000	100%	#REF!	Satpol PP
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100%	100%	4.603.657.060	100%	4.675.474.110	100%	4.748.411.506	100%	4.822.486.725	100%	4.897.717.518	100%	23.747.746.919	BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi	100%	100%	1.124.000.000	100%	1.141.534.400	100%	1.159.342.336	100%	1.177.428.077	100%	1.195.795.955	100%	5.798.100.768	BPBD



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Korban Bencana														
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		100%	100.000.000		-			100%	150.000.000		-	100%	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase Pelatihan dan peningkatan Produktivitas Tenaga kerja	100%	100%	1.130.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.565.000.000	100%	1.865.000.000	100%	2.085.000.000	100%	8.125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan		100%	584.952.000	100%	599.055.000	100%	800.000.000	100%	581.000.000	100%	455.000.000	100%	3.020.007.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Peresentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Strutur Skala	-	100%	950.000.000	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	830.000.000	100%	675.000.000	100%	4.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)														
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	3.150.429.610	B	3.271.374.610	B	3.360.429.610	B	3.274.429.610	B	3.485.429.610	B	16.542.093.050	Dinas Ketenagakerjaan
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	4.971.733.198	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	24.858.665.994	DPPPAS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	2.820.000.000	DPPPAS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	100%	100%	410.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.330.000.000	DPPPAS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan	100%	100%	850.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.850.000.000	DPPPAS



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Sosial														
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	DPPPAS
2	08	02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaaa n Gender	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	DPPPAS
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.150.000.000	DPPPAS
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	290.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	810.000.000	DPPPAS
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Perlindungan	100%	100%	180.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	1.380.000.0	DPPPAS



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KHUSUS ANAK	Khusus Anak			00		00		00		00		00		00	
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	4.635.816.997	B	4.708.135.742	B	4.781.582.660	B	4.856.175.349	B	4.931.931.685	B	23.913.642.433	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	0	1 Dokumen Perencanaan Gudang	50.000.000	1 Unit	207.922.632	0	-	0	-	0	-	1 Unit	257.922.632	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4%	4%	895.000.000	6%	662.028.623	6%	843.731.749	8%	766.323.219	8%	687.707.116	8%	3.854.790.708	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	7%	125.000.000	7%	126.950.000	7%	128.930.420	7%	130.941.735	8%	132.984.426	8%	644.806.580	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan	57,50%	57,50%	50.000.000	57,50%	50.780.000	57,50%	51.572.168	57,50%	52.376.694	57,50%	53.193.770	57,50%	257.922.632	Dinas Ketahanan Pangan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Mutu dan Keamanan Pangan														
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kinerja perkantoran yang baik	100%	100%	6.872.889.300	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	34.884.446.524	DLH
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	78,77 Poin	79,15 Poin	350.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,446 poin	5.110.000.000	DLH
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan yang direhabilitasi	0 Ha	300 Ha	9.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.800.000.000	DLH
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	70%	80%	360.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	640.000.000	DLH



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			(PPLH)	diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota														
2	1107		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	1 MHA	1 MHA145.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA275.000.000	1 MHA1.245.000.000		DLH		
2	1109		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidupTerlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1 penghargaan	1 penghargaan60.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	1 penghargaan174.000.000	5 penghargaan756.000.000		DLH		



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	100%	100% 75.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	475.000.000	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	85%	86% 9.170.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	47.570.000.000	DLH
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B 5.627.495.085	B 5.715.284.008	B 5.804.442.439	B 5.894.991.741	B 5.986.953.612	B 29.029.166.885							Dinas Kependudukan dan Pencatat	



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		an Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	95,56%	95,98%	50.000.000	96,40%	550.780.000	96,82%	551.572.168	97,24%	552.376.694	97,66%	553.193.770	97,66%	2.257.922.632	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	90%	90,00%	100.000.000	92%	101.560.000	94%	103.144.336	96%	104.753.388	97%	106.387.540	97	515.845.264	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1,92%	5,75%	895.000.000	7,69%	808.962.000	9,61%	823.141.807	11,53%	837.542.819	13,46%	852.168.487	13,46	4.216.815.113	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	100%	50.000.000	100%	50.780.000	100%	51.572.168	100%	52.376.694	100%	53.193.770	100	257.922.632	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B	6.153.334.180	B	5.753.348.180	B	6.093.384.180	B	5.743.384.180	B	6.118.384.180	B	29.861.834.900	DPMD
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.450.000.000	DPMD
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	DPMD
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%	1.115.000.000	100%	1.515.000.000	100%	1.275.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.780.000.000	DPMD
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang	100%	100%	680.300.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	3.401.300.000	DPMD



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				diberdayakan														
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	8.970.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	43.019.314.860	Dishub
2	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran	52%	52%	50.000.000	53%	60.000.000	54%	60.000.000	54%	60.000.000	56%	60.000.000	56%	290.000.000	Dishub
2	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase sarana dan prasarana penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	60%	60%	1.070.000.000	61%	3.740.000.000	62%	3.740.000.000	62%	3.740.000.000	64%	3.740.000.000	64%	16.030.000.000	Dishub
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan prima yang	100%	100%	5.016.452.185	100%	5.075.216.185	100%	5.175.216.185	100%	5.094.452.185	100%	5.204.452.185	100%	25.565.788.925	Diskominfo



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kabupaten/Kota	terlaksana														
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100%	100%	1.172.223.400	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.572.223.400	Diskominfo
3	16	03	Program Aplikasi informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100%	100%	4.783.312.600	100%	3.596.772.000	100%	3.496.772.000	100%	3.477.536.000	100%	3.367.536.000	100%	18.721.928.600	Diskominfo
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100%	100%	429.232.000	100%	435.928.019	100%	442.728.496	100%	449.635.061	100%	456.649.368	100%	2.214.172.944	DPMPSTP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100%	100%	293.756.000	100%	298.338.594	100%	302.992.677	100%	307.719.361	100%	312.519.783	100%	1.515.326.415	DPMPSTP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	78,60%	78,66%	334.200.000	78,70%	339.413.520	78,75%	344.708.371	78,8%	350.085.822	78,85%	355.547.160	78,90%	1.723.954.873	DPMPSTP



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	-0,02%	0,01%	572.627.000	0,01%	194.227.406	0,01%	197.257.354	0,01%	200.334.569	0,01%	203.459.788	0.03%	1.367.906.117	DPMPSP
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100%	100%	85.000.000	100%	86.326.000	100%	87.672.686	100%	89.040.379,50	100%	90.429.409	100%	438.468.474,52	DPMPSP
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.219.365.679	100%	4.285.187.784	100%	4.352.036.713	100%	4.419.928.486	100%	4.488.879.370	100%	21.765.398.031	DPMPSP
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	4.851.966.218	B	4.851.130.218	B	4.851.130.218	B	4.859.716.218	B	4.859.716.218	B	24.273.659.090	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang	100%	100%	1.630.359.000	100%	1.675.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.676.414.000	100%	1.550.000.000	100%	8.256.773.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kepemudaan	Berdaya Saing														OLAHRAGA
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang dibina	100%	100%	150.000.000	100%	285.000.000	100%	200.000.000	100%	375.000.000	100%	410.000.000	100%	1.420.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	1.853.805.000	100%	1.475.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.466.414.000	100%	7.680.219.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B	5.739.230.230	B	5.754.230.230	B	5.704.230.230	B	5.745.230.230	B	5.969.230.230	B	28.912.151.150	Disbudpar
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	548.000.000	100%	630.000.000	100%	380.000.000	100%	1.080.000.000	100%	530.000.000	100%	3.168.000.000	Disbudpar
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan	100%		-	100%	220.000.0		-		-		-	100%	220.000.00	Disbudp



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	6	4	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlinsungan hak kekayaan intelektual				00								0	ar	
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengembangan kebudayaan	100%	100%	937.000.000	100%	350.000.000	100%	200.000.000	100%	350.000.000	100%	200.000.000	100%	2.037.000.000	Disbudpar
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina	100%	100%		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Disbudpar
2	2	0	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	100%	100%	750.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	1.425.000.000	Disbudpar
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional daerah	100%	100%		100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	2.600.000.000	Disbudpar
2	2	0	PROGRAM PEMASARAN	Persentase peningkatan	100%	100%	430.000.0	100%	540.000.0	100%	385.000.0	100%	240.000.0	100%	285.000.0	100%	1.880.000.0	Disbudp



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	6	3	PARIWISATA	pemasaran pariwisata			00		00		00		00		00		00	ar
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	65.000.000	100%	210.000.000	100%	175.000.000	100%	240.000.000	100%	365.000.000	100%	1.055.000.000	Disbudpar
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B	4.359.830.398	B	4.376.830.398	B	4.386.830.398	B	4.386.830.398	B	4.386.830.398	B	21.897.151.990	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	2	0	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diselamatkan	0%	65%	252.000.000	65%	20.000.000	65%	15.000.000	65%	15.000.000	65%	15.000.000	65%	317.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	2	0	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	0%			100%	215.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	725.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipa



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		n Daerah
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	0%			100%	75.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	570.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	4.061.778.808	B	3.930.718.808	B	4.221.778.808	B	4.221.778.808	B	4.221.778.808	B	20.657.834.040	Dinas Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	68 Ton	70 Ton	475.000.000	72 Ton	525.000.000	74 Ton	525.000.000	76 Ton	525.000.000	78 Ton	555.000.000	370 Ton	2.605.000.000	Dinas Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan budidaya	175 Ton	184 Ton	913.940.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	5.763.940.000	Dinas Perikanan
3	26	06	Program pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran		8 Unit	100.000.000									8 Unit	100.000.000	Dinas Perikanan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Hasil Perikanan														
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100%	100%	8.443.717.963	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	43.118.585.963	Disperta n
3	2	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	1.233.708.800	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.633.708.800	Disperta n
3	2	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	1.107.220.000	100%	5.025.000.000	100%	4.875.000.000	100%	4.925.000.000	100%	4.975.000.000	100%	20.907.220.000	Disperta n
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	490.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.790.000.000	Disperta n



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	2	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	100%			100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Disperta n
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	49.396.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	449.396.000	Disperta n
3	2	7	Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan	100%	100%	2.097.075.200	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	2.997.075.200	Disperta n
2	1	05	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan	100%	100%	390.304.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	790.304.000	Disperin dag
2	1	07	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	5%	5,0%	1.209.808.000	2,50%	891.000.000	4,70%	1.294.097.500	3,70%	895.000.000	3,10%	750.000.000	19%	5.039.905.500	Disperin dag
3	3	06	Standarisasi dan Perlindungan	Prosentase peningkatan jumlah	100%	100%	90.000.00	100%	75.000.00	100%	77.500.00	100%	80.000.00	100%	85.000.00	100%	407.500.00	Disperin dag



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Konsumen	konsumen yang dilindungi		0		0		0		0		0		0		
3	30	04	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase stabilitas harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80%	80%	340.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	360.000.000	100%	1.735.000.000	Disperindag
3	30	03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase peningkatan jumlah sarana distribusi perdagangan	0%	0%	335.000.000	100%	899.951.220	100%	511.902.500	100%	505.000.000	100%	2.148.500.000	100%	4.400.353.720	Disperindag
3	31	02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri	100%	100%	3.180.864.003	100%	2.247.716.783	100%	2.272.668.003	100%	2.683.668.003	100%	1.165.168.003	100%	11.550.084.795	Disperindag
x	xx	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	5.925.496.000	B	5.922.500.000	B	5.930.000.000	B	5.922.500.000	B	5.922.000.000	B	29.622.496.000	Disperindag
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan	100%	100%	52.796.638.470	100%	41.499.553.337	100%	42.223.504.390	100%	43.629.904.390	100%	43.629.904.390	100%	223.779.504.977	Bagian Perencanaan dan Keuangan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				sub kegiatan														n, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Prokompim, Bagian Hukum, Bag. Administrasi Pembangunan, BPBJ, Bag. Perekonomian dan SDA, Tata Pemerintahan
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan pemerintahan	100%	100%	12.511.000.000	100%	25.261.225.460	100%	25.261.225.460	100%	25.461.225.460	100%	25.461.225.460	100%	113.955.901.840	Tata Pemerintahan, Bag. Kesra



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dan kesejahteraan rakyat														
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	2.064.968.000	100%	1.783.502.080	100%	1.799.102.080	100%	1.892.702.080	100%	1.892.702.080	100%	9.432.976.320	Bag. Perekonomian dan SDA, Bag. Administrasi Pembangunan, BPBJ
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%	100%	27.512.860.991	100%	22.289.823.971	100%	22.289.823.971	100%	22.514.823.971	100%	22.613.823.971	100%	117.221.156.875	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALINAU
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase unit Kerja yang mendapat pelayanan Sarana dan Prasarana	100%	100%	15.021.484.780	100%	15.244.521.800	100%	15.244.521.800	100%	16.019.521.800	100%	16.327.579.400	100%	77.857.629.580	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALINAU



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penangjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Aparatur														U
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Prosentase pelayanan prima yang dilaksanakan	100%	100%	3.984.137.954	100%	4.079.457.954	100%	4.074.704.946	100%	4.169.877.791	100%	4.264.975.333	100%	20.573.153.978	BPPD KAB. MALINAU
5	06	02	Program : Pengelolaan perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang dikelola	100%	100%	300.000.000	100%	304.680.000	100%	309.433.008	100%	314.260.163	100%	319.162.621	100%	1.547.535.792	BPPD KAB. MALINAU
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100%	100%	10.025.571.297	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.432.132.709	100%	51.904.102.133	Bappeda dan Litbang
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN,	Rata-rata Capaian	100%	80%	1.535.094.	85%	1.432.184.	90%	1.432.184.	95%	1.432.184.	100%	1.510.789.	100%	7.342.437.5	Bappeda dan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program Pembangunan Daerah		500		500		500		500		503		03	Litbang	
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	80%	2.724.997.900	85%	1.304.999.205	90%	1.304.999.205	95%	1.304.999.205	100%	1.404.999.205	100%	8.044.994.720	Bappeda dan Litbang
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	80%	1.250.000.000	85%	268.983.495	90%	268.983.495	95%	268.983.495	100%	261.773.489	100%	2.318.723.974	Bappeda dan Litbang
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai dan Predikita SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	62.267.320.684	B	60.418.025.603	B	60.667.320.688	B	60.817.320.688	B	60.817.320.688	B	304.987.308.351	BPKD



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perde dan Perbub APBD yang ditetapkan	100%	100%	366.685.385.000	100%	348.020.189.647	100%	351.868.488.963	100%	354.895.116.851	100%	357.700.430.249	100%	1.779.169.610.710	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.200.000.000	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100%	100%	2.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	9.400.000.000	BPKD
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	6.341.890.573	100%	6.458.967.093	100%	6.491.181.039	100%	6.502.381.039	100%	6.512.381.039	100%	32.306.800.783	BKPP
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pelayanan administrasi	100%	100%	1.627.000.	100%	1.510.000.	100%	1.510.000.	100%	1.420.000.	100%	1.451.500.	100%	7.518.500.0	BKPP



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH	Kepegawaian		000		000		000		000		000		00		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kapasitasnya	100%	100%	1.407.250.000	100%	1.007.173.480	100%	974.959.534	100%	1.053.759.534	100%	1.012.259.534	100%	5.455.402.082	BKPP
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan	100%	100%	2.678.910.800	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.698.910.800	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang diilaksanakan	100%	100%	1.086.566.850	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.586.566.850	Inspektorat
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	100%	100%	8.949.373.124	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	46.288.776.220	Inspektorat
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	4.404.331.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	21.992.570.965	Kecamatan Malinau



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Daerah Kabupaten/Kot a														Kota
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelengaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100.040.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	529.288.000	Kecamat an Malinau Kota
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	672.250.000	Kecamat an Malinau Kota
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	148.050.000	Kecamat an Malinau Kota
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	100%	100%	4.755.524.338	100%	4.653.030.838	100%	4.653.030.838	100%	4.653.030.838	100%	4.703.030.838	100%	23.417.647.690	Kecamat an Malinau Utara dan Perwakilan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				a														an Maltara Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	152.023.700	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	1.013.348.500	Kecamat an Malinau Utara dan Perwakil an Maltara Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	10.900.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	90.900.000	Kecamat an Malinau Utara dan Perwakil an Maltara Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.994.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.994.000	Kecamat an Malinau Utara dan Perwakil an Maltara



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	29.920.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.920.000	Kecamat an Malinau Utara dan Perwakilan Maltara Timur
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	19.835.120.195	Kecamat an Malinau Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	Kecamat an Malinau Barat
7	01	06	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pemerintah	100%	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	1.479.000.000	Kecamat an Malinau



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				desa														Barat
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%	100%	3.979.368.764	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	19.588.194.620	Kecamatan Mentarang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%	152.023.700									100%	152.023.700	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	10.900.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	90.900.000	Kecamatan Mentarang
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	1.120.000.000	Kecamatan Mentarang
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan	Proporsi orang yang merasa aman berjalan	100%	100%	29.994.00									100%	29.994.000	Kecamatan Mentara



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Ketertiban Umum	sendirian		0											ng	
7	015		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	100%	100% 29.920.000									100%	29.920.000	Kecamatan Mentarang	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%	100% 2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	11.055.037.300	Kecamatan Mentarang Hulu	
7	013		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kepada Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa	100%	100% 96.000.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	514.880.000	Kecamatan Mentarang Hulu	
7	012		Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	45 Kali	45 Kali 130.720.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	486.720.000	Kecamatan Mentarang Hulu	



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kecamatan														
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45 Kali	45 Kali	38.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	214.000.000	Kecamat an Mentara ng Hulu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45 Kali	45 Kali	88.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	548.000.000	Kecamat an Mentara ng Hulu
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	16.016.460.390	Kecamat an Pujunga n
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	751.500.000	Kecamat an Pujunga n



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	013		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	186.550.000	Kecamatan Pujungan
7	16		PROGRAMPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	232.600.000	100%	232.600.000	100%	232.600.000	100%	232.600.000	100%	232.600.000	100%	1.163.000.000	Kecamatan Pujungan
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.192.125.887	100%	2.953.300.000	100%	2.953.300.000	100%	2.953.300.000	100%	3.003.300.000	100%	15.055.325.887	Kecamatan Kayan Hilir dan Perwakilan Kecamatan Long Sule
7	013		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	50.000.000	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	1.005.303.548	Kecamatan Kayan Hilir dan Perwakilan Kecamatan Long Sule



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	3.670.206.540	100%	3.708.206.540	100%	3.708.206.540	100%	3.698.206.540	100%	3.698.206.540	100%	18.483.032.700	Kecamta n Kayan Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	200.000.000	100%	212.000.000	100%	212.000.000	100%	212.000.000	100%	212.000.000	100%	1.048.000.000	Kecamta n Kayan Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Umum	100%	100%		100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	180.000.000	Kecamta n Kayan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan yang diberdayakan	100%	100%	40.000.000									100%	40.000.000	Kecamta n Kayan Hulu
7	1	6	PROGRAMPEMBINAA N DAN PENGAWASAN	Persentase Pemerintahan Desa yang	100%	100%	50.000.00									100%	50.000.000	Kecamta n Kayan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PEMERINTAHAN DESA	dibina dan diawasi			0											Hulu
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	3.627.831.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	18.574.893.025	Kec. Sungai Boh
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%	100%	335.000.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	1.348.512.000	Kec. Sungai Boh
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan	100%	100%	70.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	210.000.000	Kec. Sungai Boh
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Di	100%	100%	75.000.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	405.752.000	Kec. Sungai Boh



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kecamatan														
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100%	100%	2.383.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	12.118.099.020	Kecamat an Bahau Hulu
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	330.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	930.000.000	Kecamat an Bahau Hulu
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%		-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	Kecamat an Bahau Hulu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasivket entraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	Kecamat an Bahau Hulu



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	Kecamat an Bahau Hulu
7	1	6	PROGRAMPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Programpembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	220.000.000	Kecamat an Bahau Hulu
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.131.447.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	14.810.367.730	Kecamat an Kayan Selatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	30.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	42.000.000	Kecamat an Kayan Selatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Prosentase pelyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	28.662.00	100%	182.000.0	100%	182.000.0	100%	182.000.0	100%	182.000.0	100%	756.662.00	Kecamat an Kayan



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAN PELAYANAN PUBLIK	dan pelayanan publik		0		00		00		00		00		0	Selatan	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelenggaraa n pembinaan dan pengawasan	100%	100%	14.620.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	414.620.000	Kecamat an Kayan Selatan
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	2.582.099.086	100%	2.579.462.686	100%	2.576.785.158	100%	2.574.065.861	100%	2.571.304.143	100%	12.883.716.934	Kantor Camat Sungai Tubu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	169.000.000	100%	171.636.400	100%	174.313.928	100%	177.033.225	100%	179.794.943	100%	871.778.496	Kecamat an Sungai Tubu
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	100%	100%	2.661.943.298	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	14.295.836.890	Kecamat an Malinau Selatan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				a														
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	20.000.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	79.840.000	Kecamatan Malinau Selatan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	39.974.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	139.974.000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	CC	B	226.516.100									100%	226.516.100	Kecamatan Malinau Selatan
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.750.690.997	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	13.797.605.785	Kecamatan Malinau Selatan Hilir



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	152.023.700	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	839.223.700	Kecamat an Malinau Selatan Hilir
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	29.920.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	189.920.000	Kecamat an Malinau Selatan Hilir
7	1	3	Prgoram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan yang diberdayakan	100%	80%	10.900.000									100%	10.900.000	Kecamat an Malinau Selatan Hilir
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	100%	100%	29.994.000									100%	29.994.000	Kecamat an Malinau Selatan Hilir
x	x	0	Program Penunjang Urusan	Prosentase Penunjang	100%	100%	2.671.706.	100%	2.671.681.	100%	2.671.681.	100%	2.671.681.	100%	2.671.681.	100%	13.358.430.	Kecamat an



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	x	1	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			167		167		167		167		167		835	Malinau Selatan Hulu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	55.000.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	275.100.000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	24.415.727.165	Kesbangpol
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman karakter kebangsaan untuk penyelenggara pemerintahan desa	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	Kesbangpol



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggunjawa b
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik untuk parpol yang ada di Kabupaten Malinau	100%	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	675.000.000	Kesbang pol
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	Kesbang pol
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	Kesbang pol

Sumber : data diolah 2021



BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam perwujudan visi dan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip “SMART”, yaitu (1) khusus (*specific*) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu; (2) dapat diukur (*measurable*) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori ; (3) dapat dicapai (*achievable*) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi; (4) relevan (*relevant*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi; (5) masa waktu (*time-bound*) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (*output*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Penetapan indikator kinerja daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten/Kota; serta sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan sebagai berikut.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa bakti 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran dari setiap misi yang disajikan dalam Tabel 8.1:



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Malinau

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)		Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
INDIKATOR TUJUAN											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	71,94	72,52	72,85	73,18	73,51	73,84	74,17	74,17	
2	Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,65	2,7	2,75	2,78	2,8	2,82	2,85	2,85	
3	Pertumbuhan PDRB	persen	-0,62	2,0-4,0	3,0-5,0	5,28	5,54	5,86	6,17	6,17	
4	Indeks Gini	poin	0,289	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	0,278	
5	Angka Kemiskinan	persen	6,63	7,30	6,5-6,75	6-6,5	5,5-6,5	5,5-6	5,5-6	5,5-6	
6	Laju Inflasi	persen	1,32	0,39	0,36	0,33	0,3	0,27	0,24	0,24	
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	N/A	3,5-4,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,77	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35	
9	Indeks RB	poin	CC	B	B	B	B	B	BB	BB	
INDIKATOR SASARAN											
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	72,38	
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	poin	9,39	9,07	9,37	9,67	9,97	10,27	10,57	10,57	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,08	4,14	4,24-5,14	4,35-5,25	4,44-5,34	4,55-5,45	4,64-5,54	4,64-5,54	
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	70,78	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4	
5	Angka kriminalitas yang	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	tertangani									
6	Indeks Resiko Bencana	poin	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
7	Indeks Pembangunan Gender	poin	81,36	82,36	83,36	84,36	85,36	86,36	87,36	87,36
8	Indeks Kerukunan Beragama	poin	78		79,25	80,6	81,7	82,8	83,3	83,3
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	poin	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
10	Kontribusi Pertanian dalam arti luas (Tnp, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)	persen	3,79	4,8	4,82	4,9	4,92	4,95	5	5
11	Nilai Tukar Petani	poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	103,9
12	Nilai Tukar Peternak	poin	103,11	103,15	103,2	103,25	103,3	103,35	103,4	104,4
13	Nilai Tukar Nelayan	poin	102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	103,05
14	Kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB	persen	2,56%	2,60%	2,70%	2,70%	2,80%	3,00%	3,00%	0,03
15	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1.82%	1.82%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%
16	Persentase Koperasi berkualitas	persen	65%	66%	70%	72%	74%	75%	80%	80%
17	Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	persen	52,50%	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%	100%
18	Nilai Investasi daerah	rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94.000.000.000
19	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	49,70%	45,10%	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%	64,4%



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
20	Persentase daerah/wilayah banjir	persen	1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
21	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	persen	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
22	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	87%
23	Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92
24	Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
25	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	4:05	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09
26	persentase wilayah yang terlayani TIK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
28	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	poin	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
30	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
31	Predikat SAKIP	poin	N/A	B	B	B	B	B	BB	BB
32	Nilai LPPD	poin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
33	Opini BPK	poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	C	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
36	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (desa)	persen	8,26	11,93	13,76	15,59	17,74	19,22	21,05	21,05

Sumber : data diolah 2021



8.2 Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari setia misi dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,62	2,0-4,0	3,0-5,0	5,28	5,54	5,86	6,17	
2	Laju inflasi	Persen	1,32	0,39	0,36	0,33	0,3	0,27	0,24	
3	PDRB per kapita	Rupiah	135.720.000	143.909.629	155.225.914	166.542.198	177.858.482	189.174.766	200.491.050	
4	Indeks Gini	Poin	0,289	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	93,37	92,7	93,5 - 9,25	94 - 93,5	94,5 - 93,5	95 - 94,4	95 - 94,4	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,94	72,52	72,85	73,18	73,51	73,84	74,17	
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
7	Angka melek huruf	Persen	98,34	95,89	97,5	98,34	100	100	100	Diknas
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,39	9,07	9,37	9,67	9,97	10,27	10,57	Diknas
9	Angka harapan hidup	Tahun	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	Dinkes
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	5,8	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	Dinkes



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	3,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	Dinkes
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	66,44	64,93	62,655	60,38	58,105	55,83	53,555	Disnaker
13	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,08	4,14	4,24-5,14	4,35-5,25	4,44-5,34	4,55-5,45	4,64-5,54	Disnaker
14	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,92	95,43	96,38	96,9	97,41	97,93	98,44	Disnaker
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persen	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	Disnaker
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	63,07	69,29	60,34	58,38	56,43	54,47	52,52	Disnaker
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	37	46	58	70	82	94	106	Disnaker
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	C	B	B	BB	BB	BB	BB	Bagian Ortala
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	4	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	BPKD
20	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)									Dinas Ketahan Pangan
	PPH Ketersediaan	Persen	80,30	80,35	80,38	80,40	80,80	81,00	81,30	Dinas Ketahan Pangan
	PPH Konsumsi	Persen	85,5	89,20	92,80	96,40	100	100	100	Dinas Ketahan Pangan
22	Penguatan cadangan pangan	Kegiatan	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Ketahan Pangan
23	Penanganan daerah rawan pangan	Dokumen	2	4	4	6	7	8	9	Dinas Ketahan Pangan



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	Produksi sektor pertanian/Perkebunan									Pertanian
	Padi	Ton	2,96	3	3,5	3,7	3,8	4	4	Pertanian
	Jagung	Ton	3,35	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	Pertanian
	Ubi Kayu	Ton	40,53	40,6	40,6	40,9	41,9	42,9	43,9	Pertanian
	Ubi Jalar	Ton	7,67	7	8	8	9	9	9	Pertanian
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB									
26	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB									
27	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	48,07	48,86	48,87	48,88	48,9	48,92	48,94	
28	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.82	1.82	1.84	1.84	1.85	1.85	1.86	Dusbudpar
29	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	4,41	4,67	4,93	5,19	5,45	5,71	5,97	Perindag
30	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,56	2,60	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00	Perindag
31	Pertumbuhan Industri	Persen	5,28	5	5	5	5	5	5	Perindag
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
32	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Disbudpar
33	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	unit	-	-	11	3	2	2	2	Disbudpar



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
34	Persentase Klub olah raga yang aktif		70	75	80	85	90	95	100	Dispora
35	Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Cabor	0	0	7	8	8	8	8	Dispora
	Aspek Daya Saing Daerah									
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
36	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Dokumen	n.a	2733,10	2915,58	3098,05	3280,53	3463,00	3645,48	
37	Nilai Tukar Petani	Poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	Pertanian
38	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	Dokumen	n.a	123,52	133,63	143,75	153,86	163,98	174,09	
39	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
40	Rasio ketergantungan	Persen	52,60	47,03	43,25	39,48	35,71	31,94	28,16	Disnaker
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
41	Rasio panjang jalan									DPU.PR-PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	7,6	10,7	15	20	25	30	35	DPU.PR-PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang	Persen	42,1	34,4	35,00	32,10	29,80	29,60	29,40	DPU.PR-PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak	Persen	50,30	55	50,00	47,90	45,20	40,40	35,60	DPU.PR-PERKIM
42	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun									
	Melalui Dermaga	org	48975	28931	51424	53995	56695	59529	62506	Dishub
	Melalui Bandara	org	16218	na	17029	17880	18774	19713	20699	Dishub
43	Jenis dan jumlah bank dan cabang									BPKD
	Kantor Cabang (KC)	unit	1	1	1	1	1	1	1	BPKD



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	unit	8	8	8	9	9	10	10	BPKD
	Kantor Kas (KK)	unit	10	10	11	12	13	14	15	BPKD
44	Jenis, kelas, dan jumlah restoran									BPKD
	Restoran/Rumah Makan	unit	17	9	17	18	19	20	21	BPKD
	Warung / Kedai Makan	unit	449	458	468	478	488	498	508	BPKD
45	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel									BPKD
	Hotel Bintang	unit	0	0	0	0	1	1	1	BPKD
	Hotel Non Bintang	unit	17	15	16	17	18	19	20	BPKD
46	Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih	Persen	69,57	69,57	75	80	85	90	95	DPU.PR-PERKIM
47	Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik	Persen	73.37	73.37	74,36	77	80	83	85	DPU.PR-PERKIM
48	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	90	91	92	93	94	95	96	DPU.PR-PERKIM
	Fokus Iklim Berinvestasi									
49	Angka kriminalitas	Persen	0,06908	0,07160	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072	Kesbangpol
50	Jumlah demonstrasi	Kasus	1	4	1	1	1	1	1	Kesbangpol
51	Lama proses perijinan	Hari Kerja	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	DPPMPTSP
52	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah									
	Jenis Pajak Daerah	Jenis	9	9	10	10	10	11	11	BPKD



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pajak Daerah		27	27	28	29	30	31	32	BPKD
	Jenis Restribusi Daerah	Jenis	3	3	4	4	4	5	5	BPKD
	Jumlah Restribusi Daerah		16	16	17	18	19	22	23	BPKD
	Fokus Sumber Daya Manusia									
53	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)									
	Strata 1 (S1)	org	5263	5263	6263	6263	6263	6263	6263	Disnaker/Dukcapil
	Strata 1 (S2)	org	347	347	397	447	497	547	597	Disnaker/Dukcapil
	Strata 1 (S3)	org	12	12	14	16	18	20	22	Disnaker/Dukcapil
54	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	Persen	52,60	47,03	43,25	39,48	35,71	31,94	28,16	Disnaker/Dukcapil
	Aspek Pelayanan Umum									
55	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		46,96	2799	3778	3778	3784	3785	3790	Diknas
56	Angka partisipasi kasar		85,43	22551						Diknas
57	Angka pendidikan yang ditamatkan		4,60	4000						Diknas
58	Angka Partisipasi Murni		90,81	908	907	907	907	908	905	Diknas
59	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		99,20	10100	10120	10150	10300	10320	10350	Diknas



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
60	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		95,10	4980	5480	5800	6240	6650	6900	Diknas
61	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C		68,57	3500	3850	4000	4300	4850	5140	Diknas
62	Angka Partisipasi Sekolah:		71,00	16883	19748	18125	18450	18900	19270	Diknas
63	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A		88,52	9035	9345	9530	9880	10150	10500	Diknas
64	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		71,72	3489	300	800	1100	1350	1800	Diknas
65	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		385,00	400	400	400	400	400	450	Diknas
66	Angka Putus Sekolah:		1,07	0,67	0,40	0.30	0.25	0.20	0.10	Diknas
67	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,42	0,30	0,25	0.22	0.20	0.15	0.10	Diknas
68	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		2,43	2,02	1,12	1.01	0.90	0.75	0.63	Diknas
69	Angka Kelulusan:		102,33	100	100	100	100	100	100	Diknas
70	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		102,32	100	100	100	100	100	100	Diknas
71	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		102,34	100	100	100	100	100	100	Diknas
72	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		85,74	1397	1350	1350	1300	1275	1500	Diknas
73	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		81,03	1300	1500	1700	1900	2100	2300	Diknas
74	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		91,35	100	108	1012	1020	1026	1031	Diknas
75	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik		71,05	32	38	41	45	47	49	Diknas
76	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		0,71	0,72	0,73	0,75	0,79	0,81	0,83	Diknas
77	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		7,63	341	70	78	80	85	88	Diknas



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		34,45	60	65	70	75	80	85	Diknas
78	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		80,37	1666						Diknas
78	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki		95,24	8250	8300	8350	8400	8450	8500	Diknas
79	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		0,00	110						Diknas
80	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		60,20%	1500	1600	1650	1700	1740	1765	Diknas
81	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi		64,34%	74	84	94	104	114	129	Diknas
82	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		73,95%	3310	3410	3460	3510	3550	3575	Diknas
83	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan		5,48%	50	3410	3460	3510	3550	3575	Diknas
84	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD		74,16%	116	140	160	165	180	185	Diknas
85	Jumlah pendidik pada PAUD		74,16%	590	614	626	638	650	662	Diknas
86	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		112	132	182	202	217	228	233	Diknas
87	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang		43,00%	50	80	90	100	110	120	Diknas



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
88	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		99,40%	10134	10164	10200	10230	10260	10280	Diknas
89	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		71,72%	4135	4234	4275	4875	5000	5100	Diknas
90	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		67,38%	31	31	35	40	45	51	Diknas
91	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		10103	10164	10316	10326	10350	10345	10351	Diknas
92	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		4000	3454	3506	3512	3521	3527	3531	Diknas
93	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		10103	10164	10316	10325	10331	10335	10342	Diknas
94	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0,00	3454	3506	3517	3528	3545	3567	Diknas
95	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		4000	586	706	826	946	1066	1186	Diknas
96	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		77	482						Diknas
97	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		6,03	341	161	180	245	312	365	Diknas
98	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		2,06	161						Diknas
99	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		0	39	40	41	42	43	44	Diknas
100	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		0	10						Diknas



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
101	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		0	20	67	82	102	134	156	Diknas
102	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		0	0						Diknas
103	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1,64	27	30	35	40	45	50	Diknas
104	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		6,35	25						Diknas
105	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		84,26	86,21	88,89	91,67	95,37	98,15	100	Diknas
106	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		52,63	12						Diknas
107	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		37,02	20	22	23	25	23	18	Diknas
108	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		75,00	7						Diknas
109	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		95,24%	8250						Diknas
110	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi		100%	5	7	10	12	14	16	Diknas



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
111	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0,00%	657	750	760	775	780	785	Diknas
112	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0,00%	657	750	760	775	780	785	Diknas
113	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan		25,00%	57	67	79	91	101	108	Diknas
114	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan		68,06%	8	10	10	12	10	9	Diknas
115	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1)		97,96	49	10	11	10	10	9	Diknas
116	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah		49,07	25	30	35	40	45	50	Diknas
117	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1		66,67	5	6	7	8	9	10	Diknas
118	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		11,3	13	13					DKPP&KB
119	Angka kelangsungan hidup bayi		DTT	DTT						DKPP&KB
120	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		13,3	24	22					DKPP&KB
121	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		6,9	11	11					DKPP&KB
122	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		62,5	200	195					DKPP&KB
123	Rasio posyandu per satuan balita	Poin	1,8	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB
124	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Poin	1 : 755	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
125	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Poin	1 : 27170	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	DKPP&KB
126	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	1 : 10000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB
127	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	5 : 1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB
128	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
129	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	91,60	95	95	97	97	100	100	DKPP&KB
130	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	62,40	90	90	95	95	95	95	DKPP&KB
131	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
132	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	71,40	95	95	95	95	95	95	DKPP&KB
133	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		1	1	1	2	2	2	2	DKPP&KB
134	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
135	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	58,30	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
136	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	org	202	245	245	245	245	245	245	DKPP&KB
137	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	0	40	40	40	40	40	40	DKPP&KB
138	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	98,70	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
139	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	19,40	90	90	90	90	90	90	DKPP&KB
140	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
141	Penderita diare yang ditangani	Persen	%	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
142	Angka kejadian Malaria	org	0	1	1	2	3	4	5	DKPP&KB
143	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0	0	DKPP&KB
144	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	DTT	80	80	80	80	80	80	DKPP&KB
145	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
146	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	30	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	DKPP&KB
147	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen	DTT	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
148	Proporsi jumlah penduduk usia 15 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	DTT	80	80	80	80	80	80	DKPP&KB
149	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	11,03	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
150	Cakupan kunjungan bayi	Persen	66,30	90	90	95	95	100	100	DKPP&KB
151	Cakupan puskesmas		DTT	DTT						DKPP&KB
152	Cakupan pembantu puskesmas		DTT	DTT						DKPP&KB
153	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	80,30	95	95	97	97	97	100	DKPP&KB
154	Cakupan pelayanan nifas	Persen	82,9	95	95	97	97	97	100	DKPP&KB
155	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
156	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	57,1	85	90	90	90	95	95	DKPP&KB
157	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin		DTT							DKPP&KB
158	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	37,80	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
159	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	71,77	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
160	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	32	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
161	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
162	Persentase balita gizi buruk	Persen	5,80	< 15	< 15	< 15	< 15			DKPP&KB
163	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	3,3	< 5	< 5	< 5	< 5			DKPP&KB
164	Cakupan Desa Siaga Aktif	Cakupan Desa Siaga Aktif	DTT							DKPP&KB
165	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		1 : 510	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB
166	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	unit	3	3	3	3	3	3	3	DKPP&KB
167	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	67	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
168	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	unit	2	2	2	2	2	2	2	DKPP&KB
169	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	80,30	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
170	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Buku KIA		1200	2715	2588	3058	3788	4166	4582	DKPP&KB
	Kohort ibu		7	110	121	143	143	143	143	DKPP&KB
	Pptest	pcs	-	2715	2588	3058	3788	4166	4582	DKPP&KB
	Stik GDS	pcs	-	2715	2588	3058	3788	4166	4582	DKPP&KB
	Strip Hb	pcs	0	2715	2588	3058	3788	4166	4582	DKPP&KB
	stik protein		0	2715	2588	3058	3788	4166	4582	DKPP&KB
	TTD	box	4060	-	-	-	-	-	-	DKPP&KB
171	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal									DKPP&KB
	PUSKESMAS									DKPP&KB
	Dokter :	org	28	22	22	22	22	22	22	DKPP&KB
	Perawat :	org	245	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
	Bidan :	org	185	83	83	83	83	83	83	DKPP&KB
	PUSTU									DKPP&KB
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
172	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		91,6	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
173	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	Partograf :	lembar	0	2246	2473	2720	2992	3536	4378	DKPP&KB
	Kartu ibu :		0	2446	2473	2720	2992	3536	4378	DKPP&KB
	oksitosin Inject :		0	2446	2473	2720	2992	3536	4378	DKPP&KB
174	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar									DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	PUSKESMAS									
	Dokter :	org	28	22	22	22	22	22	22	
	Perawat :	org	245	100	100	100	100	100	100	
	Bidan :	org	185	83	83	83	83	83	83	
	PUSTU									
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	
175	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		79,8	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
176	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	Kohort bayi :	ex	44	44	110	110	110	110	110	
	Vaksin Hb0 : -			-	-	-	-	-	-	
	Salep mata :	btl	200	200	200	200	200	200	200	
	Vit K1 :	amp	3000	3000	2353	2780	3443	4384	5670	
	form MTBM :	lembar	0	0	1810	2139	2649	3373	4362	
177	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar									DKPP&KB
	PUSKESMAS									DKPP&KB
	Dokter :	org		22	22	22	22	22	22	DKPP&KB
	Perawat :	org		100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
	Bidan :	org		83	83	83	83	83	83	DKPP&KB
	PUSTU									DKPP&KB
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
178	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	57,1	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
179	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	Kohort :	ex	49	110	110	110	110	110	110	DKPP&KB
	KPSP :	pcs	0	0	34	34	34	34	34	DKPP&KB
	DDTK :	ex	0	0	150	150	150	150	150	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Vit A merah:			16310	19825	22599	24858	27344		DKPP&KB
	Vit A Biru :			2125	940	1033	110	1222	1443	DKPP&KB
180	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar									DKPP&KB
	PUSKESMAS									DKPP&KB
	Dokter :	org	28	22	22	22	22	22	22	DKPP&KB
	Perawat :	org	245	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
	Bidan :	org	185	83	83	83	83	83	83	DKPP&KB
	Gizi	org	18	22	22	22	22	22	22	DKPP&KB
	PUSTU									DKPP&KB
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	DKPP&KB
181	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	41,1	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
182	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar									DKPP&KB
	PUSKESMAS									
	Dokter :	org	28	22	22	22	22	22	22	
	Perawat :	org	245	100	100	100	100	100	100	
	Bidan :	org	185	83	83	83	83	83	83	
	Gizi :	org	18	22	22	22	22	22	22	
	Kesmas :	org	20	21	21	21	21	21	21	
	PUSTU									
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	
183	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	31,54	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
184	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	Pedoman dan Media KIE		44	109	109	119	131	144	158	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Alat ukur BB, TB dan LP		44	109	109	119	131	144	158	DKPP&KB
	Tensimeter		44	109	109	119	131	144	158	DKPP&KB
	Glukometert		44	109	109	119	131	144	158	DKPP&KB
	test strip gula darah	pcs	44	47.164	47.164	51,88	57068	62775	690525	DKPP&KB
	lanset		44	109	109	119	131	144	158	DKPP&KB
	kapas alkohol	pcs	44	47.164	47.164	51,88	57068	62775	690525	DKPP&KB
	Kit IVA test		44	13436	13436	14780	16258	17884	19672	DKPP&KB
	form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM		17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
185	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	Dokter	org	17	17	17	17	17	17	17	
	Bidan	org	17	17	17	17	17	17	17	
	Perawat	org	17	17	17	17	17	17	17	
	Gizi	org	17	17	17	17	17	17	17	
	Tenaga kesehatan Masyarakat	org	17	17	17	17	17	17	17	
	Tenaga Non Kesehatan terlatih, kader	org	25	40	50					
186	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	14,61	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
187	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	Rapor:			4583	5041	5545	6099	6708	7378	
	AU :			18332	19659	28834	31714	34881	38365	
	Chol :			18332	19659	28834	31714	31714	38365	
	GDS:			18332	19659	28834	31714	31714	38365	
	Format:			4583	5041	5545	6099	6708	7378	
188	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	PUSKESMAS									
	Dokter :	org	28	22	22	22	22	22	22	
	Perawat :	org	245	100	100	100	100	100	100	
	Bidan :	org	185	83	83	83	83	83	83	



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Gizi :	org	18	22	22	22	22	22	22	
	Kesmas :	org	20	21	21	21	21	21	21	
	PUSTU									
	Bidan :	org		82	82	82	82	82	82	
	Perawat :	org		82	82	82	82	82	82	
189	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	13,29	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
190	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	a. Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE		0	50	100	100	100	100	100	
	b. Tensimeter		44	109	109	109	109	109	109	
	c. Form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM		17	17	17	17	17	17	17	
191	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	a. Dokter	org	17	17	17	17	17	17	17	
	b. Bidan	org	17	17	17	17	17	17	17	
	c. Perawat	org	17	17	17	17	17	17	17	
	d. Tenaga kesehatan masyarakat	org	17	17	17	17	17	17	17	
192	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	56,81	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
193	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	glukometer		44	109	109	110	111	112	113	
	Strip Tes Gula Darah	pcs	44	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164	
	kapas alkohol		44	109	109	110	111	112	113	
	lanset	pcs		47.164	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164	



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM		17	17	17	17	17	17	17	
	Pedomnan dan media KIE		17	17	17	17	17	17	17	
194	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	a. Dokter	org	17	17	17	17	17	17	17	
	b. Bidan	org	17	17	17	17	17	17	17	
	c. Perawat	org	17	17	17	17	17	17	17	
	d. Gizi	org	17	17	17	17	17	17	17	
	e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	org	17	17	17	17	17	17	17	
195	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	53,95	100	100	100		100	100	DKPP&KB
196	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	buku pedoman PDPGJ		0	17	17	17	17	17	17	
	KIT berisi 2 alat fiksasi		0	17	17	17	17	17	17	
197	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	a.Dokter	org	17	17	17	17	17	17	17	
	b. Perawat yang terlatih	org	6	17	17	17	17	17	17	
198	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	88,50	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
199	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	a. media KIE		0							
	b. Reagen Zn TB		300	161	161	161	161	161	161	



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	c. Masker RT dan Masker N95		1180	2403	2403	2403	2403	2403	2403	
	d. Pot dahak, kaca slide dan BHP		43007	26438	26438	26438	26438	26438	26438	
	e. catridge Tes cepat molekuler		1	2	2	2	2	2	2	
	f. Form pencatatan dan pelaporan		0							
	g. buku pedoman/SOP		0	20						
200	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	a. dokter terlatih	org	7	17	17	17	17	17	17	
	b. ATLM	org	11	17	17	17	17	17	17	
	c. Perawat	org	7	17	17	17	17	17	17	
	d. Penata Rontgen	org	1	2	2	2	2	2	2	
	e. Tenaga kesehatan Masyarakat	org	0	17	17	17	17	17	17	
	f. Kader Tb	org	0	218	218	218	218	218	218	
201	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	19,77	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
202	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia									DKPP&KB
	a. media KIE		70	20	20	20	20	20	20	
	b. RDT HIV 1		100	2058	2058	2058	2058	2058	2058	
	c. RDT HIV 2		50	2058	2058	2058	2058	2058	2058	
	d. RDT HIV 3		50	2058	2058	2058	2058	2058	2058	
	e. RDT HBsAH		300	1801	1801	1801	1801	1801	1801	
	f. RDT Shypilis		50	1801	1801	1801	1801	1801	1801	
	g. RDT HIV dan Spypilis (DOU)		925	1801	1801	1801	1801	1801	1801	
	h. handschon		200	2508	2508	2508	2508	2508	2508	
	i. Alkohol swab		900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	
	j. Blood lancet/jarum steril		900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	
	k. Disposable 3 CC		900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1. Tabung Vacutainer		900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	
203	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar									DKPP&KB
	a. Dokter	org	4	20	20	20	20	20	20	
	b. Perawat	org	10	20	20	20	20	20	20	
	c. Bidan	org	10	20	20	20	20	20	20	
	d. ATLM	org	9	20	20	20	20	20	20	
	e. Sarjana Kesehatan Masyarakat	org	0	20	20	20	20	20	20	
	f. Pendamping HIV	org	0	20	20	20	20	20	20	
	g. Penjangkau HIV	org	0	20	20	20	20	20	20	
204	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,17	2,00	1,86	1,82	1,79	1,73	DKPP&KB
205	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
206	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			21,9						DKPP&KB
207	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			16						DKPP&KB
208	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	67	80	85	100	100	100	100	DKPP&KB
209	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Persen	80	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
210	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	85	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
211	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20	22	24	26	28	30	32	DKPP&KB
212	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	18,60	7,92	7,75	7,43	7,21	7,14	6,93	DKPP&KB
213	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		1 : 510	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DKPP&KB
214	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	66,67	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
215	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	Persen	80,3	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
216	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	Persen	91,6	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
217	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	79,8	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
218	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	57,1	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
219	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	41,1	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
220	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
221	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
222	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
223	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
224	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
225	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
226	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
227	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)		62,5	200	195	195	195	195	195	DKPP&KB
228	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun		DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DKPP&KB
229	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	71	90	90	95	95	97	97	DKPP&KB
230	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	14,47	< 20	< 20	< 20	< 20	Mengikuti Renstra Pusat		DKPP&KB
231	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	Persen	4,33	< 15	< 15	< 15	< 15			DKPP&KB
232	Insidensi TB per 100.000 penduduk		367	400	400	400	400	400	400	DKPP&KB
233	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	Persen	20	50	50	50	50	50	50	DKPP&KB
234	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	DTT	30	30	30	50	50	50	DKPP&KB
235	Treatment coverage pada pasien TB	Persen	59,28	85	85	85	85	85	85	DKPP&KB
236	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	65	90	95	95	95	95	95	DKPP&KB
237	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai stand	Persen	80	90	90	95	95	100	100	DKPP&KB
238	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	DTT	25	25	25	25	25	25	DKPP&KB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
239	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)		17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
240	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	20	30	30	35	40	40	50	DKPP&KB
241	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	100	30	100	100	100	100	100	DKPP&KB
242	Persentase Sarana Produksi UMOT	Persen	0	100	100	100	100	100	100	DKPP&KB
243	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Persen	50	51	52	53	54	55	56	DKPP&KB
244	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Persen	50	51	52	53	54	55	56	DKPP&KB
245	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	41	39	38	37	36	35	34	DKPP&KB
246	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,076	0,096	0,144	0,143815916	0,191754554	0,239693193	0,287631831	DPUPR. PERKIM
247	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	DPUPR. PERKIM
248	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	9,17	9,17	9,17	7,34	6,42	5,50	4,59	DPUPR. PERKIM
249	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	7,59	10,00	15,00	20,00	25	30	35	DPUPR. PERKIM
250	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,24	1,24	2	2	2	2	2	DPUPR. PERKIM
251	Rasio Jaringan Irigasi	%	40,39	42,43	53,76	56,15	70,58	74,45	81,25	DPUPR. PERKIM
252	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Jiwa	600	620	650	660	670	675	680	DPUPR. PERKIM
253	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0,06	0,1	0,14	0,18	0,22	0,25	0,28	DPUPR. PERKIM
254	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	0,37	1,71	4,58	7,45	20,58	33,73	46,85	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
255	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,017	0,025	0,034	0,042	0,05	0,059	0,068	DPUPR. PERKIM
256	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	DPUPR. PERKIM
257	Ketaatan terhadap RTRW	%	48,37	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	DPUPR. PERKIM
258	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,1	0,12	0,137	0,156	0,175	0,195	0,21	DPUPR. PERKIM
259	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	Ha	162.967,43	143.291,60	140.517,43	137.491,78	134.416,73	131.117,24	128.256,93	DPUPR. PERKIM
260	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	Meter	25.780	23.780	19.850	14.550	10.159	8.635	4.000	DPUPR. PERKIM
261	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	KM	5,5	6,5	8	9,5	11	13	15	DPUPR. PERKIM
262	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,17	0,34	0,34	0,56	0,79	1,13	2,27	DPUPR. PERKIM
263	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	0,149	0,259	0,37	0,519	0,574	0,629	0,685	DPUPR. PERKIM
264	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0,477	0,542	0,602	0,701	0,788	0,923	1	DPUPR. PERKIM
265	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	0,318	0,55	0,564	0,786	0,832	0,921	1	DPUPR. PERKIM
266	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	0,57	0,80	0,20	40	60	80	100	DPUPR. PERKIM
267	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	dokumen			1	1	1	1	1	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
268	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	dokumen			1	1	1	1	1	DPUPR. PERKIM
269	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	%			1 BUMD					DPUPR. PERKIM
270	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	%			0,10	20	60	80	100	DPUPR. PERKIM
271	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80	100	20	40	60	80	100	DPUPR. PERKIM
272	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	%			20	40	55	85	100	DPUPR. PERKIM
273	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	%			20	45	50	75	100	DPUPR. PERKIM
274	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	%			20	30	50	70	100	DPUPR. PERKIM
275	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	%			20	40	60	80	100	DPUPR. PERKIM
276	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	%			20	40	60	80	100	DPUPR. PERKIM
277	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	%			20	45	50	70	100	DPUPR. PERKIM
278	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%			20	50	60	75	100	DPUPR. PERKIM
279	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%			20	60	75	80	100	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
280	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%			20	50	70	80	100	DPUPR. PERKIM
281	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%			20	55	65	80	100	DPUPR. PERKIM
282	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%			20	40	55	75	100	DPUPR. PERKIM
283	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%			20	30	60	80	100	DPUPR. PERKIM
284	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%			20	40	70	80	100	DPUPR. PERKIM
285	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%			20	45	60	80	100	DPUPR. PERKIM
286	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	27,27	32	36	41	45%	50%	55%	DPUPR. PERKIM
287	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	-	40%	50%	60%	70%	80%	90%	DPUPR. PERKIM
288	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	(Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPUPR. PERKIM
289	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak)	(Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPUPR. PERKIM
290	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	Unit	-	1	5	5	5	5	5	DPUPR. PERKIM
291	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota	KM	0,50	0,52	0,53	0,54	0,56	0,58	0,6	DPUPR. PERKIM
292	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	KM	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	DPUPR. PERKIM
293	Panjang jalan yang dibangun	KM	-	1,9	7,80	14,00	45,13	45,13	50,13	DPUPR. PERKIM
294	Panjang jembatan yang dibangun	M	-	-	-	0,795	0,437	0,437	7,805	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
295	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	KM	20,73	45,24	47,57	58,09	82,32	71,24	93,62	DPUPR. PERKIM
296	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	KM	20,73	45,24	47,57	58,09	82,32	71,24	93,62	DPUPR. PERKIM
297	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	120	-	0,15	0,30	0,15	0,15	0,27	DPUPR. PERKIM
298	Panjang jalan yang dipelihara	KM	101,83	50,00	22,50	9,60	23,10	23,10	23,10	DPUPR. PERKIM
299	Panjang jembatan yang dipelihara	M	-	-	0,15	0,30	0,15	0,15	0,27	DPUPR. PERKIM
300	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	20	40	60	80	100	DPUPR. PERKIM
301	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	0	0	20	50	70	80	100	DPUPR. PERKIM
302	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	0	3.979	4.479	4.979	5.479	5.979	6.479	DPUPR. PERKIM
303	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK	0	3.975	4.475	4.975	5.475	5.975	6.475	DPUPR. PERKIM
304	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	1.479	1.679	1.879	2.079	2.279	DPUPR. PERKIM
305	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	DPUPR. PERKIM
306	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
307	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	DPUPR. PERKIM
308	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR. PERKIM
309	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	%	72	122	172	222	272	322	372	DPUPR. PERKIM
310	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Ha	0,21	0,28	0,58	0,88	1,18	1,48	1,78	DPUPR. PERKIM
311	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	9,19	8,91	8,61	8,31	8,01	7,71	7,41	DPUPR. PERKIM
312	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	-	46	96	146	196	246	296	DPUPR. PERKIM
313	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	0,21	0,27	0,33	0,39	0,45	0,51	0,57	DPUPR. PERKIM
314	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,50	7,75	8	8,25	8,50	8,75	9	DPUPR. PERKIM
315	Jumlah rumah di kab/kota	Unit	17.697	17.797	17.897	17.997	18.097	18.197	18.297	DPUPR. PERKIM
316	Jumlah unit PK RTLH	Unit	-	46	96	146	196	246	396	DPUPR. PERKIM
317	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	1.337	1.291	1.241	1.191	1.041	991	941	DPUPR. PERKIM
318	Rasio rumah dan KK	Unit	1 / 1,12	1 / 1,11	1 / 1,10	1 / 1,09	1 / 1,08	1 / 1,07	1 / 1,06	DPUPR. PERKIM
319	Jumlah rumah pembangunan baru	Unit	35	35	85	135	185	235	285	DPUPR. PERKIM
320	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	150	250	250	250	250	250	250	DPUPR. PERKIM



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
321	Persentase luas sawah beririgasi	%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	DPUPR. PERKIM
322	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Ha	1.659	1.759	1.875	1.957	2.040	2.139	2.258	DPUPR. PERKIM
323	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Ha	120	165	205	315	340	400	475	DPUPR. PERKIM
324	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Km	5	8	12	16	20	22	25	DPUPR. PERKIM
325	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	470	470	470	470	470	470	470	Satpol-PP
326	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Kasus	51	51	51	51	51	51	51	Satpol-PP
327	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	Satpol-PP
328	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
329	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
330	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
331	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/ Kota yang ditangani		59	59	59	59	59	59	59	Satpol-PP
332	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	70	100	130	160	190	210	240	Satpol-PP
333	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	9	9	9	9	9	9	9	Satpol-PP



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
334	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3	3	3	3	3	3	3	Satpol-PP
335	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	9	9	9	9	9	9	9	Satpol-PP
336	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	Satpol-PP
337	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
338	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
339	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
340	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	unit	3	3	4	4	4	4	4	Satpol-PP
341	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	72	72	72	72	72	72	72	Satpol-PP
342	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	unit	3	3	3	3	3	3	3	Satpol-PP
343	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jenis	14	14	14	14	14	14	14	Satpol-PP



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
344	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	58	58	58	58	58	58	58	Satpol-PP
345	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	40	40	40	40	40	40	40	Satpol-PP
346	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Orang	72	72	72	72	72	72	72	Satpol-PP
347	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
348	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
349	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
350	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
351	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
352	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol-PP
353	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen		10	70	75	80	85	90	BPBD
354	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jiwa		45.105	43.000	42.000	41.000	40.000	39.000	BPBD
355	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jiwa		Tidak tersedia anggaran	43.000	42.000	41.000	40.000	39.000	BPBD
356	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit		1	1	1	1	1	2	BPBD
357	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jiwa		200	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	BPBD



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
358	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	250	40	40	20	20	20	20	BPBD
359	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jiwa		200	43.000	42.000	41.000	40.000	39.000	BPBD
360	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang		300	1.200	2.000	2.800	2.800	2.636	BPBD
361	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Pokmas		1	1	1	1	1	1	BPBD
362	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
363	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
364	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0	0	0	100	100	100	100	DP3AS
365	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0	0	0	100	100	100	100	DP3AS
366	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	20	20	20	50	70	100	100	DP3AS
367	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
368	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen		41,77	55	60	65	70	75	DP3AS
369	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	4	4	4	4	6	6	6	DP3AS
370	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen		58,23	60	60	65	70	75	DP3AS



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
371	Rasio KDRT	Persen	0	0,007	0,005	0,009	0,009	0,009	0,009	DP3AS
372	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen		75,5	77	78,50	83,50	85,50	87,50	DP3AS
373	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
374	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
375	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
376	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	20	20	20	25	25	30	30	DP3AS
377	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Kasus	20	20	20	25	25	30	30	DP3AS
378	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kasus	0	0	1	2	2	2	2	DP3AS
379	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	0	70	80	100	100	100	100	DP3AS
380	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Unit	1	1	1	1	1	1	1	DP3AS



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
381	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	50	50	100	100	200	200	200	DP3AS
382	JumlahTim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim	1	2	3	3	3	3	3	DP3AS
383	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	0	0	50	50	200	200	200	DP3AS
384	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit Kendaraan	3	3	4	4	4	4	4	DP3AS
385	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
386	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	0	0	1	1	2	2	2	DP3AS
387	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
388	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	0	0	50	50	100	100	100	DP3AS
389	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	bh	0	0	10	10	10	10	10	DP3AS
390	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Paket	0	0	20	20	20	20	20	DP3AS



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
391	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Orang	0	0	15	15	20	20	20	DP3AS
392	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang	0	0	2	2	3	3	3	DP3AS
393	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang	20	50	50	60	60	70	70	DP3AS
394	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ elter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
395	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kali	0	0	15	15	15	15	15	DP3AS
396	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
397	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
398	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
399	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	0	0	200	200	200	200	200	DP3AS
400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	0	0	50	50	50	50	50	DP3AS



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
401	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	0	15	20	25	30	35	40	DP3AS
402	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	Program	0	5	20	20	20	20	20	DP3AS
403	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
404	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/ kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media massa	3	3	3	3	3	3	3	DP3AS
405	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	3	3	3	3	3	3	3	DP3AS
406	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
407	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	1	6	6	7	7	10	10	DP3AS
408	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	0	1	2	3	4	5	6	DP3AS
409	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan	ormas	2	20	20	25	25	30	30	DP3AS
410	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih	org	40	60	40	40	40	40	40	DP3AS
411	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga	0	10	10	10	10	10	10	DP3AS
412	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	lembaga	0	0	5	5	5	5	5	DP3AS
413	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	na	na	65	67	68	70	71	DP3AS



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AS
415	Ketersediaan pangan utama		9752	9780	9760	9870	9800	9950	9970	Dinas Ketahan Pangan
416	Ketersediaan energi dan protein perkapita									Dinas Ketahan Pangan
	Energi	kal/kap/hari	2401	2405	2401	2401	2412	2416	2420	Dinas Ketahan Pangan
	Protein	gr/kap/hari	62,3	62,4	62,8	62,5	62,8	62,9	63,1	Dinas Ketahan Pangan
417	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sampel	52	52	52	52	52	52	52	Dinas Ketahan Pangan
418	Penguatan cadangan pangan	Kegiatan	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Ketahan Pangan
419	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	-	-	100	100	100	100	100	Dinas Ketahan Pangan
420	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan									Dinas Ketahan Pangan
	Gudang	Unit			1	1	1	1	1	Dinas Ketahan Pangan
	Lumbung	Unit				2	4	6	8	Dinas Ketahan Pangan
421	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahan Pangan
422	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahan Pangan
423	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Dokumen	1	4	6	7	8	8	8	Dinas Ketahan Pangan
424	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	2	3	5	6	7	8	9	Dinas Ketahan Pangan



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
425	Tertanganinya kerawanan pangan	Dokumen	2	4	4	6	7	8	9	Dinas Ketahan Pangan
426	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ton	-	-	-	30	50	80	100	Dinas Ketahan Pangan
427	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Dokumen	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Ketahan Pangan
428	Persentase cadangan pangan masyarakat	Persen	3	4	4	6	6	8	8	Dinas Ketahan Pangan
429	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	5	6	7	7	7	7	7	Dinas Ketahan Pangan
429	Skor Pola Pangan Harapan									Dinas Ketahan Pangan
	PPH Ketersediaan	Persen	80,30	80,35	80,38	80,40	80,80	81,00	81,30	
	PPH Konsumsi	Persen	85,50	89,20	92,80	96,40	100,00	100,00	100,00	
430	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	Dinas Ketahan Pangan
431	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota		-	1	1	1	1	1	1	DLH
432	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		1	1	1	1	1	1	1	DLH
433	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	78,77	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	DLH
434	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	DLH
435	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	DLH
436	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	100	100	100	100	100	100	100	DLH



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
437	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	88,60	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	DLH
438	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		1	2	2	2	2	2	2	DLH
439	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DLH
440	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		5	5	5	5	5	5	5,00	DLH
441	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Persen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	DLH
442	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		2	1	1	1	1	1	1,00	DLH
443	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Lembaga	4	1	1	1	1	1	1,00	DLH
444	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DLH
445	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Persen	59,16	60	65	67	69	71	73	Dukcapil
446	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	67,38	70,10	75,30	77	79	81	83	Dukcapil
447	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	58,14	70,15	80,10	82	83	84	85	Dukcapil



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dukcapil
449	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Sudah	Dukcapil
450	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	88,1	90	95	96	97	98	99	Dukcapil
451	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	6,05	8,05	8,09	8,30	8,60	8,90	9	Dukcapil
452	Perekaman KTP elektronik	Persen	95,14	95,31	95,79	96,00	97	98	99	Dukcapil
453	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	39,77	40	45	47	49	50	53	Dukcapil
454	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	82,64	85	90	92	94	96	97	Dukcapil
455	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0%	1,92	5,76	7,69	9,61	11,53	13,46	Dukcapil
456	Penerbitan akta perkawinan	Persen	60,80	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
457	Penerbitan akta perceraian	Persen	62,04	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
458	Penerbitan akta kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
459	Penyajian data kependudukan	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
460	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
461	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	82,64	85	90	92	94	96	97	Dukcapil



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
462	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
463	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	60,80	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
464	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	62,04	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
465	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	0%	1,92	5,76	7,69	9,61	11,53	13,46	Dukcapil
466	Persentase pengentasan Desa tertinggal	Persen	55	10	15	10	100	100	100	DPMD
467	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	109	17	19	21	25	27	27,52	DPMD
468	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	18	-	18	19	20	21	22	DPMD
469	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	36,61148978	388	400	450	460	470	475	DPMD
470	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Lembaga	36,61148978	378	380	385	390	395	397	DPMD
471	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMD



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
472	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Lembaga	40,36697248	44	55	68	80	90	95	DPMD
473	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		35,2	60 KELOMPOK BINAAN PKK	78 KELOMPOK BINAAN PKK	80 KELOMPOK BINAAN PKK	109 KELOMPOK BINAAN PKK	125 KELOMPOK BINAAN PKK	127 KELOMPOK BINAAN PKK	DPMD
474	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	ORANG		2197	2197	2197	2197	2197	2197	DPMD
475	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	LEMBAGA		808	808	808	808	808	808	DPMD
476	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	SISTEM PELAYANAN		654	654	654	654	654	654	DPMD
477	Jumlah Desa Mandiri	Desa		4	3	3	5	4	4	DPMD
478	Jumlah Desa Berkembang	Desa		6	8	6	10	10	DESA	DPMD
479	Jumlah Desa Tertinggal	Desa		10	15	10	100	100	100	DPMD
480	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	BUMDes	2	9	10	15	15	15	15	DPMD
481	Jumlah arus penumpang angkutan umum		91	100	110	120	130	140	150	DISHUB
482	Rasio ijin trayek		0.42	1	1	1	1	1	1	DISHUB
483	Jumlah uji kir angkutan umum		510	300	300	300	300	300	300	DISHUB
484	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		16	20	20	20	20	20	20	DISHUB
485	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0.44	1	1	1	1	1	1	DISHUB
486	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	43	50	50	50	50	50	50	DISHUB



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
487	Pemasangan Rambu- rambu		0	100	100	150	200	250	300	DISHUB
488	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0.35	1	1	1	1	1	1	DISHUB
489	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		133	150	180	190	200	210	220	DISHUB
490	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun		339	350	400	450	500	520	550	DISHUB
491	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	66.1	70	70	72	74	76	78	DISHUB
492	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	60	90	100	100	100	100	100	DISHUB
493	Terlaksananya pelayanan uji berkala		1021	400	500	500	500	500	500	DISHUB
494	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Persen	70	100	100	100	100	100	100	DISHUB
495	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0	0	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	Diskominfo
496	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	95,41	95,41	96,33	97,25	98,17	99,08	100	Diskominfo
497	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	84,45	84,45	90	90	90	90	90	Diskominfo
498	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	55,49	55,49	55,49	60	60	60	60	Diskominfo
499	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	4,34	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Diskominfo
500	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
501	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	Diskominfo
502	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Persen	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	Diskominfo
503	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia	Diskominfo
504	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Diskominfo
505	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persen	50	50	50	50	50	50	50	Diskominfo
506	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persen	7,27	7,27	7,27	10,91	12,73	14,55	16,36	Diskominfo
507	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persen	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	Diskominfo
508	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persen	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	Diskominfo
509	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persen	2,38	2,38	2,38	4,76	4,76	4,76	4,76	Diskominfo



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
510	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	Diskominfo
511	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persen	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Diskominfo
512	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persen	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	Diskominfo
513	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persen	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	Diskominfo
514	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Diskominfo
515	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persen	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Diskominfo
516	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Persen	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Diskominfo
517	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	0,06	0,03	0,06	0,14	0,14	0,14	0,29	Diskominfo
518	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia	Diskominfo
519	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	95,41	95,41	100	100	100	100	100	Diskominfo



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
520	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	51,35	100	100	100	100	100	Diskominfo
521	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
522	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
523	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
524	Tersedianya buku profil daerah		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Diskominfo
525	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
526	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
527	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
528	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
529	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
530	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
531	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Diskominfo



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
532	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Diskominfo
533	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Persen	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	Diskominfo
534	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Persen	0	0	0	0	0	4,76	4,76	Diskominfo
535	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
536	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	Diskominfo
537	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Diskominfo
538	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Diskominfo
539	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	Persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	Diskominfo
540	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	org	0	0	10	10	10	10	10	Diskominfo
541	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	org	0	0	0	30	30	30	30	Diskominfo



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin,stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persen	85%	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
543	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	92%	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
544	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Persen	85%	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
545	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persen	51,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
546	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
547	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
548	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	org	2	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
549	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	lembaga	0	0	1	1	1	1	1	Diskominfo
550	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE))	org	0	0	1	1	1	1	1	Diskominfo
551	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1	2	2	2	2	2	2	DPMPSTP



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
552	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	DPMPTSP
553	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	4,6	4,4	4,3	4,6	4,7	4,8	4,9	DPMPTSP
554	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	DPMPTSP
555	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-1	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,4	DPMPTSP
556	PERDA mengenai pemberian fasilitas /intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	-	-	1	-	-	-	-	DPMPTSP
557	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	SOP	-	-	-	1	-	-	-	DPMPTSP
558	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	DPMPTSP
559	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan	-	4	2	2	2	2	2	DPMPTSP
560	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	-	-	2	2	2	2	2	DPMPTSP
561	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	-	-	1	2	2	2	2	DPMPTSP
562	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal oran realisasi penanaman modal		3 org	4 org	6 org	5 org	10 org	12 org	18 org	DPMPTSP
			(2 kali pertemuan)	(3 kali pertemuan)	(3 kali pertemuan)	(5 kali pertemuan)	(6 kali pertemuan)	(6 kali pertemuan)	(8 kali pertemuan)	DPMPTSP
563	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		399	400	410	415	420	425	430	DPMPTSP
564	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP
565	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang			24 org	24 org	24 org	24 org	24 org	DPMPTSP



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
566	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN				2	2	2	2	2	DPMPTSP
567	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota		3 pengaduan	4 pengaduan	5 pengaduan	6 pengaduan	8 pengaduan	10 pengaduan	12 pengaduan	DPMPTSP
			10 konsultasi	15 konsultasi	20 konsultasi	22 konsultasi	24 konsultasi	25 konsultasi	26 konsultasi	DPMPTSP
568	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	DPMPTSP
569	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	97	85	90	90	90	90	90	Dispora
570	Persentase wirausaha muda	Persen	0,30	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Dispora
571	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	0	0	0	30	30	30	30	Dispora
572	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	0	40	50	50	50	50	50	Dispora
573	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Dispora
574	Jumlah atlet berprestasi	Cabor	0	2	5	5	5	5	5	Dispora
575	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	0	0	8	8	8	8	8	Dispora
576	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	1,56	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Dispora
577	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	16	25	90	90	90	90	90	Dispora
578	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0	0	0	0	0	0	0	Dispora
579	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	11,90	10,88	4,53	5,78	5,78	5,78	5,78	Dispora
580	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	54	52	280	54	54	54	54	Dispora
581	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		0	0	0	0	0	0	0	Dispora



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
582	Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Cabor	0	0	7	8	8	8	8	Dispora
583	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		0	0	0	0	0	0	0	Dispora
584	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Cabor	6	0	7	8	8	8	8	Dispora
585	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
586	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		27	-	2	2	2	2	2	Dusbudpar
587	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		16	-	2	2	2	2	2	Dusbudpar
588	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		-	-	-	-	-	1	1	Dusbudpar
589	Kunjungan wisata	Orang	1.542	1.550	1.560	1.570	1.580	1.590	1.600	Dusbudpar
590	PAD sektor pariwisata	Rupiah	4.459.191.421	805.470.000						Dusbudpar
591	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	entitas	4	4	6	8	8	8	8	Dusbudpar
592	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		3	3	5	6	6	6	6	Dusbudpar
593	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Orang	1.531	10	15	20	25	30	35	Dusbudpar
594	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		-	2	3	3	4	6	8	Dusbudpar
595	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,82	1,82	1,84	1,84	1,85	1,85	1,86	Dusbudpar
596	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	6,83	1,30	9,20	9,80	10,50	11,80	12	Dusbudpar
597	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	11	20	35	55	60	65	70	Dusbudpar
598	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		-	1	1	2	3	4	5	Dusbudpar
599	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		-	-	3	-	-	-	-	Dusbudpar



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
600	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi		-	2	4	6	8	10	12	Dusbudpar
601	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persen	80 Orang	25	30	40	50	65	80	Dusbudpar
602	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	desa wisata	4	5	6	6	6	6	6	Dusbudpar
603	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		43	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
604	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		-	-	1	1	1	1	1	Dusbudpar
605	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun.karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat		-	-	11	3	2	2	2	Dusbudpar
606	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi,serta peningkatan kapasitas tata kelola)		-	10	10	10	10	10	10	Dusbudpar
607	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		27	-	1	1	1	1	-	Dusbudpar
608	Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran		-	1	1	1	1	1	1	Dusbudpar
609	Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		-	-	-	1	1	1	1	Dusbudpar
610	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		-	-	-	1	-	1	-	Dusbudpar



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
611	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		7	-	1	-	-	-	-	Dusbudpar
612	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi		-	-	-	5	-	-	-	Dusbudpar
613	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		-	2	3	-	-	-	-	Dusbudpar
614	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Dusbudpar
615	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi		43	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
616	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Dusbudpar
617	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan		16	-	2	2	2	2	2	Dusbudpar
618	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Dusbudpar
619	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		27	-	2	2	2	2	2	Dusbudpar
620	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)		-	3	5	7	9	11	13	Dusbudpar
621	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	80 Orang	25	30	40	50	65	80	Dusbudpar
622	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Dusbudpar
623	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	-	10	10	20	20	20	20	Dusbudpar



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
624	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.531	1.539	1.544	1.547	1.562	1.577	1.593	Dusbudpar
625	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	Orang	247	4	5	6	7	8	9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
626	Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	38	40	50	55	60	65	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
627	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	Persen	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
628	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	6	5	5	5	5	5		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
629	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	Buku	10	15	16	15	16	15	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
630	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	71%	80	90	80	90	80	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
631	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	17	20	26	20	26	20	26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
632	Produksi perikanan	Ton	137,14	243	254	265	276	288	300	Perikanan
633	Konsumsi ikan	Kg/Orang/Tahun	na	30,66	32,19	33,8	35,49	37,27	39,13	Perikanan
634	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	100	23,08	13,33	11,76	10,53	9,52	8,7	Perikanan
635	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	69,72	27,98	27,56	27,17	26,81	26,38	26	Perikanan
636	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kg	119	85	87	90	92	95	97	Perikanan
637	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	Perikanan
638	Nilai tukar nelayan	Poin	102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	Perikanan
639	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ Kota (sumber data: one data KKP)	Ton	137,14	243	254	265	276	288	300	Perikanan



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
640	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	13	16	19	22	25	28	31	Perikanan
641	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	0	0	0	25	35	45	100	Perikanan
642	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	IUP	0	0	1	1	1	1	1	Perikanan
643	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	Orang	146	180	200	220	240	260	280	Perikanan
644	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ekor	151.000	500.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	Perikanan
645	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95,62	68	70	72	74	76	78	Perikanan
646	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	41,52	175	184	193	202	212	222	Perikanan
647	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB		3.386,87	3.454,47	4.525,58	3.596,96	3.366,89	3.742,70	3.817,55	Pertanian
648	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		3.386,87	3.454,47	4.525,58	3.596,96	3.366,89	3.742,70	3.817,55	Pertanian
649	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar									Pertanian
	Padi = 2,96	Ton	2,96	3	3,5	3,7	3,8	4	4	Pertanian
	Jagung = 3,35	Ton	3,35	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	Pertanian
	Ubi Kayu = 40,53	Ton	40,53	40,6	40,6	40,9	41,9	42,9	43,9	Pertanian
	Ubi Jalar = 7,67	Ton	7,67	7	8	8	9	9	9	Pertanian
650	Cakupan bina kelompok petani		322	350	375	400	425	450	475	Pertanian
651	Produksi sektor Perkebunan (TON)									Pertanian
	Sawit = 7951	Ton	7951	8348,55	8765,97	9204,26	9664,48	10147,7	10655,09	Pertanian



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kopi = 33	Ton	33	34,65	36,38	38,2	40,11	42,11	44,223	Pertanian
	Kakao = 153	Ton	153	160,65	168,68	177,11	185,97	195,27	205,034	Pertanian
	Karet = 150,6	Ton	150,6	158,13	166,03	174,33	183,05	192,2	201,818	Pertanian
	Lada = 7	Ton	7	7,35	7,72	8,1	8,51	8,91	9,36	Pertanian
652	Nilai tukar petani	Poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	Pertanian
653	Produktivitas pertanian per hektar per tahun									Pertanian
	Padi = 2,96	Ton	2,96	3	3,5	3,7	3,8	4	4	Pertanian
	Jagung = 3,35	Ton	3,35	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	Pertanian
	Ubi Kayu = 40,53	Ton	40,53	40,6	40,6	40,9	41,9	42,9	43,9	Pertanian
	Ubi Jalar = 7,67	Ton	7,67	7	8	8	9	9	9	Pertanian
654	Sarana pertanian yang diberikan	Sarana	5	30	60	70	80	90	100	Pertanian
655	Prasarana pertanian yang digunakan	Prasarana	7	20	30	35	40	45	50	Pertanian
656	Persentase prasarana yang digunakan	Persen	7	26	30	35	40	45	50	Pertanian
657	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	3	3	3	3	3	3	3	Pertanian
658	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)									Pertanian
	Padi = 2,96	Persen		1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	Pertanian
	Jagung = 3,35	Persen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	Pertanian



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
659	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persen		1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
660	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan									Pertanian
	Sawit	Persen		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
	Kopi	Persen		0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
	Kakao	Persen		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
	Karet	Persen		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
	Lada	Persen		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
661	persentase peningkatan produktivitas peternakan									Pertanian
	Sapi Potong	Ton	29,95	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	Pertanian
	Ayam Broiler	Ton	594,78	0,043	0,045	0,046	0,047	0,048	0,05	Pertanian
	Telur Ayam Ras	Ton	24,1	0,05	0,051	0,051	0,052	0,052	0,053	Pertanian
662	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	60	65	68	70	73	75	85	Pertanian
663	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis									Pertanian
	Kec. Malinau Kota	Persen	66,00	67,90	70,02	72,11	75,27	77,50	79,8	Pertanian
	Kec. Malinau Utara	Persen	4,10	4,20	4,40	4,56	4,61	4,75	5,25	Pertanian
	Kec. Malinau Barat	Persen	2,88	2,97	3,90	3,96	4,08	5,10	4,89	Pertanian
	Kec. Mentarang	Persen	2,16	2,20	2,30	2,35	2,42	2,51	2,59	Pertanian
664	Persentase koperasi aktif	Persen	65	66	70	72	74	75	80	Perindag
665	Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	52,50%	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%	Perindag
666	Cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal	Persen	5	5	5	5	5	5	5	Perindag



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
667	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	0%	5	5	5	5	5	5	Perindag
668	Pertumbuhan Industri	Persen	5,28	5	5	5	5	5	5	Perindag
669	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	6,50	8	12	16	19	23	27	Perindag
670	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	2	3	5	6	8	9	11	Perindag
671	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	2	2	2	2	2	2	2	Perindag
672	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	18	19	23	27	31	35	39	Perindag
673	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	6,5	7	8	9	10	11	12	Perindag
674	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Persen	0%	8	12	16	19	23	27	Perindag
675	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Persen	0%	15	15,58	16,16	16,74	17,33	17,91	Perindag
676	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	0%	2	2	2	2	2	2	Perindag



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
677	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag
678	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	9,8	12	13	16	19	23	27	Perindag
679	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag
680	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	0%	1	1	1	1	1	1	Perindag
681	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	18	18	18	18	18	18	18	Perindag
682	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	18	18	18	18	18	18	18	Perindag
683	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	2,49	3,49	3,74	3,99	4,23	4,48	,4,73	Perindag
684	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	22,44	22,69	22,94	23,19	23,44	23,69	23,94	Perindag
685	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag
686	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
687	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	10	9,97	14,96	19,95	24,93	29,92	34,91	Perindag
688	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	2,49	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	Perindag
689	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	9,97	14,96	17,45	19,95	22,44	24,97	27,43	Perindag
690	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag
691	Persentase penerbitan TDG	Persen	0%	0%	100	100	100	100	100	Perindag
692	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Persen	0%	10	20	30	30	30	30	Perindag
693	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Persen	0%	50	50	50	50	50	50	Perindag
694	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Persen	0%	50	50	50	50	50	50	Perindag
695	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	22,22	30	40	50	70	80	100	Perindag
696	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0%	25	25	50	60	80	100	Perindag
697	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Persen	0%	25	25	50	60	80	100	Perindag
698	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	83	100	100	100	100	100	100	Perindag



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
699	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Persen	83	100	100	100	100	100	100	Perindag
700	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persen	0%	100	100	100	100	100	100	Perindag
701	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	83	100	100	100	100	100	100	Perindag
702	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	0%	0%	0%	0%	100	100	100	Perindag
703	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perindag
704	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	Persen	0%	0%	0%	20	25	30	35	Perindag
705	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perindag
706	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	10	10	10	10	10	10	10	Perindag
707	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	50	50	50	50	50	50	50	Perindag
708	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perindag
709	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	- 38,00	0%	1,0	1,2	1,5	1,7	2	Perindag



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
710	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persen	2,56	2,60	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00	Perindag
711	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	2456	2542	2628	2714	2800	2886	2972	Perindag
712	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	87	80	80	80	90	90	90	BPBJ
713	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	80	80	90	90	100	100	BPBJ
714	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	33	50	50	60	70	80	90	BPBJ
715	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	22,74	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	BPKD
716	Rasio PAD	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BPKD
717	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	BPKD
718	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	BPKD
719	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	55,33	62,83	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	BPKD
720	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
721	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	82,70	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	BPKD
722	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	92,68	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	97,00	BPKD
723	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	71,84	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	BPKD
724	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKD
725	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKD



No	INDIKATOR /IKK	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			Capaian 2020	Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
726	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	1,56	2,29	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	BKPP
727	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0,004	0,008	0,150	0,025	0,035	0,045	0,055	BKPP
728	Rasion Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	1	0,526	1	1	1	1	1	BKPP
729	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	2,5	1	1	1	1	1	1	BKPP
730	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	BKPP
731	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	10,38	20	25	30	35	40	45	BKPP
732	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	org	32	33	33	33	33	33	33	BKPP
733	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	org	155	155	155	155	155	155	155	BKPP
734	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	org	10	300	320	340	360	380	400	BKPP

Sumber diolah 2021

